

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK
DI MARKAS KOMANDO POLDA METRO JAYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**MUHAMMAD MUSTOFA
NPM : 0806447381**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JUNI, 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

**JUDUL TESIS : MANAJEMEN SEKURITI FISIK
DI MARKAS KOMANDO POLDA
METRO JAYA**

Tesis ini telah saya setuju untuk dipertahankan di depan Tim penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pembimbing :



Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang di kutip maupun di rujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ~~Muhammad Mustofa~~
NPM : ~~0806417391~~
Tanda Tangan :
Tanggal : Juni, 2010

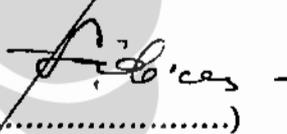
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Mustofa
NPM : 0806447381
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI MARKAS
KOMANDO POLDA METRO JAYA

Tesis ini berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Science pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. dr. H. Hadiman, SH. MSc.


(.....)

Penguji I : Prof. DR. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi.


(.....)

Penguji II : Prof. DR. Payaman J. Simanjuntak, MSi.


(.....)

Penguji III : Dra. Ida Ayu Wiasiti Soentono, M.Kom.


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih dan karunia-Nya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulisan tesis ini menuntut ketabahan, ketekunan, ketelitian, kecermatan dan kerja keras, serta memerlukan kedisiplinan diri dalam mengelola waktu yang telah disediakan oleh lembaga pendidikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka kelengkapan studi di Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian. Setelah mengikuti studi selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2008, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berkaitan dengan masalah manajemen sistem keamanan fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya.

Manajemen sekuriti sudah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap perusahaan dan instansi karena meningkatnya berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang semakin kompleks, termasuk di Indonesia dan tidak terkecuali di kawasan kantor Kepolisian. Dalam hal ini tindakan pengamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan secara profesional dan proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan suatu upaya pencegahan kejahatan situasional yang bertujuan mencegah kerugian dari sebab apapun.

Penelitian ini dilakukan di Markas Komando Polda Metro Jaya dengan maksud untuk memberikan masukan kepada pihak *management security* tentang kelemahan penyelenggaraan manajemen keamanan fisiknya, supaya dapat memperbaiki dan meningkatkan faktor keamanan. Penerapan manajemen sekuriti fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya yang dirasakan masih belum maksimal dengan ditemukannya beberapa permasalahan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pengamanannya. Akibatnya, Polda Metro Jaya masih menghadapi risiko bahaya dan kerugian yang besar. Masih terjadinya bentuk-bentuk potensi kerawanan dan ancaman baik internal yang dilakukan oleh anggota polisi Polda Metro Jaya, seperti pencurian asset kantor, maupun eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam rangka melakukan penelitian tentang tindakan pengamanan di lingkungan Polda Metro Jaya ini dalam penulis telah mendapat dukungan dari

banyak pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

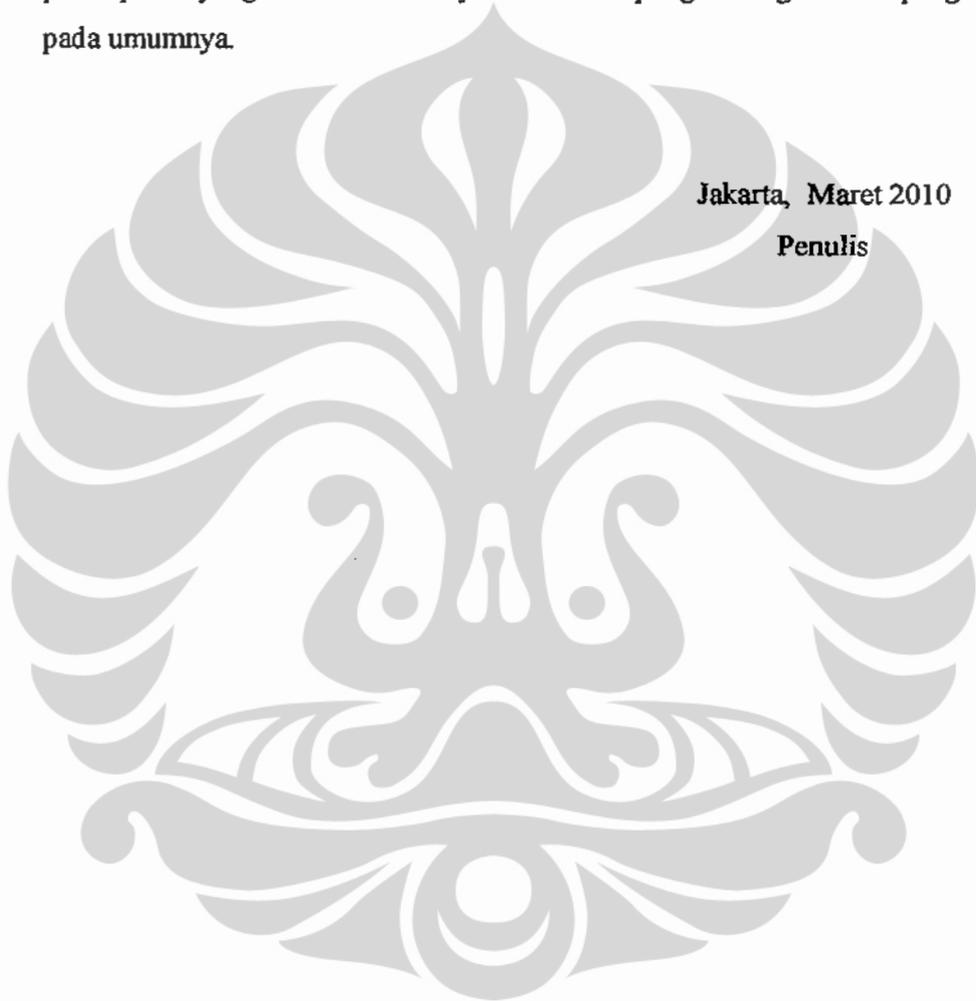
1. Dr. Dr. Hadiman SH. MSc, selaku pengajar mata kuliah Manajemen Sekuriti Fisik sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono Psi, Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak Msi, dan Dra. Ida Ayu Wiastiti Suntono M.Kom, selaku dosen penguji yang telah memberi arahan dan saran-saran penyempurnaan;
3. Seluruh pengajar program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, yang telah memberikan tambahan pengetahuan dan pembekalan yang berharga;
4. Kapolda Metro Jaya Irfan Wahyono, yang telah dengan senang hati memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian, serta membantu dalam kelancaran proses penelitian selama berada di Jakarta;
5. Kepada para pihak pejabat dan staf Polda Metro Jaya khususnya AKP. Sende, selaku Kepala Satuan Pengamanan dan Protokol Polda metro Jaya yang telah memberikan ijin dan data yang diperlukan; juga seluruh anggota dan tenaga sekuriti Polda Metro Jaya dan karyawan yang telah dengan senang hati menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan;
6. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya angkatan XIII KIK UI yang telah memberikan sumbangsih referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun pada saat belajar kelompok;
7. Seluruh staff KIK UI yang telah ikut andil besar dalam hal terlaksananya proses belajar mengajar di program Pasca Sarjana KIK UI;
8. Kepada kedua orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam peneliti menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis;
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung baik selama perkuliahan maupun selama penelitian dan proses penulisan tesis ini.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini untuk itu penulis terbuka menerima kritikan dan masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Maret 2010

Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad mustofa
NPM : 0806447381
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Program : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

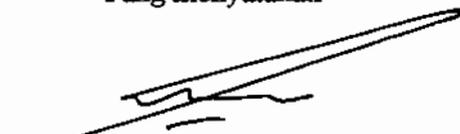
demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI MARKAS KOMANDO POLDA
METRO JAYA**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2010
Yang menyatakan


(Muhammad Mustofa)

RINGKASAN

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Tesis, 8 Juni 2010

1. Nama : MUHAMMAD MUSTOFA /0806447381
2. Judul : MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI MARKAS
KOMANDO POLDA METRO JAYA
3. Ringkasan :

Penelitian dilakukan di Markas Komando Polda Metro Jaya Jakarta Raya mengenai pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di tempat obyek vital milik negara tersebut, termasuk perlindungan aset-asetnya. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pengamanan kawasan tersebut adalah menganalisa kejahatan.

Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah seperti Polda Metro Jaya selalu berupaya untuk memelihara keamanan lingkungannya. Tidak ada perusahaan tidak menghadapi risiko bahaya dan kerugian besar. Maka dengan melakukan analisis fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pada Markas Komando Polda Metro Jaya, kesimpulan yang di dapat bahwa beberapa kelemahan penyelenggaraan manajemen keamanan fisik perusahaan dan kesalahan pada Markas Komando Polda Metro Jaya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya potensi ancaman dari internal dan eksternal perusahaan. Seperti, terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian ataupun petugas Satuan Pengamanan *outsourcing* Polda Metro Jaya.

Sistem keamanan oleh manajemen sekuriti Markas komando Polda Metro Jaya dengan menggunakan tenaga Sekuriti *inhouse* dari petugas Kepolisian Detasemen Markas dan Satuan Pengamanan *outsourcing*. Polda Metro Jaya termasuk obyek vital nasional, dan sebab itu seharusnya menggunakan "*inhouse security guards*" sesuai dengan SKEP. KAPOLRI Nomor 738/X/2005. Pelaksanaan pengamanan sekuriti pada obyek vital nasional seperti Polda Metro jaya, harus dapat memperkirakan potensi sumber-sumber ancaman yang ada, untuk dapat merumuskan strategi pengamanan, mempersiapkan peralatan, dan bila perlu menambah jumlah petugas keamanan.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melihat kenyataan pada subyek pengamanan (petugas sekuriti *outsourcing* dan petugas sekuriti *inhouse*); metode yang digunakan yang dijabarkan menjadi pola pengamanan yang dilaksanakan dari segi manejerial dan yuridisnya, pengamanan menggunakan konstruksi, pengamanan elektronik dan pengamanan yang dilakukan dengan memberdayakan peran serta masyarakat; serta obyek yang dilakukan pengamanan dalam hal ini Markas Komando Polda Metro jaya.

Upaya pengamanan arca serta aset-aset milik negara sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, akan tetapi masih kurang maksimal. Saran-saran yang diajukan

adalah instansi Polda Metro Jaya harus membenahi beberapa aspek, yaitu aspek organisasi, aspek sekuriti fisik, aspek lingkungan fisik.

4. Kata Kunci : Manajemen, Sekuriti fisik, Sistem keamanan, organisasi Polri



ABSTRACT

*Program Study of Police Science Studies
Post Graduate Program of Indonesia University
Thesis, 8 June 2010*

- 1. Name** : **MUHAMMAD MUSTOFA/0806447381**
2. Title : **PHYSICAL SECURITY OF POLDA METRO JAYA**
3. Abstract :

Research was conducted on the physical security management at Polda Metro Jaya Jakarta about the implementation management physical vital objects state owned, the research included the protection of state owned assets. One of the important factor in the management administration is to analyse the sources or causes of the criminal acts that can can paralyse the institution.

Most government institutions such as Polda Metro Jaya has to look after maintain environment security. Every government always face risk and threats so that the analysis was conducted manajarial approach namely planning process, organizing, actuating and controlling of security program at Polda Metro Jaya Jakarta.

It was concluded that the weaknesses in government physical security management at Polda Metro Jaya Jakarta in creased potential threats coming from internal and eksternal of government. The weakness of security management such as crime action of vehicle and other criminal acts by members of the police officers or outsourcing Polda Metro Jaya Jakarta.

Security system at Polda Metro Jaya is conducted by using inhouse security personnel from detachment of police officers Polda Metro Jaya and outsourcing security. Polda Metro Jaya is one among national obvits and therefore needs to use inhouse security guards as to SKEP KAPOLRI Number 738/X/2005. The Implementation of security management at Polda Metro Jaya should oversee and anticipate the sources of thereats and thereby formulate security management strategy, need assesment for security means and if necessary additional of Security guard.

The efforts can be conducted using the facts of security subject (officer of outsourcing and inhouse security) method which is formulated become security pattern based on its legal aspects security construction , electronic security means, empowerment of society and the object of security management which in this case Polda Metro Jaya.

Efforts to safe guard the area as well as state owned assets already done by Polda Metro Jaya but still less than the maximum. Suggestions put forwards is clear that some aspects, such as aspect organization, phisic security, and aspect enviroment phisic.

- 5. Key words** : *Management, phisycal security, security system, NIP organization*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Hipotesis	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Pendekatan Penelitian	11
1.5.2. Bidang Penelitian	11
1.5.3. Cara Pengumpulan Data	11
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kerangka	17
2.1.1. Teori Manajemen	17
2.1.1.1. Perencanaan	22
2.1.1.2. Pengorganisasian	23
2.1.1.3. Pelaksanaan	26
2.1.1.4. Pengawasan dan Pengendalian	28
2.1.2. Teori <i>Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)</i>	30
2.1.3. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional	31
2.2. Kerangka Konseptual	39
2.2.1. Konsep Sekuriti	39
2.2.2. Konsep Fisik	44
2.2.3. Konsep Sekuriti Fisik	46
2.2.4. Manajemen Sekuriti	59
2.2.5. Konsep Satuan Pengamanan (Satpam)	60
2.2.6. Konsep Hubungan Industri	61
2.2.7. Konsep Pembinaan	65
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	66
3.1. Gambaran Umum Situasi dan Kondisi Polda Metro Jaya	66

3.1.1. Sejarah Singkat Polda Metro Jaya	66
3.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi	69
3.2. Struktur Organisasi	72
3.3. Detasemen Markas (Denma)	78
3.3.1. Visi, Misi, dan Tugas Denma Polda Metro Jaya	78
3.3.2. Struktur Organisasi Denma	79
3.3.2.1. Satuan Pengamanan dan Protokol (Sat. Pamprot)	79
3.3.2.2. Unsur Sub Pelaksana Tugas	79
3.4. Denah dan Aset-aset Markas Komando Polda Metro Jaya	83
BAB IV	
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK DI MARKAS KOKMANDO POLDA METRO JAYA	85
4.1. Potensi Ancaman di Markas Komando Polda Metro Jaya	85
4.2. Aplikasi <i>Community Development</i> yang dilaksanakan Polda Metro Jaya	90
4.3. Pelaksanaan Pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya	91
4.3.1. Kebijakan Keamanan Markas Komando Polda Metro Jaya	92
4.3.2. Sistem Pengamanan (Anggota Piket Jaga/Satpam)	93
4.3.2.1. Pelibatan Petugas Sekuriti	93
4.3.2.2. Sasaran Pengamanan	94
4.3.2.3. Sarana dan Prasarana	96
4.3.2.4. Pola Pengamanan	98
4.3.2.5. Pembagian Tugas Pengamanan Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i>	99
4.3.2.6. Pembagian Tugas Pengamanan Petugas Sekuriti <i>Out Sourcing</i>	101
4.3.2.7. Pembagian Tugas Pengamanan Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i> dan <i>Out Sourcing</i>	102
4.3.3. Sistem Pengamanan Konstruksi (Sekuriti Fisik)	105
4.3.3.1. Kontrol Akses (<i>Access Control</i>)	105
4.3.3.2. Penghalang (<i>Barrier</i>)	106
4.3.3.3. Pagar (<i>Fences</i>)	106
4.3.3.4. Kunci (<i>Lock</i>)	106
4.3.3.5. Penerangan (<i>Lighting</i>)	107
4.3.3.6. Lahan Parkir	107
4.3.3.7. Pos Jaga	108
4.3.4. Sistem Pengamanan Elektronik	109
BAB V	
ANALISA DAN PEMBAHASAN	111
5.1. Analisa Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Polda Metro Jaya	111
5.1.1. Perencanaan	113
5.1.2. Pengorganisasian	114
5.1.3. Pelaksanaan	114

5.1.4. Pengawasan dan Pengendalian	116
5.2. Kondisi Ideal dan Kondisi Saat ini Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya	117
5.2.1. Subyek Pengamanan (Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i>	117
5.2.1.1. Personel	117
5.2.1.2. Teknologi	118
5.2.1.3. Strategi	120
5.2.2. Metode Pengamanan	121
5.3. Analisa Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i> Ditinjau dari Konsep Pencegahan Kejahatan Situasional	121
5.4. Analisa Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i> Ditinjau dari Konsep Manajemen	122
5.5. Analisa Petugas Sekuriti <i>Inhouse</i> dan <i>Outsourcing</i> Ditinjau dari Konsep Sekuriti Fisik	126
5.5.1. Obyek Pengamanan	136
5.5.2. Analisa Risiko Keamanan di Polda Metro Jaya	139
5.5.2.1. Faktor Lingkungan	139
5.5.2.2. Faktor Manusia	141
5.5.2.3. Faktor Finansial	141
5.5.3. <i>Crime Prevention Through Environment Design</i> (<i>CPTED</i>)	142
5.6. Upaya Antisipasi Bentuk Kerawanan dan Ancaman Terhadap Pengamanan Fisik di Polda Metro Jaya	144
5.6.1. Preventif	144
5.6.2. Pengaturan dan Penjagaan	145
5.6.3. Pengawasan	146
5.6.4. Patroli	146
5.6.5. Represif	146
BAB VI PENUTUP	149
6.1. Kesimpulan	149
6.2. Saran	154

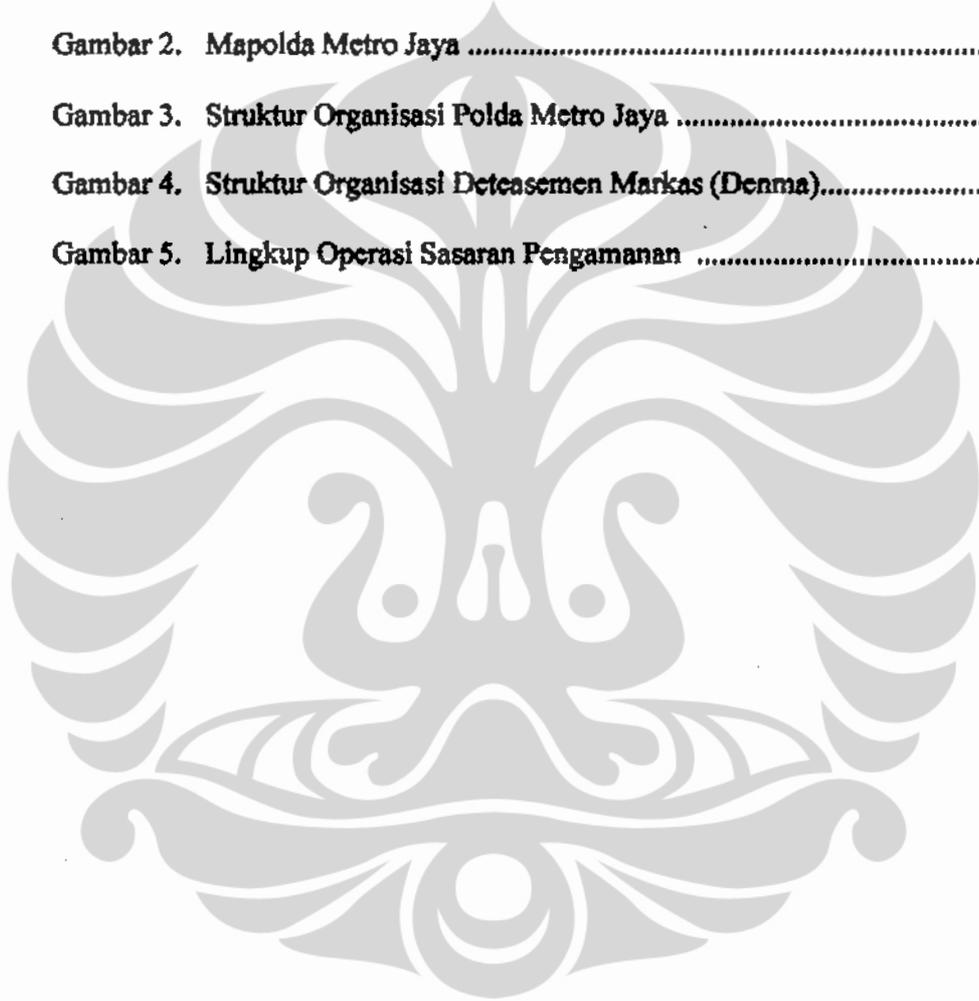
**DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1 Data Kebutuhan Ketinggian Pagar	44
Tabel 2. Data Jumlah Personel Polda Metro Jaya	60
Tabel 3. Data Jumlah PNS Polda Metro Jaya	62
Tabel 4. Data Kasus Unjuk Rasa Tahun 2009-2010	73
Tabel 5. Data Rekapitulasi kejadian Tahaun 2009-2010.....	74

DAFTAR GAMBAR

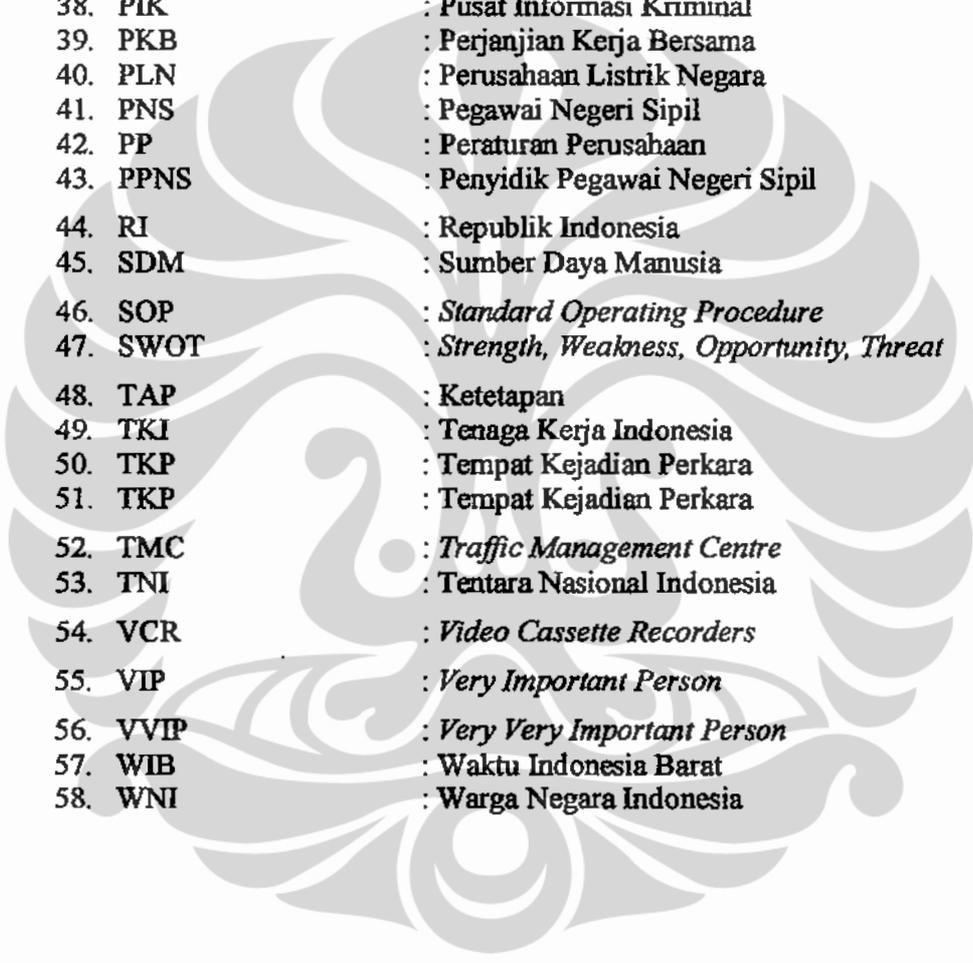
	Halaman
Gambar 1. Prinsip-Prinsip Manajemen	26
Gambar 2. Mapolda Metro Jaya	52
Gambar 3. Struktur Organisasi Polda Metro Jaya	59
Gambar 4. Struktur Organisasi Detasemen Markas (Denma).....	67
Gambar 5. Lingkup Operasi Sasaran Pengamanan	81



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN :

1. AF : Ancaman Faktual
2. AKBP : Ajun komisaris Besar Polisi
3. AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. AKP : Ajun Komisaris Polisi
5. APP : Acara Petunjuk Pimpinan
6. BI : Bank Indonesia
7. BPN : Badan Pertahanan Nasional
8. BUJPP : Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan,
9. CCTV : *Closed Circuit Television*
10. CD : *Community Development*
11. CJS : *Criminal Justice System*
12. CMI : Cara Memberi Instruksi
13. CPTED : *Crime Prevention Trough Environmental Design*
14. CSR : *Corporate Social Responsibility*
15. DKI : Daerah Khusus Ibu Kota
16. FKK : Faktor Korelatif Kriminogen
17. FKPM : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
18. ha : *Hektare*
19. HAM : Hak Asasi Manusia
20. HES : *Health, Environment and Safety*
21. HLS : *High Level Security*
22. HT : *Handy Talky*
23. IP : *Internet Protocol*
24. IT: Informasi Teknologi
25. K3L2 : Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan
26. KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
27. KOD : Kesatuan Operasional Dasar
28. KTP : Kartu Tanda Penduduk
29. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
30. KUHP : Kitab undang-undang Hukum Pidana

- 
31. LLS : *Low level security*
32. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
33. MoU : Memorandum of Understanding
34. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
35. MS : *Medium Security*
36. PH : *Police Hazard*
37. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
38. PIK : Pusat Informasi Kriminal
39. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
40. PLN : Perusahaan Listrik Negara
41. PNS : Pegawai Negeri Sipil
42. PP : Peraturan Perusahaan
43. PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
44. RI : Republik Indonesia
45. SDM : Sumber Daya Manusia
46. SOP : *Standard Operating Procedure*
47. SWOT : *Strength, Weakness, Opportunity, Threat*
48. TAP : Ketetapan
49. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
50. TKP : Tempat Kejadian Perkara
51. TKP : Tempat Kejadian Perkara
52. TMC : *Traffic Management Centre*
53. TNI : Tentara Nasional Indonesia
54. VCR : *Video Cassette Recorders*
55. VIP : *Very Important Person*
56. VVIP : *Very Very Important Person*
57. WIB : Waktu Indonesia Barat
58. WNI : Warga Negara Indonesia

AKRONIM :

1. Alutsista : Alat utama sistem persenjataan
2. Babinkamtibmas: Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3. Binamitra : Pembinaan dan Kemitraan
4. Comdev (CD) : *Community Development*
5. Danru : Komandan Regu
6. Denma : Detasemen Markas
7. Diktukba : Pendidikan Pembentukan Bintara
8. Dit Reskrim : Direktorat Reserse dan Kriminal
9. Inpres : Instruksi Presiden
10. Intelkam : Intelijen dan Keamanan
11. Juklak : Petunjuk Pelaksanaan
12. Juknis : Petunjuk Teknis
13. Kabag : Kepala Bagian
14. Kadenma : Kepala Detasemen Markas
15. Kadenma : Kepala Detasemen Markas
16. Kamtibmas : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
17. Kapolda : Kepala Kepolisian Daerah
18. Kapolres : Kepala Kepolisian Resort
19. Kapolri : Kepala Kepolisian Republik Indonesia
20. Kapolsek : Kepala Kepolisian Sektor
21. Kapospol : Kepala Pos Polisi
22. Kaunit : Kepala Unit
23. Korsik : Korps Musik
24. Lantas : Lalu lintas
25. Mabes : Markas Besar
26. Mako : Markas Komando
27. Mapolda : Markas Kepolisian Daerah
28. Obvit : Obyek Vital
29. Pol Air : Kepolisian Perairan
30. Polda : Kepolisian Daerah
31. Polres : Kepolisian Resort
32. Polri : Kepolisian Republik Indonesia

- 
33. Polsek : Kepolisian Sektor
34. Poltabes : Kepolisian Kota Besar
35. Posko : Pos Komando
36. Pospol : Pos Polisi
37. Progiat : Program Kegiatan
38. Proja : Program Kerja
39. Reskrim : Reserse dan Kriminal
40. Rutan : Rumah Tahanan
41. Samsat : Satuan Administrasi Satu Atap
42. Sat Pamprot : Satuan Pengamanan dan Protokol
43. Sat Yanma : Satuan Pelayanan Markas
44. Satker : Satuan Kerja
45. Satpam : Satuan Pengamanan
46. Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
47. Skep : Surat Keputusan
48. Sprin : Surat Perintah
49. Tupok : Tugas Pokok
50. Uprapel : Upacara, Rapat dan Apel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat umum selalu berfikir bahwa kantor Polisi adalah tempat yang paling aman bagi orang-orang yang mempunyai niat baik dan sebaliknya bagi orang-orang yang berniat jahat akan terasa menakutkan. Ternyata, sangat ironis di Markas Komando Polda Metro Jaya justru sering terjadi tindak pidana terutama pencurian kendaraan bermotor dan pencurian aset-aset lainnya. Hal tersebut tidak berjalan lurus terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif seperti yang di amanatkan pada pasal 2 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ancaman yang sangat serius dan patut di waspadai sehingga jangan sampai hal itu terjadi.

Sebagai unsur organisasi terdepan Polri, Polda Metro Jaya harus senantiasa mampu menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertibannya melalui sistem pengamanan yang memadai. Sehingga Polda Metro Jaya dapat mewujudkan kantornya sebagai tempat yang aman dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Karena, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan mutlak setiap orang perorang, kelompok masyarakat dan lingkungan kerja. Keamanan individu dan keamanan lingkungan kerja saling tergantung dan saling mempengaruhi.

Dalam suatu lingkungan kerja, kebutuhan akan keamanan bukan hanya mencakup kebutuhan fisik manusia atau keamanan fisik gedung-gedung, akan tetapi juga keamanan jiwa manusia. Tidak terkecuali, pada Markas Komando Polda Metro Jaya yang merupakan obyek vital nasional, bahkan lebih kompleks dan penting dari lingkungan kerja pada tempat-tempat lainnya. Karena pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan keamanan dalam melakukan kegiatannya sehingga apa yang diinginkannya tercapai. Kebutuhan dasar berupa keamanan diri terhadap gangguan dan ancaman yang ditimbulkan lambat laun akan berkembang seiring perkembangan jaman. Perkembangan tentang konsep

keamanan dewasa ini telah menjadi bahan kajian yang menarik dinegara-negara maju dalam rangka meminimalisir bahaya terhadap manusia maupun kerugian yang ditimbulkan. Kajian ini membagi keamanan dalam dua aspek, yaitu keamanan dari kejahatan yang dikenal dengan nama pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan keamanan dari kerugian yang ditimbulkan akibat ancaman dan gangguan, atau lebih dikenal dengan nama pencegahan kerugian (*loss prevention*). Maka, pengamanan di Polda Metro Jaya tentunya harus sesuai antara pengamanan yang diterapkan dan objek yang diamankan. Sehingga dapat terhindar dalam lubang kontra produktif atau penghamburan biaya yang tidak perlu. Keamanan lingkungan markas Polda Metro Jaya akan terjamin bila semua personil dari pejabat tertinggi hingga paling bawah, berperan aktif menjaga keamanan dirinya dan keamanan lingkungan kerja atau dengan kata lain dengan motivasi sendiri atau dengan istilah sistem pengamanan swakarsa.¹

Dengan kondisi yang ada maka Polda Metro Jaya Melaksanakan pengamanan sekuriti fisik di Polda Metro Jaya mengacu pada 2 sasaran besar aspek sekuriti fisik yaitu :

1. Mencegah masuknya siapapun pada kepentingan yang dilindungi.
2. Mencegah orang dan kendaraan yang keluar dengan membawa barang, informasi dan atau uang secara tidak sah.

Jadi dapat dipahami, betapa besar peranan Polda Metro Jaya kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat Jakarta. Kerusakan atau kehilangan aset lingkungan kerja dapat mengakibatkan gangguan terhadap proses kerja, banyak pihak yang menanggung dampaknya, termasuk seluruh personel baik anggota Polri dan PNS Polri yang mayoritas adalah penduduk Jakarta dan ditambah dengan keluarganya. Oleh sebab itu sekuriti atau keamanan terhadap aset Polda Metro Jaya harus betul-betul dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak terjadi

¹Awaloedin Djamin dalam buku "*Sispanswakarsa dan Industrial Sekuriti*" mendefinisikan bahwa *Sistem Pengamanan Swakarsa* adalah: suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap segala kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan kamtibmas dapat dicegah sedini mungkin, sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparaturnya keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.

kerusakan dan kehilangan aset milik Polda Metro Jaya, sehingga proses kerja dapat terus berjalan dengan baik dan lancar.

Keamanan fisik ataupun keamanan non fisik kedua-duanya sangat penting, namun yang paling penting adalah terhindarnya dari segala gangguan. Gangguan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah gangguan internal dan kedua adalah gangguan eksternal. Gangguan internal merupakan gangguan yang berasal dari lingkup jaringan infrastruktur tersebut dalam hal ini adalah pihak-pihak yang telah mengetahui kondisi keamanan dan kelemahan dari jaringan tersebut. Gangguan eksternal adalah gangguan yang berasal dari pihak luar yang ingin mencoba atau dengan sengaja ingin membobol dinding keamanan yang ada.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi semua bentuk-bentuk potensi kerawanan dan ancaman yang terjadi di Polda Metro Jaya

Menurut Hadiman (2007), upaya *preventif* meliputi :

“(1) antisipasi (pembuatan aturan-aturan), (2) *pre-emptif* (pengamanan fisik), (3) *proaktif* (mencari penyebab) dinyatakan pula bahwa kehadiran pengamanan justru ikut menjamin diperolehnya keuntungan lingkungan kerja. Peningkatan pengamanan yang memperhatikan perbandingan biaya tersebut disebut “*cost effective security*.”²

Dengan demikian keamanan lingkungan kerja adalah sebagai suatu upaya bersama, dalam mewujudkan rasa bebas dari gangguan, kekhawatiran dan resiko serta terciptanya perasaan damai baik individu, kelompok maupun badan usaha atau organisasi yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan, yang diatur dengan jelas secara manajemen dalam hubungan antara status-status dan peranan-peranan yang dimainkan oleh para pemilik status tersebut, dalam pencapaian tujuan organisasi.³

² Hadiman, 2009, “*Manajemen Sekuriti*”, Jakarta : Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.

³ Stephen P. Robbins, 1974, “*Managing Organizational Conflict*”, New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs, hal. 338. mengatakan, untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, status dan peranan setiap pelaku dalam lingkungan kerja harus jelas. Untuk itu, setiap organisasi lingkungan kerja disusun dalam satu struktur dengan (1) pembagian kerja yang jelas; (2) hirarki kewenangan yang jelas; (3) formalisasi peraturan dan prosedur kerja; (4) penempatan pegawai atas dasar kemampuan; (5) jenjang karir bagi pegawai; dan (6) kehidupan organisasi yang dipisahkan dari kehidupan pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya dalam mengamankan aset-aset lingkungan kerja supaya terhindar dari kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu Polda Metro Jaya dituntut untuk mampu menciptakan dan memelihara suatu situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan Polda Metro Jaya itu sendiri termasuk aset-aset yang ada dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan melaksanakan tugas pokoknya dalam melayani masyarakat.

Untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi demi terselenggaranya stabilitas keamanan yang kondusif di lingkungan Polda Metro Jaya dapat memilih bentuk pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* untuk pengamanan aset milik Polda Metro Jaya dan mencegah terjadinya tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor, pengamanan terhadap unjuk rasa, pencurian dokumen, dan tahanan melarikan diri.

Kondisi pengamanan di lingkungan kerja Polda Metro Jaya yaitu adanya pengamanan pada luar gedung dan dalam gedung. Polda Metro Jaya harus dapat memberdayakan personil dalam rangka peningkatan sistem pengamanan lingkungan kerjanya. Kemudian pemberdayaan petugas ini harus diikuti dengan sarana dan prasarana serta aturan yang ada dengan jumlah personel yang belum memenuhi standar serta alat pengamanan yang tidak ada sehingga menghambat kegiatan pengamanan.

Menurut Payaman Simanjuntak (2003:1) bahwa :

“Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses kerja barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan.”⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, paham dan pandangan keamanan mengandung 4 unsur pokok, sebagai berikut :

- a. *Security* adalah bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. *Surety* adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.

⁴ Payaman Simanjuntak, 2003. “*Manajemen Hubungan Industrial*,” Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal 1.

- c. *Safety* adalah perasaan bebas dari resiko.
- d. *Peace* adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Keempat unsur tersebut akan menimbulkan kegairahan kerja, dengan demikian akan mendorong pencapaian kesejahteraan personel lingkungan kerja secara material maupun spiritual.

Keamanan individu dan keamanan lingkungan saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pekerja produktif dapat bekerja secara optimal apabila lingkungan kerjanya dapat memberikan jaminan rasa aman. Sebaliknya keamanan lingkungan kerja akan terjamin bila semua pekerja dari pejabat tertinggi hingga paling bawah, berperan aktif menjaga keamanan dirinya dan keamanan lingkungan kerja atau dengan istilah sistem pengamanan swakarsa, atau yang lebih dikenal dengan istilah Satuan Pengamanan (Satpam).⁵

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, maka dalam melaksanakan tugasnya itu, Polri dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁶

Ketiga macam sekuriti tersebut saling terkait dan dilaksanakan oleh piket fungsi dan Satpam *inhouse* dan *outsourcing* dengan alat-alat pengamanan, serta prosedur dan kontrol dari organisasi (lingkungan kerja yang bersangkutan) yang dilakukan melalui manajemen sekuriti fisik dalam rangka mengamankan kelangsungan lingkungan dan menurunkan potensi resiko dari kerusakan dengan melakukan pencegahan dan mengurangi pengaruh dari kejadian yang terkait dengan pengamanan, akibat dari pengelolaan sekuriti informasi yang memungkinkan data digunakan bersama (*sharing*) dalam lingkungan yang aman dan mampu memberikan jaminan pengamanan secara individual maupun reputasi lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

Dalam rangka memberikan jaminan pengamanan fisik kepada masyarakat dan personel Polda Metro Jaya, maka perlunya upaya pengenalan dan pem...

⁵ Satpam (Satuan Pengamanan) adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

⁶ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

lingkungan baik internal maupun eksternal dengan demikian sangat mutlak dilakukan oleh Satker-satker di bawah Polda Metro Jaya apabila dihadapkan kepada kepentingan memilih dan menentukan bentuk dan sifat penyesuaian secara benar dan tepat. Wujud pilihan yang tepat implementasinya adalah bentuk pemberdayaan kesatuan secara tepat pula, sehingga cara mengantisipasi prediksi atas jenis-jenis hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang dihadapi oleh Polda Metro Jaya.

Untuk itu pengkajian melalui penelitian atas potensi-potensi yang ada dan berada di lingkungan kerja hukum Polda Metro Jaya dirasakan sangat perlu guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam pengembangan lebih lanjut terhadap kompleksitas persoalan-persoalan dalam bidang pengamanan fisik lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

1.2. Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan sekuriti di Polda Metro Jaya sangat penting. Namun masih terkesan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya secara *inhouse* dan *outsourcing* belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, tesis ini akan menjelaskan sebuah contoh pembuatan suatu strategi pengamanan fisik pada suatu lingkungan kerja (Polda Metro Jaya). Strategi yang diterapkan dalam tesis ini selalu *dijustificasi* dengan referensi yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Demi memastikan pengupasan strategi yang tuntas maka dalam tesis ini akan dikhususkan membahas aspek sekuriti fisik dan terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian, perusakan dan lain-lainnya. Walaupun begitu bukan berarti hanya semata-mata sekuriti fisik saja yang akan diulas. Karena untuk membuat suatu strategi yang bagus tentunya harus melibatkan banyak hal selain sekuriti fisik. Oleh karena itulah, walaupun penulis berusaha membatasinya tetapi pada beberapa pembahasan tetap harus diulas juga aspek lain selain sekuriti fisik, maka permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya saat ini, dengan batasan ruang lingkup penelitian pada bidang ancaman, kejahatan dan upaya taktis.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya dalam mengamankan aset-aset lingkungan kerja agar terhindar dari kerusakan dan kerugian serta mencegah adanya gangguan kriminalitas seperti pencurian dan tahanan melarikan diri, dengan mengidentifikasi persoalan-persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada Polda Metro Jaya saat ini ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan fisik lingkungan kerja pada Polda Metro Jaya ?
- c. Bagaimanakah kondisi ideal penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya yang diharapkan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Penulisan tesis ini dibuat dengan tujuan untuk menemukan fakta sebagai data awal agar lebih mudah dalam melihat kesenjangan yang terjadi, kemudian menemukan masalah serta memahami dengan cara mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sekuriti *inhouse* dan petugas sekuriti *outsourcing* pada Polda Metro Jaya, dengan melihat kondisi yang ideal yang seharusnya dilaksanakan tenaga sekuriti dengan kenyataannya agar lebih mudah dalam melihat kemungkinan kesenjangan yang telah terjadi, sehingga didapat solusi yang sebaiknya dilaksanakan oleh manajemen Polda Metro Jaya dalam rangka mencegah segala bentuk ancaman dan potensi ancaman yang ada di lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari adanya kegiatan penelitian ini sudah tentu banyak memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, lingkungan kerja Polda Metro Jaya maupun bagi organisasi Polri dan Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian ini secara khususnya bagi Polda Metro Jaya berdasarkan hasil temuan, analisa hingga pemecahan masalah dalam

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Polda Metro Jaya dalam hal keamanan lingkungan kerja khususnya pengamanan fisik terhadap aset-aset lingkungan kerja dan mencegah adanya tindak kriminalitas. Sehingga nantinya dapat dimunculkan kebijakan-kebijakan lingkungan kerja (*company policy*) yang berkaitan dengan masalah keamanan demi pencapaian tujuan dan harapan lingkungan kerja (*company goals*).

- b. Manfaat bagi organisasi Polri dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan tugas Polri dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pengamanan fisik yang efektif dan efisien di dalam mengatasi permasalahan keamanan pada suatu lingkungan kerja Polri, serta dapat dijadikan acuan dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan baru dalam peningkatan profesionalisme Polri di masa yang akan datang.
- c. Manfaat bagi Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran di dalam pengembangan dan perkembangan ilmu dan teknologi Kepolisian oleh Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, guna mewujudkan sosok Polri yang profesional.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka hipotesis yang akan dijadikan sebagai landasan hipotesis kerja dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : “Masih terjadi beberapa ancaman tindakan kriminalitas pada lingkungan kerja Polda Metro Jaya seperti adanya tahanan yang melarikan diri, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dokumen, pencurian aset-aset Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun personel Polda Metro Jaya, hal ini membuktikan bahwa masih belum maksimalnya penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya selama ini, oleh sebab itu diperlukan suatu strategi baru dalam penyelenggaraan pengamanan fisik lingkungan kerja di Polda Metro Jaya.”

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian tesis manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁷ Pendekatan kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran *holistik* 'menyeluruh' yang dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Pendekatan penelitian kualitatif didefinisikan oleh Creswell sebagai berikut:

Sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistik* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. (Creswell, 2002: 1)

Sementara itu, Farouk Muhammad dan Djaali mengemukakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah :

Penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. (Farouk Muhammad & Djaali, 2003: 100).

Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti sebagai instrumen utama dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penelitian tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan

⁷ *Pendekatan kualitatif* adalah pendekatan yang menganalisa tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan, makna tindakan dari kejadian orang yang ingin dipahami, yang terekspresikan secara langsung dalam bahasa yang diterima dan disampaikan secara tidak langsung, kemudian dianalisa dengan teori yang obyektif." (Suparian, 1994 : 6).

suatu objek penelitian.

Sebaliknya, dalam pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menggabungkan teori-teori yang terkait dalam bagian akhir penelitian, di mana teori digunakan untuk membandingkan dan membedakan hasil-hasil penelitian (atau tema atau kategori) yang muncul dari penelitian tersebut. Model ini terutama dikenal dalam penelitian *grounded theory*, dan peneliti menganjurkannya karena model ini menggunakan teori secara induktif. (Creswell, 2002: 20).

Sudut pandang *grounded theory* dari Glaser (1978) dalam Creswell (2002) juga mendukung pendekatan induktif yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam pendekatan induktif peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data lapangan. Lalu mulai menganalisisnya dan menyusun teori. Setelah teori memiliki dasar yang kuat dan berkembang, lalu kita melakukan tinjauan pustaka di lapangan dan menghubungkan teori dengan tinjauan pustaka itu melalui penggabungan "ide". (Creswell, 2002: 41).

Penelitian kualitatif memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang dianalisa adalah bukan variabel-variabel, akan tetapi hubungan dengan prinsip-prinsip umum dengan satuan-satuan gejala lainnya dengan menggunakan kebudayaan komunitas yang bersangkutan sebagai sebuah kesatuan yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan terlibat dengan kegiatan penyelenggaraan sekuriti khususnya sekuriti fisik yang dilaksanakan oleh anggota Polisi dan Satpam di Polda Metro Jaya dalam mengamankan aset-aset lingkungan kerja supaya terhindar dari kerugian atau kehilangan.

Dalam melakukan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa ucapan-ucapan dan perilaku dari obyek yang diteliti berdasarkan data apa adanya, namun demikian tidak menutup kemungkinan juga menggunakan data kuantitatif berupa angka sebagai pendukung, sehingga informasi yang disajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam.

Untuk menjaga obyektivitas penelitian, digunakan prinsip-prinsip :

a. Peneliti mendekati segala sesuatu yang menjadi kajian dengan keraguan

(skeptik).

- b. Peneliti harus objektif dalam menilai segala sesuatu yaitu membebaskan dirinya dari sikap-sikap pribadi, keinginan-keinginan, kecenderungan untuk menolak atau menyukai data yang telah dikumpulkan.
- c. Peneliti secara etika harus bersifat netral atau berupaya menghindari dari kecenderungan untuk menghakimi secara moral terhadap para informannya berdasarkan hasil-hasil penemuannya.

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mencari atau menemukan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan prinsip manajemen yang dimulai dari perencanaan sekuriti, pengorganisasian sekuriti, pelaksanaan sekuriti, dan pengawasan serta pengendalian sekuriti di Polda Metro Jaya. Kedua, pendekatan yuridis yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

1.5.2. Bidang Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka bidang penelitian difokuskan kepada 3 aspek atau bidang yaitu ancaman, kejahatan dan upaya taktis yang merupakan penjabaran dari ruang lingkup masalah penelitian tentang manajemen sekuriti fisik pada lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

1.5.3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terlibat terhadap kegiatan penyelenggaraan pengamanan khususnya sekuriti fisik yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* pada Polda Metro Jaya termasuk perlindungan terhadap aset-aset lingkungan kerja supaya terhindar dari kerugian atau kehilangan. Hal yang diamati adalah tentang apa, siapa, di mana, dan mengapa, yang merupakan potensi ancaman dan kejahatan, serta termasuk cara-cara melakukan tindakan pengamanan dan mengatasinya, yang merupakan upaya taktis dan strategi keamanan.

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap aktivitas pengamanan di Polda Metro Jaya, wawancara dengan pedoman kepada sejumlah informan, baik dari personel Polda Metro Jaya, anggota Satuan Pengamanan, petugas parkir, pejabat struktural Polda Metro Jaya, anggota pengamanan, pejabat struktural bagian sekuriti pada Denma Polda Metro Jaya, dan masyarakat di sekitar lingkungan Polda Metro Jaya, serta melakukan kajian dokumen untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh dari kedua teknik sebelumnya.

a. Pengamatan

Pengamatan menurut pendapat Suparian (1994), bahwa : “Pengamatan digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang ditelitinya.”

Teknik ini digunakan peneliti dengan langsung mengadakan pengamatan guna mengetahui dan menangkap apa-apa yang dilakukan oleh seseorang atau situasi kondisi dalam pengamanan fisik lingkungan kerja Polda Metro Jaya.

Dalam melakukan pengamatan penulis berusaha melihat dari dekat berbagai tindakan dan perilaku para personel dalam satuan pengamanan fisik Polda Metro Jaya dalam mengamankan wilayah kerjanya dan sekaligus membandingkannya atau menguatkan hasil wawancara dengan informan. Langkah tersebut ditempuh guna menguatkan informasi yang diberikan oleh informan sehingga *validitas* dan akurasi data tidak diragukan.

Selama melakukan pengamatan penulis melengkapi diri dengan kamera dan buku catatan untuk membantu dalam observasi yang penulis lakukan agar gejala yang penulis amati dapat terekam dalam catatan penulis.

b. Wawancara

Menurut pendapat Suparian (1994), bahwa : “Wawancara dengan pedoman adalah teknik mengumpulkan informasi dari para

objek yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai sesuatu masalah.”

Wawancara dengan pedoman peneliti lakukan terhadap pejabat struktural bagian sekuriti Denma Polda Metro Jaya, anggota personel Polda Metro Jaya yang terkait dengan piket fungsi, Satuan Pengamanan, dan masyarakat yang ada dalam lingkungan kerja Polda Metro Jaya. Wawancara dengan pedoman yang peneliti lakukan terhadap pemimpin dan pejabat struktural Polda Metro Jaya bertujuan untuk mendukung dan memperoleh informasi khusus yang didapat dari teknik pengamatan.

Untuk wawancara dengan pedoman yang peneliti lakukan terhadap petugas Satpam dan petugas parkir bertujuan untuk memperoleh informasi tentang strategi yang dilakukan dalam pengamanan fisik Polda Metro Jaya. Untuk wawancara dengan pedoman yang peneliti lakukan terhadap masyarakat di lingkungan kerja Polda Metro Jaya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap pihak Polda Metro Jaya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan informan sebagai pelaku dalam penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan fisik terhadap perumahan Alam Sutera Serpong. Informan dalam penelitian keamanan, menurut Hadiman (2009), terdiri dari informan kunci, informan penting, dan informan pelengkap. Dalam penelitian ini, masing-masing informan memiliki peran yang saling berpengaruh terhadap sistem manajemen pengamanan fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya. Adapun informan penelitian ini adalah pihak, yang dikualifikasi sebagai informan berikut ini:

- 1) Informan Kunci, terdiri dari: Unsur-unsur pimpinan Polda Metro Jaya yaitu : Kapolda, dan Wakapolda.
- 2) Informan Penting, terdiri dari: Kadenma, Kasat Pamprot Denma, Kanit Walga Denma; anggota Polisi Polda Metro Jaya.
- 3) Informan Tambahan, terdiri dari : orang-orang yang pernah dan atau yang sedang berhubungan dengan Polda Metro Jaya.

c. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan terhadap data-data. Data merupakan salah satu sumber informasi yang dapat diperoleh dalam penelitian, yang mana data tersebut dapat digunakan untuk mengkaji masalah penelitian, sebagai bukti atau untuk pembuktian dalam menyatakan atau mendukung argumentasi ilmiah. Selain diperoleh dari metode tersebut di atas, data juga dapat diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan manajemen pengamanan fisik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Dengan cara pengumpulan data tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan dan mendiskripsikan tentang organisasi, pengelolaan, strategi dalam pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di samping itu, diharapkan pula dengan cara ini akan dapat memahami dan mengamati yang ada dalam kegiatan pengamanan sehari-hari yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk memastikan keabsahan data yang didapat dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengamatan (*observasi*), wawancara dan analisa dokumen, maka langkah-langkah berikut ini akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) *Triangulasi data* – data akan dikumpulkan melalui sumber majemuk untuk memasukkan pengamatan, wawancara dan analisa dokumen.
- 2) Pemeriksaan anggota – informan akan berperan sebagai pemeriksa sepanjang proses analisa. Dialog yang

- berkesinambungan menyangkut interpretasi peneliti tentang realitas dan arti informan akan memastikan kejujuran data.
- 3) Pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian – pengamatan tetap dan berulang terhadap fenomena dan latar serupa akan berlangsung di lokasi selama masa penelitian.
 - 4) Pemeriksaan rekan informan akan berperan sebagai pemeriksa,
 - 5) Informan akan dilibatkan dalam sebagian besar tahap penelitian, dari desain penelitian hingga pemeriksaan penafsiran dan kesimpulan.
 - 6) Klarifikasi prasangka peneliti akan dikemukakan terhadap informan pada awal penelitian. (Creswell, 2002: 156-157).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika atau tata urutan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, masalah penelitian, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang kerangka teori dan literatur konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar penulisan tesis ini. Untuk kerangka teori meliputi teori manajemen, teori crime prevention through environmental design (CPTED), dan teori strategi pencegahan kejahatan situasional, sedangkan kerangka konsep meliputi konsep sekuriti, konsep fisik, konsep sekuriti fisik, konsep manajemen sekuriti, konsep Satpam, serta konsep hubungan industrial dan konsep pembinaan.

Bab III Gambaran Umum Lingkungan Kerja Polda Metro Jaya, yang menguraikan tentang gambaran umum situasi dan kondisi Polda Metro Jaya meliputi situasi geografi, demografi, gambaran umum Polda Metro Jaya yang meliputi struktur organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, serta visi dan misi dalam bidang pengamanan fisik, dan gangguan Kamtibmas. Juga inventarisasi aset-aset yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya

Bab IV Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik di Polda Metro Jaya, yang berisi tentang pelaksanaan pengamanan Polda Metro Jaya meliputi penjelasan potensi ancaman lingkungan kerja pada Polda Metro Jaya terdiri dari kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dokumen, tahanan melarikan diri dan kasus unjuk rasa, serta pembinaan lingkungan masyarakat sekitar (*Community Development*) sub bab berikutnya kebijakan pengamanan fisik di lingkungan kerja Polda Metro Jaya, sistem pengamanan fisik yang dilakukan oleh personel Polda Metro Jaya melalui satuan kerja di bawah Polda Metro Jaya dan adanya pelibatan petugas sekuriti dari *outsourcing*, sasaran pengamanan, pembagian tugas pengamanan, kemudian menjelaskan sistem pengamanan konstruksi (fisik) terdiri dari kontrol akses, penghalang, pagar, kunci, penerangan, lahan parkir, pos jaga, serta sistem pengamanan elektronik.

Bab V Analisa dan Pembahasan, pada bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang menguraikan tentang kondisi ideal dan kondisi saat ini pelaksanaan manajemen sekuriti fisik dalam lingkungan kerja Polda Metro Jaya, dengan pembahasan dilihat dari subyek pengamanan fisik, metode yang digunakan dan obyek pengamanan fisik. Pada subyek pengamanan dijelaskan mengenai personel, teknologi dan strategi, sedangkan dalam metode pengamanan pembahasan dengan analisa pengamanan *inhouse* melalui personel Polda Metro Jaya dan Satpam *outsourcing* dilihat dari konsep strategi pencegahan kejahatan, konsep manajemen, dan konsep sekuriti fisik, serta analisa resiko keamanan di Polda Metro Jaya dilihat dari faktor lingkungan secara internal dan eksternal, faktor manusia dan faktor *finansial*.

Bab VI Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk Polda Metro Jaya sebagai langkah perbaikan untuk pelaksanaan sekuriti fisik di masa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang kerangka teori dan literatur konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar penulisan tesis ini. Untuk kerangka teori meliputi teori peran, teori manajemen, dan teori strategi pencegahan kejahatan sedangkan kerangka konsep meliputi konsep manajemen sekuriti, konsep sekuriti, konsep sekuriti fisik, dan konsep Satpam serta konsep lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Manajemen

Teori manajemen dalam arti luas adalah merupakan pengkoordinasian usaha-usaha manusia sehingga tujuan perorang akan diwujudkan dalam keberhasilan sosial. Pembangunan di bidang manajemen sumber daya manusia maupun material akan menimbulkan dampak terjadinya pergeseran nilai-nilai kebudayaan, yaitu dari masyarakat sederhana ke masyarakat transisi.

Encyclopedia of The Social Sciences mendefinisikan manajemen sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.⁸ Keberhasilan mencapai tujuan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi kegiatan-kegiatan suatu organisasi di dalam pencapaian tujuan atau sasaran (*goals*).

Menurut Sondang P. Siagian, manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai berikut : 1) proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan; 2) kemampuan atau ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Posisi sekuriti di perusahaan adalah sama dengan bagian divisi lainnya, yaitu ikut berperan serta dalam mencapai tujuan perusahaan

⁸ Agus Sabardi, 1997, "Pengantar Manajemen," Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal 3.

untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Oleh karena itu manajemen sekuriti perusahaan merupakan bagian dari manajemen perusahaan, sehingga dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti di perusahaan tidak terlepas dari manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan digerakkan oleh pimpinan berfungsi sebagai motor dan penggerak organisasi. Kempemimpinan merupakan motor atau daya penggerak semua sumber-sumber dan alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi.⁹

Hal ini menjadi prinsip dasar di dalam mengembangkan ilmu manajemen oleh beberapa ahli atau pakar. Menurut Peter Drucker (1985), efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the things right*) sedangkan efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).¹⁰ Efektif mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien mengacu pada penggunaan sumberdaya minimum untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang telah ditentukan. Bagi manajemen diutamakan efektif lebih dahulu baru efisien. Jadi, organisasi membutuhkan manajemen terutama untuk tiga hal yang terpenting, yaitu:

- a. Pencapaian tujuan secara efektif dan efisien;
- b. Menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menentukan skala prioritas;
- c. Mempunyai keunggulan daya saing (*competitive advantages*) dalam menghadapi persaingan global.

Teori manajemen timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks. Menurut Henry Fayol yang mengemukakan pendapat bahwa praktek-praktek manajemen yang baik mempunyai pola tertentu yang dapat dikenali dan dianalisis. Menurut Fayol ada 6 kegiatan perusahaan, yaitu :

- a. *Technical*, yaitu kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa;
- b. *Commercial*, yaitu kegiatan membeli atau mendapatkan bahan yang diperlukan dan menjual barang atau jasa yang dihasilkan;

⁹ Sondang P. Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Bumi Aksara. hal 5.

¹⁰ Charles Greene, Everett E. Adam Jr dan Ronald J. Ebert, 1985, "*Manajemen*", New Jersey : Prentice-Hall, Inc, hal 9.

- c. *Financial*, yaitu kegiatan untuk mendapatkan atau mengatur penggunaan dana dengan sebaik-baiknya;
- d. *Security*, yaitu kegiatan melindungi semua orang yang bekerja serta kekayaan perusahaan;
- e. *Accountancy*, yaitu kegiatan mencatat dan menghitung biaya, pendapatan, laba dan kekayaan perusahaan, menyusun neraca dan membuat statistik;
- f. *Managerial*, yaitu kegiatan melaksanakan fungsi manajemen.

Menurut James A.F. Stoner yang mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

Proses di sini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan yang menyeluruh, saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sekuriti merupakan bagian dari manajemen dan siap diperlukan sebagai suatu bagian dari pengetahuan manajemen. Langkah-langkah kegiatan manajemen sekuriti diawali dengan identifikasi masalah yang potensial menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Identifikasi masalah dalam manajemen sekuriti meliputi : 1) analisa dan perencanaan; 2) pengorganisasian, pendelegasian; 3) supervisi/pengawasan; dan 4) analisa kondisi kritis yang tetap dan berubah.

Fayol mengemukakan manajemen sebagai kegiatan perusahaan yang keenam, yaitu kegiatan manajerial; merupakan tugas utama setiap manajer yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengawasan.¹²

¹¹ James A. F. Stoner dan Charles Wankel, 1986, "Manajemen." *Third Edition*, New Jersey : Prentice-Hal, Inc., hal 8.

¹² Agus Sabardi, 1997, "Pengantar Manajemen," Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal. 20-21.

Perencanaan mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan beberapa metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga sasaran organisasi tercapai. Pemberian perintah meliputi mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas penting. Pengkoordinasian merupakan kegiatan menyerasikan sumber-sumber daya dan seluruh aktifitas/kegiatan organisasi sehingga proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan baik. Pengkoordinasian tidak selalu menggunakan teknik-teknik khusus tetapi lebih banyak dicapai melalui ketrampilan aktif manajer atau *supervisor* sendiri dalam memberikan bentuk praktik tentang perilaku mereka sendiri atas kerja sama yang konstruktif dan rasa tanggung jawab bersama. Pengawasan merupakan aktifitas memantau kegiatan-kegiatan guna memastikan kegiatan tersebut dicapai sesuai rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

George R. Terry dalam bukunya "*Principle of Management*" mengatakan ada 6 sumber daya pokok dari manajemen yaitu :

- a. *Men and women* diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen
- b. *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana
- c. *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen.
- d. *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran.
- e. *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Setelah memiliki empat unsur di atas manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri.
- f. *Methods* diartikan sebagai metode. Metode merupakan cara yang digunakan dalam menjalankan sebuah manajemen.

Menurut G.R. Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹³

Dari definisi-definisi manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa idealnya pelaksanaan pengamanan menggunakan manajemen sekuriti yang baik yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen agar yang dikerjakan benar (*efektif/sangkil*) dan cara mengerjakan benar (*efisien/mangkus*). Hal ini sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya dengan menggunakan pendekatan manajerial yang ideal dengan melihat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sehingga dapat melihat adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan dan memudahkan untuk mencari faktor-faktor kelemahan petugas sekuriti atau Satpam yang dilengkapi dengan teknologi pengamanannya dalam pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya. Penganalisaan peneliti persempit dengan melihat pada subyek pengamanan, metoda yang digunakan dan obyek yang harus diamankan agar lebih sistematis dalam penyajiannya.

Pengamanan yang dilakukan oleh sekuriti Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan manajerial dengan melihat apakah fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian petugas sekuriti di dalam proses pencapaian tujuan dengan menggerakkan orang lain sudah berjalan atau belum dikaitkan dengan aspek hukumnya.

Sebuah organisasi memerlukan manajemen, artinya seluruh anggota organisasi berusaha mengetrapkan semua konsep manajemen yang mengarah pada perbaikan terus menerus. Untuk itu perlu memahami semua fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, yaitu :

¹³ Op. Cit., hal 3.

2.1.1.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan mempunyai pengertian yaitu penyusunan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴

Menurut pendapat Thompson Jr. Strickland dan Gamble dalam Hadiman (2005), yang menjelaskan bahwa untuk menganalisis profil suatu perusahaan akan digunakan suatu pendekatan dengan cara analisis SWOT. SWOT singkatan dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), *Threat* (Tantangan).¹⁵

Proses perencanaan, meliputi :

- 1) Penentuan tujuan, (keamanan Markas Komando Polda Metro Jaya);
- 2) Menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi saat ini. Untuk menganalisis situasi perusahaan dengan metode analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Penganalisaan SWOT berupa :

- (a) *Strengths*, Kekuatan tenaga sekuriti (yang ideal untuk 1 ha diawasi oleh 10 petugas Satpam), materil (perlengkapan alat komunikasi, borgol, tongkat polisi disesuaikan dengan jumlah Satpam yang ada, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang dipergunakan untuk patroli), keuangan (dukungan logistik penunjang);
- (b) *Weakness*, Kelemahan personil, materil dan logistik yang menghambat,

¹⁴ Djunaedi Maskat, 1996, "*Vademikum Tingkat I Polri*", Sukabumi : Secapa Polri, hal. 15.

¹⁵ Hadiman, 2005, "*Manajemen Sekuriti*", Jakarta : Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.

- (c) *Opportunities*, peluang terkait apa yang mungkin terjadi,
 - (d) *Threats*, ancaman berupa kejahatan yang mungkin terjadi
- 3) Alternatif-alternatif; pemilihan alternatif berupa pengambilan keputusan dan penyusunan rencana.

Perencanaan kegiatan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya. Demikian halnya dalam pelaksanaan perencanaan pada pengamanan Markas Komando Polda Metro Jaya, yang secara detail dan spesifik diuraikan segala macam bentuk perencanaan tugas pengamanan. Sehingga dalam pelaksanaannya bagi petugas keamanan di lapangan tidak mengalami kesulitan penanganan atau tindakan di lapangan dikarenakan dengan adanya suatu perencanaan.

Pendekatan analisis SWOT dalam penulisan tesis ini digunakan sebagai analisis evaluasi proses perencanaan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya yang sudah dilaksanakan selama ini. Metode pembahasannya dengan cara membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ideal, sehingga akan menemukan perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Hal ini untuk mempermudah mencari faktor-faktor kelemahan petugas Satpam yang dilengkapi dengan teknologi pengamanannya dalam melaksanakan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya.

2.1.1.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan tahap kedua dalam manajemen, yaitu fungsi dari para manajer yang bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi.

Menurut Hadiman (2007), bahwa dalam melaksanakan tugas sekuriti, baik perusahaan ataupun masyarakat, tentunya perlu diorganisir sesuai prinsip-prinsip manajemen. Pengorganisasian tugas-tugas sekuriti ini tercakup dalam manajemen sekuriti. Organisasi yang baik haruslah memiliki enam prinsip utama, yaitu:

- a. Pembagian pekerjaan yang jelas menurut tujuan, proses, waktu ataupun lokasi.

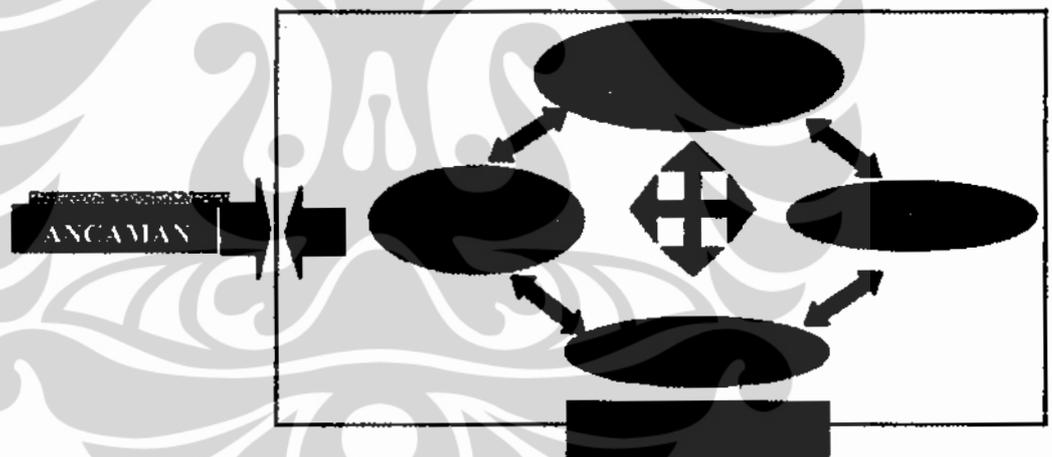
- b. Hubungan otoritas yang jelas.
- c. Ruang lingkup yang jelas.
- d. Kesetaraan komando.
- e. Pendelegasian tanggung jawab dan otoritas yang jelas.
- f. Kerjasama melalui pelatihan dan komunikasi.

Menurut Theodore Levitt dalam Hadiman (2006), bahwa sesuai dengan prinsip manajemen apabila dalam suatu organisasi akan menentukan struktur organisasi, personil dan lain-lainnya harus berpedoman pada tugas pokok, struktur organisasi, personil, sarana atau teknologi, lingkungan dan ancaman¹⁶.

Dalam bentuk bagan, prinsip manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1

Prinsip-Prinsip Manajemen.



Tugas pokok akan menentukan personil baik kuantitas maupun kualitas, kemudian tugas pokok menentukan struktur organisasi dan tugas pokok menentukan juga sarana atau teknologi yang semua itu dipengaruhi oleh lingkungan untuk menghadapi ancaman.

¹⁶ Ibid.

Idealnya menurut Theodore Levitt bahwa di dalam melaksanakan tugas pokok untuk menghadapi ancaman yang diperlukan adalah :

- a) Personil yang bagus dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - 1) Kualitas lebih menekankan pada program pelatihan Satpam yaitu merupakan program untuk melatih ketrampilan yang dibutuhkan oleh Satpam. Semakin banyak latihan yang dilakukan oleh Satpam maka Satpam semakin menguasai tugasnya.
 - 2) Kuantitas, menekankan pada jumlah personil Satpam yang diperlukan yaitu jumlah Satpam dibandingkan dengan luas wilayah atau area yang akan diamankan. Idealnya untuk 10 petugas Satpam mengamankan wilayah atau area seluas 1 ha.
- b) Petugas Satpam yang melaksanakan pengamanan harus mengenali wilayah tugasnya, sehingga mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.
- c) Idealnya juga untuk perumahan karyawan harus dijaga oleh petugas Satpam.
- d) Metode pengamanan yang digunakan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu teknologi atau peralatan pengamanan yang digunakan harus tepat guna agar dapat membantu pelaksanaan tugas Satpam.
- e) Strategi yaitu cara yang digunakan untuk menghadapi ancaman yang dihadapi. Strategi terkait dengan kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan dihadapi dan perencanaan yang matang untuk menghadapi ancaman tersebut. Didalamnya terdapat kemampuan teknis yang berisi kemampuan untuk dapat mengenal, mengerti, memahami dan melaksanakan tugas serta kemampuan taktis berupa pengenalan apa yang kita miliki untuk dapat menghadapi ancaman. Idealnya pada suatu perusahaan mempunyai strategi yang dijabarkan menjadi cara bertindak

dengan mengklasifikasikan daerah pengamanan berdasarkan karakteristik pola pengawasan dan tingkat kerawanannya.¹⁷

Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa (siapa membawahi siapa), di mana keputusan harus diambil.

Maka dapat pula mengandung makna bahwa para manajer mengkoordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material yang tersedia pada organisasi di mana mereka bergerak, untuk diarahkan kearah pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan. Koordinasi yang baik dapat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. Maka pengorganisasian pada sebuah organisasi atau kelompok yang mempunyai anggota sangat penting, karena fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian dilakukan guna menyeimbangkan dan menyelaraskan anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas, agar dapat berhasil dengan baik.

Pendekatan manajemen menurut Theodore Levitt digunakan dalam menganalisa evaluasi penetapan tugas-tugas Satpam dalam pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya dengan melihat perbedaan antara kondisi yang ideal dengan kondisi saat ini, sehingga akan menemukan perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Hal ini untuk mempermudah mencari faktor-faktor kelemahan pelaksanaan tugas pokok Satpam yang dilengkapi dengan teknologi pengamanannya dalam melaksanakan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya.

2.1.1.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan di mana semua personil yang dilibatkan melaksanakan perannya masing-masing berpedoman pada rencana

¹⁷ Ibid.

yang telah dibuat, dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah diatur dalam pengorganisasian.

Dalam hal ini, pihak manajer berperan aktif mengarahkan dan mempengaruhi pihak bawahannya, agar melaksanakan segala macam bentuk tugas dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dengan baik serta efisien.

Guna pencapaian keberhasilan dalam tujuan perusahaan, maka pihak manajer perlu menciptakan (*inovations*) suasana dan lingkungan kerja yang kondusif di dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing pihak yang ada didalam suatu perusahaan dengan baik. Pelaksanaan atau aktivitas pekerjaan merupakan komponen dasar struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini sangat diperlukan analisis pekerjaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Isi pekerjaan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis inilah yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan (*job descriptions*). Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi pekerjaan.

Prinsip-prinsip utama atau yang mendasari di dalam membuat analisis pekerjaan menurut Barry adalah :

- a) Analistis, yaitu pekerjaan diurai menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantumkan aktivitas, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana saling bekerja sama, kompleksitas, tantangan serta manfaatnya bagi organisasi.
- b) Obyeknya adalah pekerjaan, yaitu pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan keahlian tertentu.

- c) Tidak dinilai, yaitu tidak dinilai, sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan haruslah dianggap sebagai masalah organisasi, bukan masalah analisis kerja.
- d) Pekerjaan saat ini, yaitu hanya menganalisis isi pekerjaan saat ini dan tidak mempertimbangkan baik perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di kemudian hari atau yang terjadi di masa lalu.

Sehingga pengisian jabatan-jabatan yang tersedia (*staffing*) mengandung arti penempatan atau alokasi kerja yang tepat dalam suatu organisasi, dengan berpedoman asas orang yang tepat pada tempat yang tepat.

2.1.1.4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan untuk mengetahui berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai, efektif atau tidak, efisien atau tidak. Dengan adanya pengawasan sejak kegiatan perencanaan maka penyimpangan sejak dini dapat diketahui dan dapat difuruskan kembali.

Pengawasan merupakan salah satu langkah dalam proses manajemen, dan sekaligus sebagai salah satu fungsi organis manajemen paling penting sekaligus paling sulit. Dikatakan paling penting karena langsung menyangkut unsur manusia dalam organisasi dengan aneka ragam karakteristik biografikal, persepsi, kepribadian, filsafat hidup, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, kemampuan, temperamen, dan latar belakang pengalaman seseorang. Faktor-faktor tersebut membuat langkah dan fungsi penggerakan menjadi sangat sulit karena sifatnya yang sangat khas berdasarkan kenyataan bahwa setiap orang merupakan individu dengan jati diri yang bersifat khas pula dalam pengawasan.¹⁶

¹⁶ Terry, (1996:410), mengemukakan bahwa: "mengawasi berarti mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana, diantara jenis-jenis pengawasan dalam melibat apa, yang dilakukan petugas keamanan, saya mengambil suatu bentuk pengawasan umum yang terdiri dari: pengawasan persediaan (*inventory control*), pengawasan produksi (*production control*), pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*), pengawasan kualitas (*quality control*), pengawasan gaji (*salary control*), pengawasan penjualan (*sales control*) pengawasan biaya (*cost control*)."

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang erat dan kedua fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa tujuan dan rencana-rencana, pengendalian adalah tidak mungkin dilaksanakan, karena harus membandingkan antara rencana-rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya.¹⁹

Dari penjelasan di atas, maka konsep manajemen merupakan sebuah proses yang memiliki kekhususan, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa, konsep manajemen menerapkan suatu prinsip dasar yang selalu menjadi pedoman di dalam melakukan setiap pentahapan dalam proses manajemen. Hal ini untuk memudahkan melakukan analisa terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya melalui pendekatan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian petugas Satpam di dalam proses untuk mencapai suatu tujuan dengan cara menggerakkan orang lain. Sehingga apa yang menjadi sasaran atau pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan (*company goals*) dapat terpenuhi dengan baik.

Sistematika dari pandangan para ahli di atas jelas menunjukkan manusia merupakan unsur manajemen yang pokok. Manusia tidak dapat disamakan dengan benda, ia mempunyai peranan, pikiran, harapan serta gagasan. Reaksi psikisnya terhadap keadaan sekeliling dapat menimbulkan pengaruh yang lebih jauh dan

¹⁹ Agus Sabardi, 1997, "Pengantar Manajemen," Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal 208.

mendalam dan sukar untuk diperhitungkan secara seksama. Oleh karena itu, manusia senantiasa perlu diperhatikan untuk dikembangkan ke arah yang positif yang sesuai dengan martabat dan kepribadian sebagai manusia.

2.1.2. Teori *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengamanan di suatu areal proyek usaha membutuhkan perencanaan dengan melibatkan desain lingkungan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Mc. Crie (2001) mengutip pendapat Ray C. Jeffrey (1971) yang mengatakan bahwa *crime prevention through environmental design (CPTED)* adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan desain lingkungan dalam manajemen pengamanan, sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Frekuensi kejadian terutama kejahatan diharapkan menurun karena faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard (PH)* yang berpotensi, dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.

Penyelenggaraan pengamanan harus direncanakan berdasarkan penelitian yang komprehensif dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. CPTED memiliki empat prinsip dasar dalam perencanaan keamanan, yaitu :

- 1) Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan, sehingga kejadian sekecil apapun dapat dikenali atau mudah dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Di antara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali.
- 2) Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak

terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan *CCTV* dan sistem alarm.

- 3) *Citra/image*, reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungan yang tertata dengan baik, terawat dan teratur serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan.
- 4) Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman yang merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar/masuk terbuka dan siap digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedianya area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan (Mc. Cric, 2001;301).

Keterkaitan Teori CPTED ini dengan keberadaan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya adalah tentunya secara tidak langsung Polda Metro Jaya telah menerapkan upaya pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan yang sudah ada. Dengan harapan apabila di antara desain lingkungan yang sudah ada akan tetapi masih sangat sederhana, dapat dibenahi lagi dan bila belum terpasang dapat dijadikan sebagai bahan masukan demi terciptanya keamanan di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya.

2.1.3. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional

Teori strategi pencegahan kejahatan menurut Bibit S. Rianto (2006: 10-11) adalah “upaya mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat yang dilaksanakan secara bersama-sama antara petugas penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman”. Ketaatan dan ketertiban suatu masyarakat tidak terwujud dengan sendirinya, akan tetapi diperlukan suatu dorongan untuk merubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya ketaatan dan ketertiban yang merupakan kebutuhan pokok sosial dalam masyarakat dan sekaligus merupakan tanggung jawab semua unsur atau elemen masyarakat.

Teori strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan bagian dari teori strategi pencegahan kejahatan. Teori strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan pada suatu lokasi.

Strategi pencegahan kejahatan menurut Kaiser (John Graham; 1990) adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik itu melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum (Dermawan, 1994 : 12).

Dermawan (1994) mengutip pendapat beberapa ahli mengatakan terdapat tiga bentuk strategi pencegahan kejahatan, yaitu :

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut *social crime prevention* yang mempunyai arti segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran menjadi sasarannya.
- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut dengan *situasional crime prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut dengan *community based crime prevention* yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi aksi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Penulis menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional. Weisburd (1996 : 3) mengatakan bahwa :

“Ruang lingkup strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan

tetapi juga kepada lingkungan sosial fisik dan organisasional dan mengubah cara pandang strategi pencegahan kejahatan yang pada umumnya memfokuskan diri pada pelaku kejahatan saja”.

Menurut Hadiman (2007), bahwa pencegahan kejahatan melalui pendekatan *Situational Crime Prevention* adalah mengubah situasi dan kondisi yang awalnya menguntungkan bagi pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan.²⁰

Salah satu cara untuk membatasi secara fisik dilakukannya kejahatan adalah dengan memperkokoh sasaran kejahatan. Usaha ini adalah salah satu model pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional. Model pencegahan yang demikian sering pula disebut sebagai perencanaan fisik (*physical planning*). Model ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Dengan diperbaikinya desain lingkungan fisik akan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan.

Desain lingkungan (*environmental design*) atau perencanaan fisik (*physical planning*) adalah pendekatan lain untuk mencegah kejahatan. Obyeknya adalah menyediakan keamanan dalam lingkungan pemukiman dan perdagangan dengan membatasi kesempatan terjadinya kejahatan melalui halangan-halangan fisik. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan ini mencakup pertimbangan tentang penempatan bangunan, kualitas material yang digunakan dalam bangunan-bangunan (misalnya keadaan pintu, jendela, sistem kunci dan kayu, tembok yang digunakan), desain arsitektur, peranan pepohonan, penerangan serta pagar dalam mencegah kejahatan.

Hasil riset yang dilakukan oleh *the Home Office Unit*, yaitu departemen riset kriminologi milik pemerintahan Inggris pada tahun 1960-an yang mengembangkan teori strategi pencegahan kejahatan, menunjukkan bahwa : “Perilaku kejahatan sangat bergantung pada adanya perbedaan dalam kesempatan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan pada pemilihan

²⁰ *ibid.*

target, aspek penghindaran resiko dan upaya yang dilakukan memainkan peranan penting” (Clarke, 1997 : 6). Hasil riset ini memberikan dasar bagi dilakukannya pencegahan kejahatan situasional.

Ronald V. Clarke adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori pencegahan kejahatan dengan tulisannya yang berjudul *Designing Out Crime* (1980). Clarke mengatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional adalah :

“.....defined as comparing, opportunity-reducing measure that are :

- 1) *Directed at highly spesific forms of crime,*
- 2) *Involve the management, design or manipulation of the immediate envrionment in as sytematic and permanent way as a possible.*
- 3) *Make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender”(hal. 4).*

(“...yang didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik adalah:

- 1) Ditujukan pada jenis kejahatan yang spesifik.
- 2) Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan permanen.
- 3) Membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai pelaku..”)

Pendapat Clarke tentang Teori *situational crime prevention* merupakan strategi pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk satu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan pelaku kejahatan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan pada tahun 2003, Clarke (2003) membagi 25 teknik pencegahan kejahatan yang meliputi :

- 1) Mempersulit upaya (*increase the effort*), langkah-langkahnya meliputi :

- a. Memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok.
 - b. Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*).
 - c. Mengawasi pintu keluar (*screen exits*).
 - d. Menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*).
 - e. Mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
- 2) Meningkatkan resiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- a. Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
 - b. Membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*).
 - c. Mengurangi anonimitas (*reduce anonimity*).
 - d. Memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*).
 - e. Memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*).
- 3) Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- a. Menyembunyikan target (*conceal targets*).
 - b. Memindahkan target (*remove target*).
 - c. Memberikan identitas pada benda (*identify property*).
 - d. Mengganggu pasar (*disrupt markets*).
 - e. Mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*).
- 4) Mengurangi provokasi (*reduce provocation*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- a. Mengurangi frustrasi dan stres (*reduce frustations and stress*).
 - b. Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*).
 - c. Mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*).
 - d. Menetralsir tekanan rekan (*neutralize peer pressure*).
 - e. Mencegah imitasi (*discourage imitation*).
- 5) Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi :
- a. Membuat aturan (*set rullles*).

- b. Menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*).
- c. Meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*).
- d. Meningkatkan kesadaran orang untuk patuh (*assist compliance*).
- e. Mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*).

Teori Clarke ini didasarkan pada pelaku kejahatan, sehingga sebagian besar teknik pencegahannya ditujukan untuk mencegah individu untuk berbuat jahat. Adapun yang menjadi keterkaitan keberadaan Markas Komando Polda Metro Jaya dengan teori strategi pencegahan kejahatan ini adalah agar dapat diterapkan guna menangkal perbuatan jahat seseorang yang berusaha mengambil aset-aset kantor secara tidak sah. Pada kenyataannya, Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan kejahatan dengan sendirinya, seperti contoh pembuatan pagar, akses kontrol, penyediaan tenaga sekuriti, pembuatan pos-pos jaga dan lain sebagainya. Hal ini merupakan upaya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Pada umumnya pencegahan kejahatan melalui dua ancaman yaitu :

- 1) Ancangan sosial, bahwa kejahatan adalah produk sosial, budaya dan ekonomi, pelakunya seolah-olah kaum miskin, golongan lemah, Tuna Wisma, pengangguran, kelompok terpinggirkan dan lain-lain.
- 2) Ancangan situasional, bahwa kejahatan bersifat oportunistik, tidak kompleks karena itu dapat dicegah melalui modifikasi atas lingkungan. (Hadiman, 2007)

Berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan menghindari terjadinya kerugian, Mc. Crie (2001, 301) menganjurkan *Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED)*. CPTED adalah perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan untuk meminimalkan kejadian kejahatan. Disain lingkungan ini bukan dengan konstruksi banteng yang kokoh, penjara, dan lain-lain yang dikelilingi penghalang yang tinggi akan tetapi transparan, relevan, terintegrasi dengan tujuan yang diinginkan,

terhindar dari pengaruh visual yang negatif, ramah lingkungan dan hemat biaya.

Pencegahan kejahatan dengan model disain lingkungan bertujuan untuk mengurangi kesempatan-kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, mengurangi rasa takut terhadap tindak kejahatan, memperbaiki hubungan ketetanggan yang baik, membantu mempermudah investigasi proses peradilan pidana, proses penyelamatan kawasan proyek, secara individual maupun publik (upaya-upaya taktis), dan dilakukan pengamanan secara proaktif.

Menurut Hadiman (2007) bahwa strategi dan teknik pencegahan kejahatan dengan model disain lingkungan meliputi :

- 1) Kontrol akses, dilakukan dengan mencegah dengan menggunakan halangan baik fisik maupun non fisiologis, tembok pembatas, lampu, perbedaan jalan umum/khusus, pembuatan satu pintu masuk dan keluar, penjagaan oleh Satpam, penempatan resepsionis di depan pintu, pengamanan elektronik alarm, pemasangan kunci, dan lain-lain;
- 2) Pengawasan, disain untuk mencegah masuknya orang tak dikenal melalui *observasi* (pengamatan), patroli oleh pihak keamanan, polisi, warga setempat, karyawan setempat, bila perlu pengunjung ikut aktif, lampu, pohon yang menghalangi harus ditebang, dan lain-lain;
- 3) Teritorialitas, disain fisik yang dapat menimbulkan seteritorial pendatang baru dapat dikenal.²¹

Strategi dan teknik lain dilakukan dengan meningkatkan upaya pencegahan yang kasat mata melalui memperkokoh sasaran yang dapat menjadi target kejahatan, kontrol akses ke segala penjuru, menjauhkan pelaku dari target kejahatan, dan kontrol segala fasilitas yang dapat menjadi target kejahatan ; meningkatkan pengawasan risiko yang kasat mata melalui deteksi/penyaringan orang dan barang, pengawasan formal, pengawasan alami dan pengawasan oleh karyawan setempat ; mengurangi perolehan yang diharapkan pelaku melalui memindahkan yang dapat menjadi target kejahatan (bila mungkin), identifikasi pemilikan barang, mengurangi godaan

²¹ Hadiman, 2007, "Manajemen Sekuriti", Jakarta : Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.

kemungkinannya dilakukan kejahatan, dan mengurangi perasaan keuntungan bila dilakukan kejahatan (karena pasti akan ketahuan).

Menurut David H. Bayley dalam bukunya *Police For The Future*, yang telah disadur oleh Kunarto, menegaskan bahwa:

- 1) Polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan dari masyarakat. Di mana polisi tidak dapat memecahkan sendiri masalah kejahatan dalam masyarakat, polisi membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk memberi peringatan kemungkinan calon penjahat, memberitahu terjadinya kejahatan dan kemungkinan terjadinya kejahatan, serta memberikan informasi yang mungkin akan menangkap dan penghukuman penjahat. Pencegahan kejahatan bukanlah suatu layanan yang diberikan kepada masyarakat, tugas ini juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan masyarakat.
- 2) Polisi harus berbuat lebih banyak dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan. Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan kejahatan dapat dirumuskan ke dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu: (1) Kejadian Faktual (FK) atau yang lazim disebut Ancaman Faktual (AF) berupa kejadian atau peristiwa atau kasus yang terjadi sehari-hari baik berupa kriminal, bencana maupun kecelakaan, (2) *Police Hazards* (PH) yaitu kondisi fisik yang memerlukan kehadiran petugas atau peralatan agar keadaan tersebut tidak menimbulkan kerawan atau kejadian, (3) Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yaitu faktor-faktor yang berpengaruh bagi timbulkan sesuatu kejadian / kejahatan, yang terdapat di setiap aspek kehidupan sosial masyarakat. (Rianto, 2006)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha memperkokoh sasaran kejahatan ini adalah salah satu model pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional. Model pencegahan yang demikian sering pula disebut sebagai *physical planning*. Model ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Dengan memperbaiki desain lingkungan fisik akan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan.

Strategi desain lingkungan dapat melalui pendekatan CPTED dalam perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan untuk meminimalkan kejadian kejahatan.

2.2. Kerangka Konsep

2.2.1. Konsep Sekuriti

Menurut MC. Crie (2001) sekuriti didefinisikan sebagai berikut : *"security is defined as the protection of asets from loss"*, yang berarti bahwa sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset supaya terhindari kerugian/kehilangan. Dengan terlindungnya aset-aset dari kerugian atau kehilangan, maka akan terwujud rasa aman di lingkungan perusahaan dan masyarakat, sehingga proses produksi perusahaan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan normal, serta berlangsung secara optimal.

Lebih lanjut MC. Crie mengatakan bahwa proses manajemen sekuriti yang modern dilakukan dengan tahapan yang meliputi identifikasi terhadap masalah, analisis dan perencanaan, pengorganisasian, pendepuitian, pengawasan dan analitis kritis. Proses-proses ini diperlukan untuk mencapai tujuan pengamanan fisik yang dilakukan.

Sedangkan menurut Sheryl Strauss dalam Hadiman (2008) mengatakan bahwa sekuriti adalah : *"in its broadest sense, securilty is the prevention of loses of all kinds, from what ever cause"*. Sekuriti dalam pengertian luas adalah pencegahan terhadap segala bentuk kerugian dari segala bentuk penyebab. Kerugian yang dimaksud termasuk dalam kerugian secara fisik maupun non fisik, yang berwujud ataupun tidak berwujud. Gangguan secara fisik lebih mudah diketahui dan besar kerugian lebih mudah dihitung kerugiannya, sedangkan kerugian non fisik lebih sulit untuk dihitung, misalnya menyangkut masalah perasaan, kesempatan, kenyamanan, kebebasan atau kemerdekaan seseorang dan kehormatan atau nama baik.

Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, perlu melakukan manajemen sekuriti dalam melindungi aset perusahaan, sehingga terhindar

dari kerugian. Dalam melaksanakan manajemen sekuriti, perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan pemerintah daerah setempat dan aparat kepolisian yang ada di wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan manajemen sekuriti perusahaan adalah melakukan analisa terhadap ancaman, kejahatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapinya ancaman dan kejahatan tersebut.

1) Ancaman ;

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, menyebutkan sesuatu yang bila dibiarkan dapat meniadakan keberadaan kita, sedangkan tantangan adalah sesuatu yang memerlukan ekstra kehati-hatian dan waspada, sebab bila tidak keberadaan kita mungkin dapat hilang. Hambatan adalah sesuatu yang menghambat proses tercapainya tujuan, serta gangguan adalah hambatan yang datang dari luar negeri. Dalam KUHP, pengertian gangguan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah pengurangan sesuatu dari *status quo*.

a) Menurut Hadiman (2008), ancaman terhadap dunia usaha di Indonesia secara umum muncul terutama menyangkut masalah-masalah sosial, karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih dilanda oleh berbagai krisis seperti krisis kepercayaan, moral dan ekonomi. Kondisi tersebut sangat memungkinkan timbulnya berbagai macam kerusuhan dan penjarahan yang mengganggu kawasan proyek-proyek pembangunan maupun pusat-pusat perbelanjaan. Kondisi ini diperparah lagi oleh semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia, mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok dan tinggi angka pengangguran. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa situasi dan kondisi yang ada dan terjadi di masyarakat

sekitar kita, dapat menimbulkan berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu jalannya perekonomian dan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

2) Kejahatan ;

Kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan melanggar ketentuan atau peraturan yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan atau terhentinya usaha suatu perusahaan, sehingga perlu diketahui jenis-jenis kejahatan serta penggolongannya.

Menurut Hadiman (2008), bahwa penggolongan kejahatan dapat dilihat dari proses yang digunakan, antara lain :

- a) Golongan kejahatan dengan menggunakan kekuatan fisik, seperti : pencurian, penodongan, perampokan, perampasan dan tindakan kekerasan lainnya;
- b) Golongan kejahatan dengan menggunakan proses manual atau mekanik, antara lain : pemalsuan (*counterfeit*) dan manipulasi (*forgery*).
- c) Golongan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi, antara lain melakukan kecurangan pemasukan data dan informasi (*computer input fraud*), penggunaan tombol *repeat* yang dalam kondisi tertentu dapat menggandakan hasil hitungan dan pemalsuan suku bunga.

3) Upaya Taktis ;

Dalam rangka melakukan pengamanan di perusahaan, maka perlu adanya upaya-upaya yang bersifat taktis. Pengamanan ini dilakukan guna mencegah kerugian atau kehilangan yang merupakan milik perusahaan. Hal ini meliputi, merintangl (*empede*), menyelidiki/usut (*detect*), menangkai (*deterence*), menetapkan (*asses*) dan menetrallsir (*neutraltze*).

Perusahaan dapat menekan kerugian dengan seminimal mungkin dengan memasang rintangan dengan cara : pemagaran, pemasangan rintangan dari drum, membuat gunung dan parit di sekeliling perusahaan. Sebenarnya hal-hal sekecil ini, dapat mengakibatkan kerugian yang lebih jika hal kecil ini diabaikan. Oleh karena itu, untuk setiap informasi sekecil apapun, sebaiknya segera untuk ditindaklanjuti dengan menyelidiki dan mengusutnya hingga tuntas.

Menurut Hadiman (2008) bahwa upaya-upaya taktis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga aset-asetnya agar tidak terjadi kerugian. Upaya-upaya taktis tersebut, antara lain :

- a) Pengamanan perimeter.
- b) Proses penerimaan sumber daya manusia.
- c) Upaya penyelamatan masa depan usaha.
- d) Asuransi.
- e) Pengembangan kekuatan.
 - (1) Pengembangan kekuatan sendiri.
 - (2) Pengembangan kekuatan seprofesi.
 - (3) Pengembangan kekuatan dengan masyarakat setempat.
 - (4) Pengembangan kekuatan gabungan dengan aparat-aparat.
- f) Pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang kita (*supranatural*).

Dalam menjalankan kegiatannya, Polda Metro Jaya perlu melakukan manajemen sekuriti untuk melindungi setiap aset yang dimiliki, sehingga terhindar dari kerugian dan kehilangan. Pelaksanaan manajemen sekuriti juga memerlukan koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan manajemen sekuriti adalah melakukan analisa terhadap ancaman, kejahatan dan upaya taktis. Hal ini tentu dapat dilakukan guna merespon kerusuhan dan penjarahan yang akan datang dengan tindakan-tindakan yang tepat serta alternatif tindakan guna menyelamatkan usaha di masa yang akan datang.

Dalam Pasal 3 (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus.
- b. Penyidik pegawai negeri sipil.
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Keberhasilan Tugas Pokok Polri itu, tentunya memerlukan bantuan dari semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengamanan swakarsa tersebut dapat berbentuk ronda kampung, siskamling, pembentukan satuan pengamanan sampai dengan *industrial security* (Djamin, A, 1999).

Demikian juga dengan pelaksanaan sekuriti di Markas Komando Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari pengamanan swakarsa juga. Pengamanan swakarsa adalah pengamanan yang berdasarkan atas kehendak dan kesadaran sendiri dalam keikutsertaannya dalam memikul tanggung jawab mengamankan diri dan lingkungan Polda Metro Jaya. Pengamanan swakarsa merupakan penjabaran dari keamanan dan ketertiban masyarakat yang diartikan sebagai suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002 : 45).

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pembentukan Satuan Pengamanan, telah dirumuskan fungsi Satuan Pengamanan, yaitu segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan/kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukumnya (umumnya *preventif*). Surat keputusan ini juga mencantumkan mengenai peran Satuan Pengamanan, antara lain :

- a) Unsur pembantu pimpinan instansi/proyek/badan usaha tempat dia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan kerjanya.

- b) Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dan *security mindedness* di lingkungan/kawasan kerja. (Djamin, A, 2000 : 188)

Satuan pengamanan memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam menjalankan peranannya, maka fungsi dan tugas satuan pengamanan banyak bersifat administratif, sehingga lingkup fungsi dan tugas kepolisian yang diselenggarakan pengamanan swakarsa akan banyak berkisar pada fungsi dan tugas administratif.

Menurut Awaludin Djamin (2001), penggolongan bentuk pengamanan swakarsa yang berkembang dan dilembagakan saat ini di Indonesia, digolongkan ke dalam dua kelompok atau kategori, yaitu :

- a) Pengelompokan yang bersifat tradisional, yakni penyelenggaraan cara-cara pemolisian dalam bentuk pengamanan.
- b) Pengelompokan yang bersifat modern, yakni cara-cara pemolisian dalam lingkungan atau daerah-daerah perkotaan, baik lingkungan hunian menengah, daerah perdagangan, hiburan/komersial maupun di lokasi industri-industri perdagangan yang berkembang sangat pesat dan dikenal dengan istilah *Industrial Security*.

2.2.2. Konsep Fisik

Pengertian istilah fisik (Hadiman, 2008) adalah berarti wujudnya berupa fisik bangunan itu sendiri. Sekuriti fisik merupakan upaya melindungi manusia dan pengamanan aset-aset perusahaan yang meliputi : fasilitas, sarana, prasarana, lingkungan perusahaan beserta isinya, seperti mesin-mesin, gudang, ruang produksi, laboratorium, tempat parkir, kendaraan dan tempat kerja. Setiap kegiatan manajemen perusahaan di manapun berada dan dalam waktu kapan saja, akan selalu menghadapi segala kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian yang timbul dapat secara langsung atau tidak langsung dirasakan, dapat terjadi setelah sekian bulan, bahkan kemungkinan baru terjadi beberap tahun kemudian.

Adapun defenisi manajemen sekuriti fisik lain adalah pendapat Fay yang mengatakan bahwa :

"Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and document, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measure relating to the effective and economic use of a facility's full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planner include designed, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets and intellectual property" (MC. Crie, 2001 : 307-308).

Penulis menerjemahkan pengertian kalimat di atas bahwa sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang didesain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Pengawasan dari perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, *Closed Circuit Television (CCTV)*, pengawasan yang elektronik, akses kontrol dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik dan intelektual properti".

Dalam hal ini, Fay memberikan fokus sekuriti fisik kepada desain, pemilihan, pembelian, instalasi dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik, akses kontrol dan sistem elektronik yang terintegrasi.

Manajemen sekuriti fisik merupakan upaya pencegahan secara efektif (*sangkal*) dan efisien (*mangkal*) melindungi manusia dan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari sebab apapun yang mengakibatkan kerugian atau kehilangan. Dengan terlindungnya aset-aset kerugian atau kehilangan, maka terwujud rasa aman di lingkungan perusahaan dan

masyarakat sekitar, sehingga proses produksi perusahaan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan normal dan optimal.

Jadi, keterkaitan antara manajemen sekuriti fisik dengan keberadaan Markas Komando Polda Metro Jaya adalah Polda Metro Jaya telah menerapkan langkah-langkah sekuriti fisik di lingkungan Polda Metro Jaya dengan didukung oleh proses manajemen. Pembuatan pagar, penyediaan tenaga sekuriti, pembuatan pos-pos jaga, penggunaan alat komunikasi guna menunjang tugas tenaga sekuriti dan langkah-langkah sekuriti fisik lainnya merupakan wujud upaya sekuriti fisik yang telah diaplikasikan Markas Komando Polda Metro Jaya.

2.2.3. Konsep Sekuriti Fisik

Keamanan adalah kebutuhan hakiki masyarakat, untuk mewujudkan situasi dan keamanan yang kondusif bagi terwujudnya produktifitas suatu kegiatan untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa keamanan, kesejahteraan sukar terwujud. Keamanan dan kesejahteraan ibarat dua sisi yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

Faktor keamanan adalah merupakan aspek yang signifikan bagi keberlangsungan suatu perusahaan dan menjadi tanggung jawab pihak Polda Metro Jaya untuk memeliharanya dalam mengatasi masalah gangguan keamanan atau yang lebih dikenal dengan istilah Satpam.

Sekuriti menurut Richard S. Post dalam Awaloedin Djamin (2000) yang menjelaskan mengenai aspek-aspek yang mendasar dalam golongan pengamanan yang sesuai dengan obyek ataupun sasarannya digolongkan menjadi 3 aspek pengamanan, yaitu :

- a. *Physical security*, adalah pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi (perusahaan) serta seluruh isinya, seperti mesin-mesin, laboratorium, gudang, tempat parkir dan bongkar muat barang, kendaraan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya peralatan *security* yang sesuai dan jumlah Satpam yang tepat.
- b. *Personnel security*, adalah menyangkut pengaturan pegawai dan tamu untuk berbagai urusan. Pengawasan keluar masuk orang-orang kedalam wilayah perusahaan terutama ruangan-ruangan tertentu, *executive*

protection, dan penelitian latar belakang pegawai, juga termasuk dalam *personnel security* ini.

- c. *Information security*, adalah menyangkut komunikasi dalam perusahaan dan dengan luar perusahaan, baik lisan maupun tulisan. Bidang ini luas sekali, seperti *blue print* hasil penelitian, *record* kepegawaian dan keuangan, kontrak-kontrak, hasil penelitian laboratorium dan sebagainya.²²

Ketiga macam sekuriti atau pengamanan tersebut di atas saling terkait dan dilaksanakan dengan satuan pengamanan, alat-alat pengamanan, serta prosedur dan kontrol dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Sheryl Strauss dalam Hadiman (2007), bahwa sekuriti dalam pengertian yang lebih luas adalah pencegahan terhadap segala bentuk kerugian dari sebab apapun. Termasuk di dalamnya kerugian secara fisik dan non fisik, berwujud atau tidak berwujud. Gangguan secara fisik lebih mudah diketahui dan besar kerugian lebih mudah dihitung kerugian yang bersifat non fisik lebih sulit dihitung, misalnya menyangkut perasaan, kesempatan, kenyamanan, kebebasan atau kemerdekaan seseorang, dan kehormatan atau nama baik.²³

Salah satu cara untuk membatasi secara fisik dilakukannya kejahatan, yaitu dengan cara memperkokoh sasaran kejahatan. Pengamanan fisik obyeknya adalah menyediakan keamanan dalam lingkungan perusahaan dengan membatasi kesempatan terjadinya kejahatan melalui halangan-halangan fisik.

Dalam hal pengamanan fisik menurut Hadiman (2007), maka bentuk dari penghalang-penghalang atau perintang-perintang fisik yaitu :

- a. Penghalang-penghalang yang bersifat alami (*natural barriers*), seperti keberadaan sungai-sungai, bukit-bukit atau perbukitan atau berbagai

²² Awaloedin Djamin dalam buku "*SispaMSwakarsa dan Industrial Sekuriti*", 2000. Mengemukakan pendapat Richard S. Post mengenai aspek-aspek yang mendasar dalam golongan pengamanan yang sesuai dengan obyek ataupun sasarannya.

²³ Hadiman, 2007, "*Manajemen Sekuriti*", Jakarta : Bahan Kullah Program Pasca Sarjana KIK-UI.

medan alami (*terrains*) yang dapat memberi kesan sulit untuk dilewati atau diterobos.

b. Penghalang-penghalang bantuan yang tetap (permanent) atau semi permanent yang sengaja dirancang dan dibangun untuk tujuan-tujuan menangkal secara psikologis. Sistem penghalang semacam ini biasanya dikelompokkan kedalam 4 kelompok sistem penghalang yaitu:

- 1) Sistem pemagararan yang kuat dan saling berhubungan satu sama lain sehingga berkesan kokoh dan sulit diterobos (*chain-link fences*).
- 2) Tembok-tebok penghalang di bagian luar gedung dan area usaha.
- 3) Tembok-tebok penghalang di bagian dalam area usaha.
- 4) Pembuatan ruangan-ruangan tertentu yang sengaja dirancang untuk tujuan-tujuan penyelamatan seperti ruangan-ruangan di bawah tanah dan sebagainya.

c. Penghalang-penghalang fisik yang dirancang dan dibangun dengan memanfaatkan energi alam, sinar ataupun listrik serta teknologi lainnya, misalnya:

- 1) Pemasangan sistem penghalang atau penghambat yang memanfaatkan energi sinar, yaitu dengan memanfaatkan sistem penyinaran yang tepat untuk tujuan melindungi kawasan/area usaha (*protective lighting*).
- 2) Pemasangan sistem penghalang atau penghambat yang memanfaatkan energi listrik untuk tujuan perlindungan dengan peringatan dini (*protective alarm*).
- 3) Pemasangan CCTV, yang memanfaatkan *audio and visual surveillance*.²⁴

Dalam menganalisis keamanan yang ada disuatu organisasi maka berdasarkan *orange book*, ada beberapa level mulai dari level 1 yang dikenal sebagai level tertinggi (*verified protection*) hingga level 5 (*minimum security*).

²⁴ Hadiman, 2007, "*Manajemen Sekuriti*", Jakarta : Bahan Kullah Program Pasca Sarjana KIK-UI.

Menurut Richard J. Gigliotti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2007), yang mengelompokkan sekuriti menurut tingkatan penyelenggaraan sekuriti, dijelaskan bahwa :

“Sekuriti dapat dibagi menjadi 5 level upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti yaitu *minimum security*, *low level security*, *medium security*, *high level security* dan *maximum security*.”

Untuk mengetahui level sekuriti menurut tingkatan penyelenggaraan dapat dilakukan dengan justifikasi.

Justifikasi :

- **Level 1 : *Minimum Level Security*** ; Sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintang dan mendeteksi aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokok berupa penghalang sederhana (*simple physical barrier*) dan kunci sederhana (*simple lock*)
- **Level 2 : *High Level Security*** ; Mensyaratkan adanya peralatan pokok antara lain penghalang standar, kunci sederhana, sistem alarm standar, lampu pengaman sederhana, penghalang fisik pengaman sederhana, pengaman kunci modern, sistem alarm yang dikendalikan oleh *remote*, perimeter penghalang fisik keamanan tingkat tinggi dengan anjing penjaga dan tenaga sekuriti dengan peralatan komunikasi sederhana serta *CCTV*, perimeter alarm sistem, penjagaan alarm yang tinggi dan terlatih dengan komunikasi tinggi, akses kontrol, pengaman lampu tingkat tinggi, koordinasi dengan penegak hukum (Polisi) daerah setempat dan denah formal keadaan darurat.
- **Level 3 : *Medium Level Security*** ; Mensyaratkan adanya sistem alarm yang canggih, pengaman penghalang yang modern dengan anjing penjaga serta tenaga sekuriti dengan alat komunikasi sederhana.
- **Level 4 : *Low Level security*** ; Mensyaratkan adanya sistem alarm standar, pengaman lampu sederhana, penghalang fisik standar dan penguncian yang modern.

- **Level 5 : *Maximum Level Security*** ; Mensyaratkan adanya sistem alarm yang canggih (*sophisticated alarm system*) dan persenjataan yang lengkap (*on site armed response force*).”²⁵

Pengertian konsep pengamanan fisik dalam penelitian ini adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun dengan menggunakan ukuran fisik yang di desain untuk menjaga dan melindungi keselamatan fisik dan jiwa, peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen kehilangan, kerusakan dan kerugian. Perhatian utamanya adalah penggunaan akses kontrol, parameter, penghalang, pagar, kunci, penerangan, alat komunikasi, CCTV, dan tenaga sekuriti, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kontrol Akses (*Acces Control*)

Menurut Mc. Crie (2001), mengatakan bahwa kontrol akses sistem mengendalikan orang-orang, kendaraan, dan bahan material yang melewati dan keluar dari satu area yang dilindungi.

Menurut Astor (1978), mengatakan bahwa kontrol akses digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau masuknya kendaraan, dan membersihkan dengan otorisasi dari manajemen bagian dalam, sebelum masuk atau keberangkatan disetujui.

Dari kedua pendapat di atas batasan bahwa akses kontrol adalah akses keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material yang dilakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual dan sistemik terhadap keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material. Sistem yang digunakan untuk otorisasi akses kontrol adalah kode akses, kartu masuk dan kartu yang berisi data fisik seseorang seperti sidik jari, selaput retina, tulisan ataupun suara yang sudah diketahui perusahaan atau instansi.

²⁵ Ibid.

b. Parimeter (*Parimeter*)

Menurut Robert J. Fitcher dan Gion Green (1998 ; 91), mengatakan bahwa parimeter dari sebuah tempat biasanya dibuat tergantung dari fungsi dan lokasi tempat itu. Dalam beberapa kasus, parimeternya adalah tembok dari bangunan tersebut. Namun dalam semua kasus berlaku bahwa pertahanan awal dimulai dari parimeter, garis pertama yang harus dihadapi pelaku tindak kejahatan.

Menurut Ricks, Tillet dan Van Meter (1994;181), mengatakan bahwa perlindungan parimeter dipertimbangkan sebagai baris pertama dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan dan baris terakhir dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan keluar dengan tidak sah. Ketika dibangun dan dioperasikan dengan baik, satu halangan parimeter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas.

1) Penghalang (*Barrier*).

Menurut Mc. Crie (2001;311) penghalang dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam/parit atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis dan penghalang jarak.

2) Pagar (*Fences*).

Pemagaran adalah sarana utama untuk kontrol akses garis batas luar (*perimeter*) fasilitas. Kategori pemagaran mencakup pagar, gerbang, pintu pagar, dan *mantrap*. Pemagaran dan penghalang lain menyediakan kontrol kerumunan dan menolong menghalangi penerobosan yang kebetulan dengan mengendalikan akses ke pintu masuk. Kelemahan dari pemagaran adalah biaya, penampilannya (yang mungkin buruk), dan ketidakmampuannya untuk menghentikan penyusup yang gigih.

Kegunaan dari pagar adalah sebagai penghalang untuk masuk. Menurut Ricks Tillet dan Van Metter (1994;181) membagi tipe pagar menjadi 3, yaitu:

(a) Pagar yang saling terhubung (*chain link fencing*).

Pagar jenis ini terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf "V" dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Pagar terbuat dari baja atau alumunium dengan ketinggian pagar paling tidak mencapai 8 kaki.

(b) Pagar kawat berduri (*barbed wire fencing*).

Pagar jenis ini tidak direkomendasikan, mengingat sangat berbahaya jika orang mengenainya. Ketinggiannya tidak kurang dari 7 kaki terbuat dari baja keras dan alumunium.

(c) Pagar berduri atau kawat konsertina (*barbed tape/concertina wire*).

Pagar berduri konsertina berbentuk gulungan kawat berduri yang digulungkan ke dalam menjadi satu, dua atau lima gulungan dengan diameter 1 kaki, dikepit bersama-sama berselang-seling dan terpakai sebagai satu halangan untuk mengamankan satu garis bulatan atau jalan kendaraan Tipe berduri adalah salah satu halangan yang paling sulit untuk ditembus, karena pagar ini sengaja dibuat sangat lentur dan memiliki duri yang besar, tajam dan sangat rumit.

Tipe berduri adalah rintangan pada pagar yang paling tidak baik dipandang dan sulit pemeliharaannya. Dengan demikian, pada umumnya tidak direkomendasikan untuk penggunaannya sebagai satu tempat yang permanen.

Tabel berikut menunjukkan kebutuhan ketinggian pagar berdasarkan tingkatannya.

Tabel : 1
Data Kebutuhan Ketinggian Pagar

1.	Ring I	3 sampai 4 kaki	Menghalangi penerobos yang kebetulan sudah melewati ring 1 & 2.
2.	Ring II	6 sampai 7 kaki	Sulit didaki dengan mudah
3.	Ring III	8 kaki dengan 3 untai kawat berduri	Menghalangi penyusup

3) Tembok (*Walls*).

Menurut Robbert J. Ficher dan Gion Green (1998 ; 195), mengatakan bahwa dalam beberapa contoh batu, batu bata atau balok beton dapat digunakan untuk membuat pagar. Hal ini menguntungkan karena dapat menutupi aktivitas yang ada didalam namun dengan begitu penglihatan keluar area juga tertutupi.

Menurut Oliver dan Wilson (1999 ; 33), yang memberi batasan pagar pembatas dengan ketinggian minimum 8 kaki (2,4 m) dengan bagian atas pagar pembatas yang diletakkan dengan alat pencegah seperti paku tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang ditanam di beton kurang berguna, karena dapat dengan mudah diatasi dengan melemparkan karung di atasnya.

4) Kunci (*Locks*).

Menurut Mc. Crie (2001;313), mengatakan bahwa kunci adalah salah satu manifestasi paling awal dari sekuriti fisik. Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci memiliki banyak manfaat untuk program sekuriti mudah digunakan, sulit untuk dibuat dan kunci dapat digunakan berulang-ulang kali. Kunci mempunyai level berbeda tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi.

5) Penerangan (*Lighting*).

Menurut O'Block (1981;314), mengatakan bahwa penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan memperkuat faktor keselamatan publik. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik di suatu kota. Ada dua manfaat penerangan jika digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu :

- (a) Untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan.
- (b) Untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi.

Menurut Mc. Cric (2001 ; 315-316), mengatakan bahwa kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan, dan kecelakaan sering terjadi pada malam hari atau di area yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang yang baik dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk ilegal setelah hari gelap. Penerangan melindungi publik termasuk petugas patroli untuk dapat melihat dengan mudah lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patroli. Kekuatan penerangan diarahkan ke arah area yang luar di mana orang-orang yang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas perusahaan.

Menurut Ricks, Tillet dan Van Meter (1994 ; 97), mengatakan bahwa suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Cara paling umum untuk menyamakan tingkat keamanan di antara siang dan malam hari adalah instalasi dengan pencahayaan yang bersifat melindungi menambahkan upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktivitas penjahat potensial.

Dari uraian di atas maka dibuat batasan bahwa penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang digunakan penjaga properti untuk membantu pengamatan

visual mereka di malam hari terhadap adanya penyusup yang berniat melakukan perbuatan jahat di suatu area properti. Dengan kekuatan yang diarahkan ke arah luar area dimana dimungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk, penerangan secara psikologis dapat menghalangi aktivitas penjahat potensial untuk melakukan kejahatan.

c. Alat Komunikasi (*Communications*).

Menurut pendapat Mc. Crie (2001;326), mengatakan bahwa pengoperasian sekuriti yang efektif harus mengijinkan komunikasi diantara manajer, *supervisor*, staf personil, dan orang lain. Hal ini adalah suatu kebutuhan selama operasi berjalan normal. Selama keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi lebih besar lagi. Karena satu sistem tunggal dapat mengakompromikan keadaan darurat, pemikiran perencanaan sekuriti dalam bentuk yang sangat berarti dimana personilnya dapat saling terhubung selama itu.

d. CCTV (*Closed Circuit Television*).

CCTV adalah sistem komunikasi gambar *online* yang diperuntukkan bagi suatu lingkungan pada suatu area tertentu.

Menurut Mc. Crie (2001;317), mengatakan bahwa televisi yang tidak menampilkan siaran televisi melainkan menampilkan sinyal melalui rangkaian tertutup melalui kabel listrik atau kabel *fiber optik* dinamakan sistem *closed circuit television* (CCTV). Sistem CCTV melibatkan tidak hanya kamera, tetapi juga monitor dan alat perekam, monitor CCTV didesain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup. Untuk alat perekam menggunakan *Video Cassette Recorders* (VCR) yang merubah sinyal dari video kamera menjadi kaset magnetik.

Saat ini banyak sekali jenis kamera CCTV dengan berbagai fungsi dan fitur. Teknologi yang mutakhir pun sudah tersedia, seperti CCTV berbasis *internet protocol* (IP). Sistem keamanan melalui kamera CCTV yang berbasis IP boleh dibilang punya beberapa kelebihan. IP sebagai protokol yang umum digunakan untuk sebuah jaringan dan internet lebih

memudahkan diakses, terutama jika ingin melakukan pengontrolan atau pemantauan dari jauh (*remote monitoring*).

Perusahaan yang digolongkan sebagai obyek vital nasional, idealnya dilengkapi dengan piranti keamanan yang dipasang mulai dari ring luar hingga ring dalam, termasuk pemasangan kamera CCTV di setiap area dan penempatan kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada titik-titik tersembunyi yang benar-benar dinilai vital. Selain itu juga, untuk pemantauan semua kamera yang terpasang itu ditangani oleh orang-orang khusus di suatu ruangan khusus pula.

Penggunaan sistem CCTV memiliki fungsi antara lain :

- 1) Sebagai keamanan (*security*), yaitu untuk pencegahan, penyelidikan, dan bukti.
- 2) Sebagai pengawasan (*Surveillance*), yaitu untuk monitoring karyawan dan peningkatan kualitas kerja sumber daya manusia agar lebih produktif.
- 3) Sebagai nilai tambah, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan rasa aman dan nyaman untuk konsumen dalam bertransaksi.

Sedangkan manfaat dengan penggunaan sistem CCTV yaitu :

- 1) Dapat memantau situasi lokasi tertentu dengan sangat mudah dan secara langsung.
- 2) Mengawasi kegiatan perusahaan dari jauh.
- 3) Meningkatkan kinerja karyawan.
- 4) Mengurangi dan mencegah kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan.
- 5) Mencegah kehilangan barang dan kerugian material.
- 6) Mengamankan aset penting yang dimiliki oleh perusahaan.

Penggunaan CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan, karena mempunyai dampak yang mendalam bagi setiap orang yang ada di dalam kawasan itu. Dilihat dari faktor psikologis keamanan dapat mempengaruhi totalitas produksi perusahaan.

Pengaruh ini lebih besar kerugiannya dibandingkan dengan kerugian karena pencurian, kebakaran, atau kecelakaan.

Dari penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak sekuriti dari CCTV untuk mempengaruhi secara psikologis bagi setiap orang, terutama bagi orang yang tidak syah atau berniat melakukan perbuatan jahat di suatu area properti.

e. Tenaga Sekuriti (*Guards*).

Menurut Gigliotti dan Jason (1984), mengatakan bahwa pentingnya sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan.

1) Penerimaan Pegawai ;

Menurut Charles A. Sennewald (1996 ; 71), mengatakan mempekerjakan pegawai sekuriti yang baru adalah salah satu hal yang sangat penting dari manajemen sekuriti. Tingkat kepedulian dan perhatian dari pelamar pekerja pegawai sekuriti harus jauh melampaui standar pelamar untuk posisi yang lain. Minimal adalah hal-hal seperti :

- (a) Pelamar harus sehat mental dan jasmani, terbebas dari segala bentuk cacat.
- (b) Pelamar harus menunjukkan tanggung jawab, kedewasaan, dan kejujuran melalui sejarah dia bekerja dan/atau sejarah pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (c) Pelamar harus tidak memiliki catatan kejahatan termasuk kejahatan moral.

Tahapan-tahapan proses penerimaan pegawai :

- (a) Aktifitas rekrutmen.
- (b) Wawancara pertama.
- (c) Wawancara kedua.
- (d) Pemilihan kandidat terbaik.
- (e) Investigasi latar belakang karyawan.
- (f) Penawaran pekerjaan.

2) Pendidikan ;

Menurut Charles A. Sennewald (1996 ; 91-93), mengatakan bahwa faktor utama jeleknya performa kerja adalah tidak adanya/kurangnya pendidikan terhadap pekerjaan yang akan diemban. Pada dasarnya ada tiga hal yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap pegawai baru mereka dan mereka harus mengerti :

- (a) Apa yang manajemen ingin pegawai baru kerjakan.
- (b) Kenapa manajemen menginginkan pegawai baru untuk melakukannya.
- (c) Bagaimana manajemen mau pegawai baru melakukannya.

Menurut peraturan KAPOLRI Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, diatur alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, metode pengajaran, mata pelajaran, dan jam pelajaran gada pertama (232 jam pelajaran), gada madya (160 jam pelajaran) dan gada utama (100 jam pelajaran).

3) Petugas Pos Jaga ;

Menurut Robert J. Fitcher dan Gion Green (1998 ; 81), bahwa petugas pos jaga harus ada di posnya untuk seluruh waktu yang ditugaskan kepadanya. Keuntungannya adalah bahaya dapat dihindari karena pos selalu ditunggu oleh petugas.

4) Petugas Patroli ;

Menurut Robert J. Fitcher dan Gion Green (1998 ; 81), petugas patroli melakukan inspeksi secara periodik terhadap beberapa tempat. Kelebihannya dibanding dengan pos jaga petugas mempunyai wilayah cakupan yang lebih luas, sehingga lebih efisien dalam hal penggunaan tenaga kerja, namun akan menjadi sebuah kekurangan apabila pola patrolinya diketahui oleh pelaku tindak kejahatan. Seorang petugas patroli biasanya dilengkapi dengan *watchman clock*. *System Watchman Clock* merupakan sistem keamanan dengan menggunakan absensi petugas keamanan dengan jangka waktu yang ditentukan pada tiap titik, sehingga mengharuskan petugas keamanan komplek selalu berjalan mengawasi area kawasan. *Watchman clock* sendiri adalah sebuah alat

yang berfungsi sebagai alat kontrol aktivitas petugas patroli. Di dalam *watchman clock* terdapat kartu kontrol yang akan mencatat jam berapa pos tertentu dikontrol atau dikunjungi petugas.

2.2.4. Manajemen Sekuriti

Berdasarkan pemikiran dari konsep-konsep yang diuraikan di atas tentang konsep manajemen dan konsep sekuriti, maka lahirlah suatu pemahaman baru tentang perlunya penyelenggaraan pengamanan yang dikelola secara baik, dengan menggunakan penerapan ilmu manajemen pada bidang keamanan. Sehingga peneliti akan berusaha menyusun berdasarkan teori manajemen dan teori sekuriti atau keamanan yang ada serta pendapat-pendapat para pakar yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah keamanan, sehingga pedoman dan kerangka berpikir agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik dengan dasar keilmuan yang dapat diuji kebenarannya dan ada relevansinya dengan pembahasan masalah dengan menggunakan suatu kerangka konseptual.²⁶

Oleh karena itu sebagai titik tolak pemikiran tidak akan terlepas dengan adanya teori atau pendapat para ahli, seperti apa yang dikemukakan oleh Koentjoroningrat bahwa :

*"Dalam suatu penelitian yang bersifat menerangkan dapat dipastikan tentu adanya teori, teori merupakan alat yang penting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanyalah ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan."*²⁷

Dengan mengacu pada pengertian di atas maka penulis berusaha mencari pendekatan teori yang berkaitan atau terkait erat dengan penelitian ini atau disebut dengan yang ada relevansinya.²⁸

²⁶ Prof Dr. Soejono Soekanto, SH, MA dalam buku, "*Sosiologi Suatu Pengantar*" memberikan pendapat tentang kerangka konseptual sebagai berikut: "Suatu kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut, gejala tersebut biasanya disebut fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut."

²⁷ Koentjaraningrat, "*Metode Penelitian Masyarakat*", Gramedia, Jakarta, 1985, halaman 32

²⁸ Menurut Caesar M. Mercado dalam bukunya "*The Conduct of Social Science Research*", antara lain dinyatakan bahwa: "Titik permulaan dalam pengembangan suatu teori adalah meninjau

Menurut Dr. Hadiman, pengertian utama atau yang mendasar dari konsep manajemen keamanan adalah,

“Langkah-langkah yang perlu diselenggarakan dalam membuat upaya keamanan dan pencegahan kerugian agar tidak terjadi gangguan yang dapat menimbulkan kerugian, dengan dasar efektif dan efisien. Secara umum manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai hasrat yang primer dalam kehidupannya, yaitu hasrat untuk mendapatkan pangan dan hasrat untuk keamanan diri atau mempertahankan diri demi kelangsungan hidupnya.” (Hadiman : 2003)

2.2.5. Konsep Satuan Pengamanan (Satpam)

Konsep Satuan Pengamanan (Satpam) menurut Skep Kapolri No. Pol.: Skep/73/IV/1981 adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan / kawasan kerjanya.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, jelaslah bahwa Satpam yang dibentuk oleh instansi baik pemerintah maupun swasta adalah sebagai keamanan yang berfungsi sebagai pelindung dan mengamankan dari setiap gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum yang bersifat fisik di lingkungan kerjanya.

Satpam merupakan bentuk pengamanan swakarsa di sektor modern, dan dikembangkan oleh Polri sejak tahun 1980 untuk mengganti nama *centeng* dan penjaga malam yang berkerja di pabrik-pabrik perusahaan. Satpam dibagi dalam:

- a. Satpam kawasan lingkungan pemukiman yaitu Satpam yang bertugas di pemukiman penduduk yang telah maju seperti real estate, perumahan / pemukiman mewah dan lain-lain.
- b. Satpam yang bertugas di kawasan/lingkungan umum misalnya pasar swalayan, *mall*, bioskop atau rumah sakit.

literatur yang relevan, yang mudah mendeteksi studi-studi yang relevan dengan problem riset kita.”

- c. Satpam kawasan lingkungan kerja misalnya kantor, perusahaan, pabrik dan lain-lain dapat bersifat swasta atau milik negara (pemerintah). Pengamanan terhadap kawasan kerja ini dilakukan oleh Satpam yang dibayar/digaji perusahaan dan dilatih sebagai penjaga keamanan. Sebagai contoh Satpam yang bertugas di bank-bank, pabrik atau perusahaan lain.

Bentuk Satpam sebagaimana tersebut di atas, maka status kepegawaian Satpam adalah sebagai pegawai negeri atau karyawan perusahaan yang bersifat tetap, karyawan kontrak atau karyawan lepas sesuai keperluan perusahaan. Pelaksanaan tugas Satpam bersifat sukarela dalam arti, atas kemauan dan kemampuan perusahaan yang memerlukan. Oleh karena itu, Satpam dalam pelaksanaan tugasnya lebih bersifat *preventif* untuk pengamanan fisik perusahaan. Tindakan *represif* dilakukan secara terbatas dan dalam hal tertangkap tangan, Satpam juga diharapkan mampu untuk melaksanakan "*security mindedness*" para karyawan perusahaan di mana ia bekerja.

2.2.6. Konsep Hubungan Industrial

Faktor sekuriti merupakan aspek yang signifikan bagi berlangsungnya suatu perusahaan dan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan dukungan semua unsur mulai dari pengusaha, pekerja/karyawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Keempat unsur ini membentuk suatu hubungan yang disebut sebagai hubungan industrial.

Hubungan Industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Di samping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa yang merupakan kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak

langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut.

Hubungan tersebut perlu dipelihara dan dikembangkan dalam rangka menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat. Tujuan pembinaan atau pengembangan hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antar pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian manajemen hubungan industrial merupakan bagian yang tak terpisahkan atau salah satu aspek pengembangan dari sumber daya manusia.

Menurut Simanjuntak (2003 : 10), hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Hubungan industrial mengandung prinsip sebagai berikut : 1) kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja dan pemerintah; 2) kemitraan serta saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja; 3) hubungan fungsional dan pembagian tugas; 4) pengusaha dan pekerja merupakan anggota perusahaan bersama-sama menciptakan ketenangan dan ketentraman bekerja; semuanya untuk 5) peningkatan produktivitas; dan selanjutnya untuk 6) peningkatan kesejahteraan bersama. Inti kepentingan bersama untuk pengusaha adalah untuk memperoleh peningkatan *profit* (keuntungan) dan untuk karyawan adalah perbaikan upah dan jaminan sosial, sedangkan bagi masyarakat dapat ikut menikmati keberhasilan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan hubungan ini adalah adanya sekuriti yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman, baik kepada perusahaan maupun terhadap karyawan perusahaan tersebut. Sekuriti yang berhasil dengan indikasi dapat meminimalkan potensi ancaman kejahatan, *police hazard* serendah mungkin, mempunyai konsekuensi menuntut penyediaan sarana dan prasarana keamanan yang memadai. Di lain pihak, personel satuan pengamanan berkepentingan mengusahakan kesejahteraan dan kenyamanan kerja yang optimal. Oleh karena itu, mereka berusaha

untuk menjadikan dirinya sebagai patner atau mitra kerja perusahaan dalam produksi, *profit*, tanggung jawab dan sekuriti.

Dalam melaksanakan kegiatan sekuriti ditetapkan panduan berisi tentang peraturan, standar dan prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan, khususnya petugas sekuriti. Suatu perusahaan sesuai dengan teori hubungan industrial harus membuat peraturan yang jelas, di mana hal ini merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Peraturan perusahaan ini merupakan sarana hubungan industrial yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di perusahaan. Peraturan dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati antara pengusaha dan karyawan guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman dan dinamis.

Dikatakan lebih lanjut oleh Simanjuntak (2003) bahwa peraturan perusahaan adalah ketentuan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, memuat tentang hak dan kewajiban pekerja, kewenangan dan kewajiban pengusaha serta syarat kerja dan ketentuan pokok mengenai tata tertib perusahaan dan peraturan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang lain pada dasarnya harus mempunyai peraturan perusahaan, namun Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 2 tahun 1978 menyatakan bahwa hanya setiap perusahaan yang mempekerjakan 25 orang atau lebih, wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan tersebut antara lain memuat mengenai :

- 1) Kriteria penerimaan pegawai.
- 2) Ketentuan perjanjian kerja.
- 3) Hari dan waktu kerja.
- 4) Waktu kerja lembur dan upah lembur.

- 5) Skala upah dan tunjangan.
- 6) Program keselamatan dan kesehatan kerja.
- 7) Perawatan kesehatan dan pengobatan.
- 8) Ketentuan dan tindakan disiplin.
- 9) Pemutusan hubungan kerja dan pesangon.
- 10) Penyelesaian perselisihan dan.
- 11) Jaminan sosial dan pensiun.

Untuk menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis serta untuk menghindari terjadinya kasus perselisihan dan gangguan produksi, perusahaan selain membuat peraturan perusahaan, juga diwajibkan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah kesepakatan atau perjanjian yang dicapai melalui perundingan antara wakil serikat pekerja dan wakil pengusaha di satu atau beberapa perusahaan mengenai hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha.

Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana pelaksanaan hubungan industrial dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, tentram dan dinamis, sehingga terwujud ketenangan kerja dan kelangsungan perusahaan. Dalam hubungan ini, Perjanjian Kerja Bersama sangat bermanfaat sebagai :

- 1) Pedoman bagi pengusaha menjalankan kewajibannya dan penegeasan atas kewenangan pimpinan perusahaan.
- 2) Pedoman bagi pekerja dalam menjalankan kewajibannya dan memperoleh hak-haknya serta mengakui dan menghormati kewenangan pengusaha.
- 3) Mempertegas pengakuan pengusaha atas kehadiran dan peranan serikat pekerja serta fasilitas yang diperoleh serikat pekerja.
- 4) Untuk mengisi kekosongan hukum mengenai syarat-syarat yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebagai acuan atau referensi utama untuk menyelesaikan keluhan kesah pekerja, perbedaan tafsir peraturan antara pengusaha dan pekerja, bahkan perselisihan antara pengusaha dan serikat pekerja dan

- 6) Untuk menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis yang didukung oleh suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam perusahaan, ketenangan kerja bagi pekerja, kepastian pengusaha bagi pengusaha, berkurangnya kasus perselisihan dan gangguan produksi. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan sarana penyelenggaraan sekuriti fisik di suatu perusahaan.

2.2.7. Konsep Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara, dsb).²⁹ Sementara itu menurut Kamus Istilah Kepolisian pembinaan adalah :

Segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan, melaksanakan atau menyelenggarakan suatu peraturan supaya dapat dilakukan atau dapat dikerjakan dengan baik, tertib, rapih dan seksama, menurut rencana program pelaksanaan secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diharapkan semaksimal mungkin.³⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamanan dalam hal pembinaan kepada karyawan dan masyarakat agar partisipasi dari karyawan dan masyarakat tersebut timbul dan dengan ikhlas turut serta dalam hal mencegah terjadinya kejahatan di wilayah mereka masing-masing agar apa yang menjadi harapan bersama yaitu terciptanya situasi keamanan dan ketertiban secara kondusif dapat segera tercapai.

²⁹ Tim Prima Pena, *Op Cit*, Hlm. 146-147.

³⁰ Mabes Polri, *Kamus Istilah Polri*, Dinas Penelitian Dan Pengembangan, Oktober 1987, Hlm. 103.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Situasi dan Kondisi Polda Metro Jaya

Bab berikut ini akan memberikan gambaran tentang daerah penelitian, Polda Metro Jaya merupakan satuan organisasi kewilayahan Polri, yang berperan sebagai pelaksana utama tugas Polri pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Mengingat Jakarta sebagai Kota Metropolitan sekaligus Ibu Kota Negara, pelaksanaan tugas Polda Metro Jaya berbeda dengan pelaksanaan tugas Polda-Polda lain di lingkungan organisasi Polri.

3.1.1. Sejarah Singkat Polda Metro Jaya

Cikal bakal Kepolisian Jakarta dibentuk oleh penjajah Belanda. Ini terjadi sejak pendudukan Belanda terhadap bangsa Indonesia, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, pembentukan Kepolisian Kota Jakarta belum sepenuhnya dapat dilaksanakan Bangsa Indonesia, sebab saat itu jawatan Kepolisian Negara masih sangat sederhana. Akibatnya, Kepolisian Kota Jakarta masih tetap melanjutkan sistem Kepolisian yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, inilah yang menyebabkan penulisan sejarah hari jadi Polda Metro Jaya diawali dari sejarah Kepolisian Batavia di tahun 1936 (sesuai Regeerings Almanak Halaman 287 Voor Nederlandsch Indie 1941 Tweede Gedeelte yang disusun Belanda selama berada di Indonesia). Istilah Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya sendiri diberlakukan sejak tahun 1979. Tepatnya, setelah adanya program pembenahan administrasi Polri oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Awaloedin Djamin. Sebelumnya disebut sebag Komando Daerah Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya.

Tahun 1980, untuk menyeragamkan Kepolisian Negara maka di daerah disebut Kepolisian Daerah. Sehingga untuk Jakarta sebutannya menjadi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Dengan

perkembangan penduduk di sekitar Kota Jakarta, yaitu Bekasi, Tangerang, dan Depok maka wilayah Kepolisiannya bergabung ke Polda Metro Jaya. Tujuannya agar masalah-masalah gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas akan lebih mudah dikendalikan oleh Polisi terdekat, dalam hal ini Polda Metro Jaya dari pada Polda Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung. Sehingga pada tahun 1980, Polres Bekasi, Tangerang dan Depok resmi menjadi bagian dari Polda Metro Jaya.

Gambar 2
Markas Komando Polda Metro Jaya



Sumber Data : Roops Polda Metro Jaya

Markas Polda Metro Jaya sejak tahun 1963 hingga saat ini berada di jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan. Dari tempat inilah, komando kepolisian dan tugas-tugas melayani masyarakat dirancang dan diperintahkan untuk dijalankan di semua kesatuan wilayah hingga ke Polsek-Polsek sebagai ujung tombaknya. Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum seluas 3.327,57 km² yang terdiri dari 661,52 km² DKI

Jakarta dan 2.666,05 km² luas wilayah luar Jakarta. Dalam wilayah hukum tersebut terdapat 103 Polsek. Nantinya, setiap Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya membawahi pos-pos polisi. Ini dilakukan dalam upaya menekan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas serta memudahkan pelayanan Polda Metro Jaya terhadap masyarakat. Data resmi menyebutkan penduduk yang dilayani mencapai 19.8670.074 juta jiwa. Jumlah ini bisa lebih tinggi, mengingat banyaknya penduduk liar yang bermukim di berbagai sudut kota Jakarta, mulai di daerah-daerah kumuh, pinggir-pinggir kali hingga ke tepi-tepi pantai Teluk Jakarta. Semua ikut menambah kepadatan Jakarta.

Sama seperti Polda lainnya, wilayah operasional Polda Metro Jaya juga mengikuti wilayah administrasi pemerintah setempat, yang berada dalam wilayah hukumnya. Perkembangan sistem administrasi daerah ikut pula mempengaruhi perkembangan Polda Metro Jaya. Ini terlihat, ketika terjadi pemekaran wilayah, Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten, Polda Metro Jaya mengantisipasinya dengan membangun Kepolisian Resort (Polres) Kepulauan Seribu. Di samping mengkoordinir Polres-polres di wilayah hukum DKI Jakarta, Polda Metro Jaya juga mengkoordinir Polres di wilayah hukum Propinsi Banten dan Jawa Barat, yakni Polres Metro Tangerang, Polres Kabupaten Tangerang, Kepolisian Bandar Udara Sukarno Hatta, Polres Metro Bekasi, Polres Kabupaten Bekasi, dan Polres Metro Depok.

Polda Metro Jaya selaku aparaturnegara yang mengemban tugas pokok fungsi keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi Kamtibmas dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum serta dapat menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Negara Republik Indonesia di Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat serta Propinsi Banten.

Kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2009 walaupun secara umum relatif cukup kondusif, namun demikian masih terjadi gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat seperti ;

premanisme baik yang berada di jalanan (*street crime*) maupun premanisme yang terorganisir, segala macam bentuk perjudian, kejahatan Narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan penyelundupan baik melalui pelabuhan udara, laut dan sepanjang pantai yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta terorisme.

Peningkatan dinamika masyarakat telah membawa eksese mudahnya pemunculan perilaku ekstrim dengan peledakan bom, tindakan anarkis penolakan bisnis ilegal, pertarungan antarpreman yang menciptakan ketidaktertiban, tindakan konflik disebabkan belum tertampungnya aspirasi kelompok atau elit pada era sekarang yang membangun idealisme yang kuat pada kepentingan rakyat dan bersih dari korupsi serta pemulangan TKI ilegal secara besar-besaran.

Menyadari akan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya personel, materiil maupun anggaran dan dihadapkan dengan tantangan tugas yang demikian luas dan kompleks perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan produktif melalui penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja T.A. 2009.

3.1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi Polda Metro Jaya

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya :

a. Kedudukan

Kepolisian Daerah Metro Jaya disingkat Polda merupakan Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Tugas

Tugas Polda Metro Jaya Tahun 2009, merupakan penjabaran dari Tugas Polri tahun 2009, sesuai Petunjuk Perencanaan Kapolri TA. 2009, meliputi :

- 1) Mengoptimalkan dukungan anggaran dengan titik berat pada operasional pelayanan Polri kepada masyarakat, biaya pemeliharaan serta dukungan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2009.

- 2) Menambah Kuota peserta Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktuk Ba) Polri khususnya bagi satuan fungsi penyidikan dan penyelidikan baik melalui pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan fungsi Reskrim dalam mencukupi kekuatan Reserse Kriminal maupun Reseserse Narkoba dalam mengungkapkan kasus-kasus mulai kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara maupun kejahatan yang berimplikasi *kontijensi*.
- 3) Membangun sarana dan prasarana penyidikan dan penyelidikan terutama peningkatan kualitas ruang tahanan di Polres dan polsek tempat-tempat penyimpanan barang bukti yang berstandarkan pada tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4) Mengembangkan sinergi dan kerja sama antar-institusi / departemen atau melalui sinergi lembaga instansi CJS (*Criminal Justice System*) dan sinergi koordinasi yang berdasarkan MOU dengan lembaga instansi pemerintah lainnya; Badan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, BPN dan BI.
- 5) Penanganan daerah konflik, dengan lebih menekankan pada upaya *Proactive Policing* dan dengan lebih mengedepankan upaya pencegahan dini sehingga dapat lebih mengurangi resiko yang dihadapi dari pada penanggulangan kejahatan pada setelah terjadinya kejahatan itu sendiri.
- 6) Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelijen keamanan Polri dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi untuk pencegahan gangguan keamanan, pengungkapan kasus, jaringan dan sindikat kejahatan.
- 7) Membangun Pusat Informasi Kriminal (PIK) sampai di tingkat Polsek di jajaran Polda Metro Jaya.
- 8) Peningkatan kesejahteraan bagi para petugas lapangan yang bergerak dalam penyelidikan dan penyidikan baik yang bertugas di ruang kantor maupun yang bertugas di lapangan, agar dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mampu memberikan profesionalitas.

c. Fungsi

Fungsi Kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi Pemerintah Negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri .

- 1) Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi :
 - (a) Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai lembaga Pemerintahan Negara.
 - (b) Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya,
 - (c) Fungsi Kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi dan menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
 - (d) Fungsi Kepolisian Administratif, yakni khusus untuk mengawasi dan menegakkan tindakan-tindakan administratif.
- 2) Fungsi Kepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi Kepolisian yang diemban oleh badan-badan secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Visi dan Misi

Agar semua personel di setiap tingkatan Polda Metro Jaya dapat menjalankan tugas dengan baik, maka telah disusun visi dan misi organisasi sebagai berikut :

Visi Polda Metro Jaya adalah: menjadi institusi Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya dengan wujud tampilan profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan dalam Misi Polda Metro Jaya sebagai berikut :

- 1) Mengelola sumber daya manusia Polri Polda Metro Jaya agar terampil, profesional, dan bermoral dengan memiliki pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan yang baik dan memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

- 2) Menggelar anggota Polda Metro Jaya guna menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan *preemptif*, *preventif* dan penegakkan hukum yang terukur, profesional, dan proporsional serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
- 3) Mengelola sumber daya materil dan fasilitas Polda Metro Jaya yang tersedia dengan tepat guna dan tepat alokasi dalam rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
- 4) Melakukan upaya mendekatkan personel Polda Metro Jaya dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka perpolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan dalam penegakkan hukum.

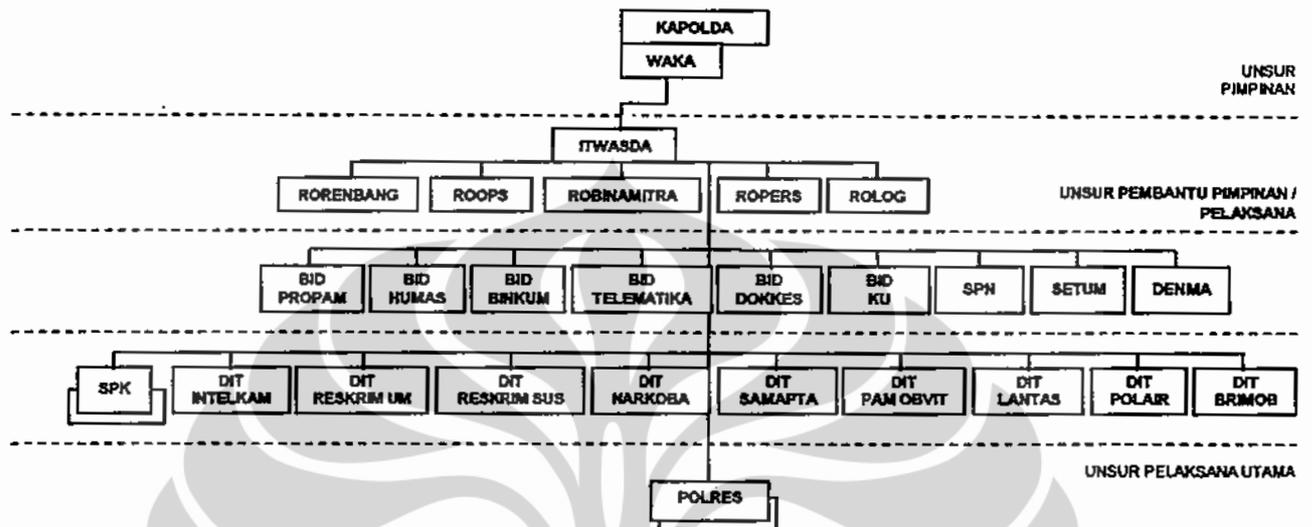
3.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Polda Metro Jaya, mengacu kepada Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya yaitu :

1. Organisasi Polda Metro Jaya disusun dalam dua tingkat :
 - a. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya ;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort.
2. Susunan organisasi Mapolda Metro Jakarta Raya terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan :
 - 1) Kepala Polda Metro Jaya ;
 - 2) Wakil Kepala Polda Metro Jaya.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan :
 - 1) Inspektorat Pengawasan Umum Daerah ;
 - 2) Biro Perencanaan Umum dan Pengembangan ;
 - 3) Biro Operasi ;

- 4) Biro Pembinaan Kemitraan ;
 - 5) Biro Personel ;
 - 6) Biro Logistik.
- c. Unsur Pelaksana Staf Khusus / Pendidikan dan Pelayanan :
- 1) Bidang Hubungan Masyarakat ;
 - 2) Bidang Pembinaan Hukum ;
 - 3) Bidang Profesi dan Pengamanan ;
 - 4) Bidang Telekomunikasi dan Informatika ;
 - 5) Bidang Kedokteran dan Kesehatan ;
 - 6) Bidang Keuangan ;
 - 7) Sekolah Polisi Negara ;
 - 8) Sekretariat Umum ;
 - 9) Detasemen Markas.
- d. Unsur Pelaksana Utama :
- 1) Sentra Pelayanan Kepolisian ;
 - 2) Direktorat Intelijen Keamanan ;
 - 3) Direktorat Reserse Kriminal Umum ;
 - 4) Direktorat Reserse Kriminal Khusus ;
 - 5) Direktorat Reserse Narkotika ;
 - 6) Direktorat Samapta.
 - 7) Direktorat Pengamanan Obyek Vital ;
 - 8) Direktorat Lalu Lintas ;
 - 9) Direktorat Kepolisian Perairan ;
 - 10) Satuan Brigade Mobil ;
 - 11) Densus 88 AT ;
 - 12) Polres-Polres (13 Polres).

Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI POLDA METRO JAYA



Sumber data: Biro Personel Polda Metro Jaya

Tabel 2
Data Jumlah Personel Kepolisian PMJ

NO	KESATUAN	PANGKAT									
		PATI				PAMEN					
		IRJEN		BRIGJEN		KOMBES		AKBP		KOMPOL	
		DSP	RIL	DSP	RIL	DSP	RIL	DSP	RIL	DSP	RIL
1	PIMPINAN / SPRIPIM	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2
2	ITWASDA					1	1	2	2	14	15
3	RO RENBANG					1	1	3	3	6	6
4	RO OPS					1	1	6	7	7	14
5	RO BINAMITRA					1	1	3	4	8	10
6	RO PERS					1	1	5	6	13	11
7	RO LOG					1	1	3	5	10	9
8	BID HUMAS					1	1	2	2	6	5
9	BID BINKUM					1	1	7	11	4	6
10	BID PROPAM					1	1	3	3	2	2
11	BID TELEMATIKA					1	1	1	2	3	2
12	BID DOKKES					1	1	2	3	0	3
13	BID KU					1	1	2	2	0	2
14	SPN LIDO					1	1	19	20	12	47
15	SETUM					0	0	1	1	0	0
16	DENMA					0	0	1	1	0	1
17	DIT INTELKAM					1	1	8	8	40	44
18	DIT RESKRIM UM					1	1	8	9	94	88
19	DIT RESKRIM SUS					1	1	7	6	79	59
20	DIT NARKOBA					1	1	5	7	53	47
21	DIT SAMAPTA					1	1	4	6	5	19
22	DIT PAM OBVIT					1	1	4	8	5	26
23	DIT LANTAS					1	1	7	8	15	35
24	DIT POLAIR					0	0	3	3	1	1
25	DEN 88 AT					1	1	1	1	4	5
26	SAT BRIMOB POLDA					1	1	6	8	10	11
	JUMLAH SATKER POLDA	1	1	1	1	22	22	114	135	392	470

Tabel 2
Data Jumlah Personel Kepolisian PMJ

NO	KESATUAN	PANGKAT								JUMLAH POLRI	
		AKP		PAMA		BA		TA		DSP	RIIL
		DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL		
1	PIMPINAN / SPRIPIM	1	1	0	0	1	7	18	0	12	25
2	ITWASDA	0	1	0	0	0	0	8	0	17	27
3	RO RENBANG	1	1	1	0	1	0	5	0	12	17
4	RO OPS	3	6	0	4	2	6	208	0	23	242
5	RO BINAMITRA	0	1	0	3	1	0	33	0	12	53
6	RO PERS		7	0	1	5	0	34	0	19	65
7	RO LOG	1	5	1	0	0	3	60	0	19	80
8	BID HUMAS	0	1	0	0	1	0	13	0	9	23
9	BID BINKUM	0	3	0	0	0	0	5	0	12	26
10	BID PROPAM	30	30	16	2	3	79	132	0	131	173
11	BID TELEMATIKA	6	5	8	2	1	8	21	0	27	34
12	BID DOKKES	0	4	0	1	0	6	24	1	9	37
13	BID KU	0	1	0	0	2	0	6	0	3	14
14	SPN LIDO	5	16	1	0	2	28	112	0	66	198
15	SETUM	2	1	0	0	0	1	2	0	4	4
16	DENMA	3	4	5	2	2	60	105	0	69	115
17	DIT INTELKAM	40	37	1	0	3	153	330	0	243	423
18	DIT RESKRIM UM	3	76	11	5	2	240	315	0	357	496
19	DIT RESKRIM SUS	0	46	7	8	4	279	145	0	373	269
20	DIT NARKOBA	0	32	8	2	4	137	154	0	204	247
21	DIT SAMAPTA	12	42	37	5	28	1,040	1,644	0	1,099	1,745
22	DIT PAM OBVIT	23	45	30	6	9	1,141	781	2	1,204	878
23	DIT LANTAS	42	123	40	97	32	1,149	4,162	5	1,254	4,463
24	DIT POLAIR	5	5	0	0	2	0	232	0	9	243
25	DEN 88 AT	13	14	23	1	2	48	56	0	90	80
26	SAT BRIMOB POLDA	37	40	46	8	21	1,902	1,902	2	2,002	1,991
	JUMLAH SATKER POLDA	227	547	235	147	128	6,287	10,507	10	7,279	11,968

Sumber Data : Biro Personel Polda Metro Jaya

Tabel 3
Data Jumlah Personel PNS Polda Metro Jaya

1.	PIMPINAN & SPRIPIM	0	7	6	1	14	12	2
2.	ITWASDA	0	7	5	0	12	15	-3
3.	RO RENBANG	0	5	3	0	8	25	-17
4.	RO OPS	0	3	6	0	9	31	-22
5.	RO BINAMITRA	0	4	5	0	9	27	-18
6.	RO PERS	3	41	29	4	77	46	31
7.	RO LOG	1	15	16	3	35	52	-17
8.	BID HUMAS	0	4	2	0	6	15	-9
9.	BID BINKUM	0	5	1	0	6	13	-7
10.	BID PROPAM	0	5	8	2	15	35	-20
11.	BID TELEMATIKA	0	9	5	0	14	41	-27
12.	BID DOKKES	2	15	34	0	51	19	32
13.	BID KU	0	5	13	0	18	23	-5
14.	SPN LIDO	0	9	47	5	61	55	6
15.	SETUM	0	6	10	0	16	19	-3
16.	DENMA	0	8	23	4	35	60	-25
17.	DIT INTELKAM	0	5	8	1	14	40	-26
18.	DIT RESKRIM UM	0	15	16	3	34	30	4
19.	DIT RESKRIM SUS	0	12	5	3	20	26	-6
20.	DIT NARKOBA	0	2	4	0	6	17	-11
21.	DIT SAMAPTA	0	8	9	2	17	21	-4
22.	DIT PAM OBVIT	0	5	5	0	10	36	-26
23.	DIT LANTAS	0	59	124	20	203	388	-185
24.	DIT POL AIR	0	3	2	0	5	21	-16
25.	DEN 88 ANTI TEROR	0	5	3	0	8	10	-2
26.	SAT BRIMOB POLDA	0	7	15	1	23	40	-17
	JUMLAH PNS MAPOLDA	6	167	404	49	726	1,117	-391

Sumber Data : Biro Personel Polda Metro Jaya

3.3. Detasemen Markas (Denma)

3.3.1. Visi, Misi, dan Tugas Denma Polda Metro Jaya

Visi dan misi detasemen Markas yaitu pencerminan wibawa dan memberi kesan bersahabat dengan lingkungan serta adanya peningkatan pengamanan Markas kesatuan. Sedangkan untuk tugasnya menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi kegiatan di dalam Mapolda, di antaranya yaitu :

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Selalu melaksanakan perubahan-perubahan untuk terus menjadi lebih baik dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial.
3. Menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan *preemptif, preventif* dan proporsional serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai norma dan nilai-nilai masyarakat yang demokratis.
5. Menegakkan hukum secara cepat, profesional, dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional Kepolisian.
7. Mengelola pelaksanaan tugas Kepolisian secara proporsional untuk mewujudkan Polri yang dapat dipercaya oleh masyarakat (*Trust Building*).
8. Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang tersistem secara utuh dan sinergi.
9. Melakukan upaya mendekatkan Polisi dengan masyarakat dalam kegiatan nyata dalam kerangka Pemolisian yang berbasis masyarakat.

Tugas Denma Polda Metro Jaya tahun 2009, merupakan penjabaran dari Tugas Polda Metro Jaya tahun 2009, sesuai Petunjuk Perencanaan Kapolda TA. 2009.

3.3.2. Struktur Organisasi Denma

3.3.2.1. Satuan Pengamanan dan Protokol (Sat. Pamprot) :

1. Sat. Pamprot adalah unsur pelaksana pada Denma Polda Metro Jaya yang bertanggung jawab kepada Kadenma dalam melaksanakan urusan pengamanan, protokol, dan musik di lingkungan Mapolda Metro Jaya.
2. Sat. Pamprot bertugas menyelenggarakan pengawalan dan penjagaan serta tugas-tugas dan musik.
3. Sat. Pamprot dipimpin oleh Kasat Pamprot yang bertanggung jawab kepada Kadenma.
4. Kasat Pamprot dijabat oleh anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) sudah sesuai dengan Kep. Kapolri No. Pol.: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Perubahan atas Kep. Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat kepolisian Negara Republik Indonesia daerah (Polda).
5. Sat. Pamprot dibagi atas 2 sub pelaksana tugas, yaitu :
 - a. Unit Protokol
 - b. Unit Walga
 - c. Unit Korsik

3.3.2.2. Unsur Sub Pelaksana Tugas :

1. Sat. Yanma dibagi atas 2 sub pelaksana tugas, yaitu :
 - a. Unit Uprapel :
 - 1) Unit Uprapel berada di bawah Sat. Yanma yang dipimpin oleh Kanit Uprapel.
 - 2) Kanit Uprapel memiliki tugas dalam melaksanakan apel, upacara, rapat, dan pertemuan termasuk dalam pelayanan pemakaman.

b. Unit Mako :

- 1) Unit Mako berada di bawah Sat. Yanma yang dipimpin oleh Kanit Mako.
- 2) Kanit Mako bertugas melaksanakan kebersihan, tata tertib perkantoran, pengaturan pemondokan/perumahan.

2. Sat. Anghar dibagi atas 2 sub pelaksana tugas, yaitu :

a. Unit Angkutan :

- 1) Unit Angkutan berada di bawah Sat. Anghar yang dipimpin oleh Kanit Angkutan.
- 2) Kanit Angkutan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan bermotor.
 - (b) Menyelenggarakan angkutan antarjemput anggota Polri/PNS Polda Metro Jaya.

b. Unit Pemeliharaan :

- 1) Unit Pemeliharaan berada di bawah Sat. Anghar yang dipimpin oleh Kanit Har.
- 2) Kanit Pemeliharaan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan gedung/bangunan, perkarangan, instalasi listrik, air, jalan, dan jembatan di lingkungan Mapolda Metro Jaya.
 - (b) Menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan alat-alat kantor, alat-alat kesatrian, peralatan dan perlengkapan lainnya.
 - (c) Menyelenggarakan dan melaksanakan perbaikan perawatan mesin-mesin stasioner dalam lingkungan Mapolda Metro Jaya.

(d) Menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan kebersihan lingkungan, gedung bangunan kantor/ruang kerja, halaman perkarangan, pertamanan, kompleks perumahan dinas, asrama/ksatrian dalam lingkungan Mapolda Metro Jaya.

3. Sat. Pamprot dibagi atas 3 sub pelaksana tugas, yaitu :

a. Unit Pengawasan dan Penjagaan (Walga) :

1) Unit Walga berada di bawah Sat. Pamprot yang dipimpin oleh Kanit Walga.

2) Kanit Walga memiliki tugas dan tanggung jawab:

(a) Menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan di lingkungan Mapolda Metro Jaya.

(b) Melaksanakan pengamanan kediaman/rumah dinas pejabat Polda Metro Jaya

b. Unit Protokol

1) Unit Protokol berada di bawah Sat. Pamprot yang dipimpin oleh Kanit Protokol.

2) Kanit Protokol memiliki tugas dan tanggung jawab :

(a) Menyelenggarakan dan melaksanakan pataka dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan siswa Diktukba.

(b) Melaksanakan kegiatan protokoler dalam menyambut kedatangan tamu kenegaraan atau VIP lainnya.

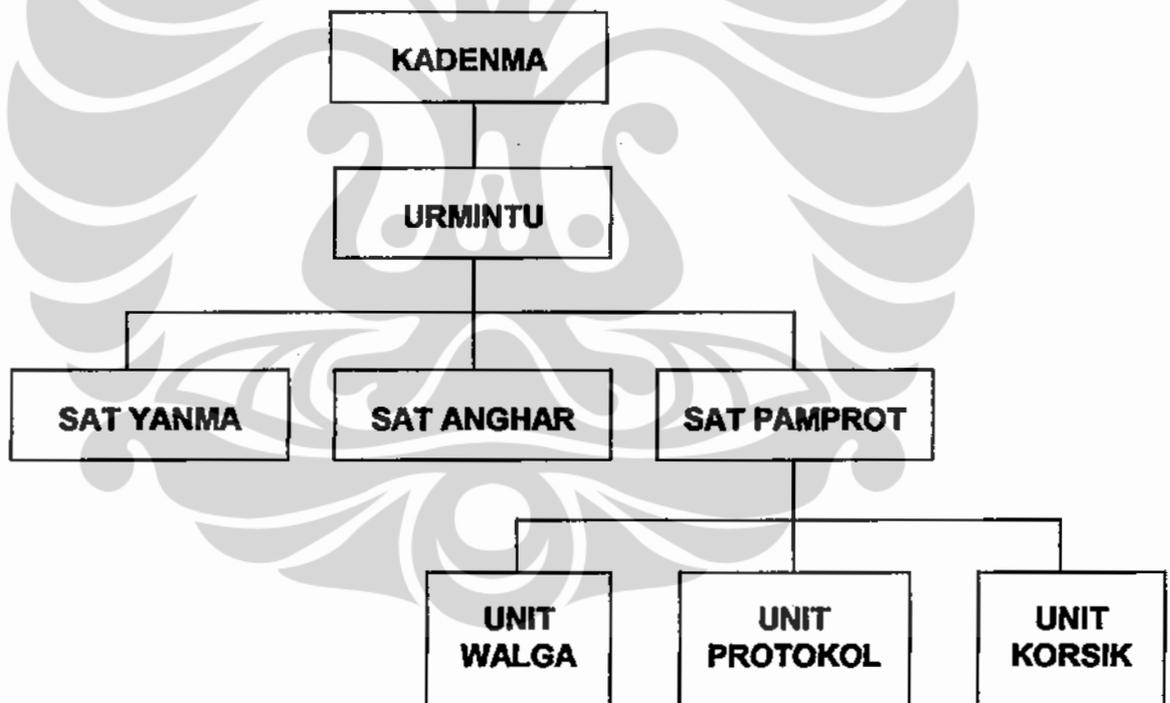
c. Unit Korsik :

1) Unit Korsik berada di bawah Sat. Pamprot yang dipimpin oleh Kanit Korsik.

2) Kanit Korsik memiliki tugas dan tanggung jawab :

- (a) Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas sebagai korps musik dalam upacara atau acara khusus lainnya yang berkaitan dengan korps musik di lingkungan Mapolda Metro Jaya.
- (b) Melaksanakan koprns musik dalam kegiatan pemakaman atau tabur bunga.

Gambar 4
Struktur Organisasi Detasemen Markas (Denma)



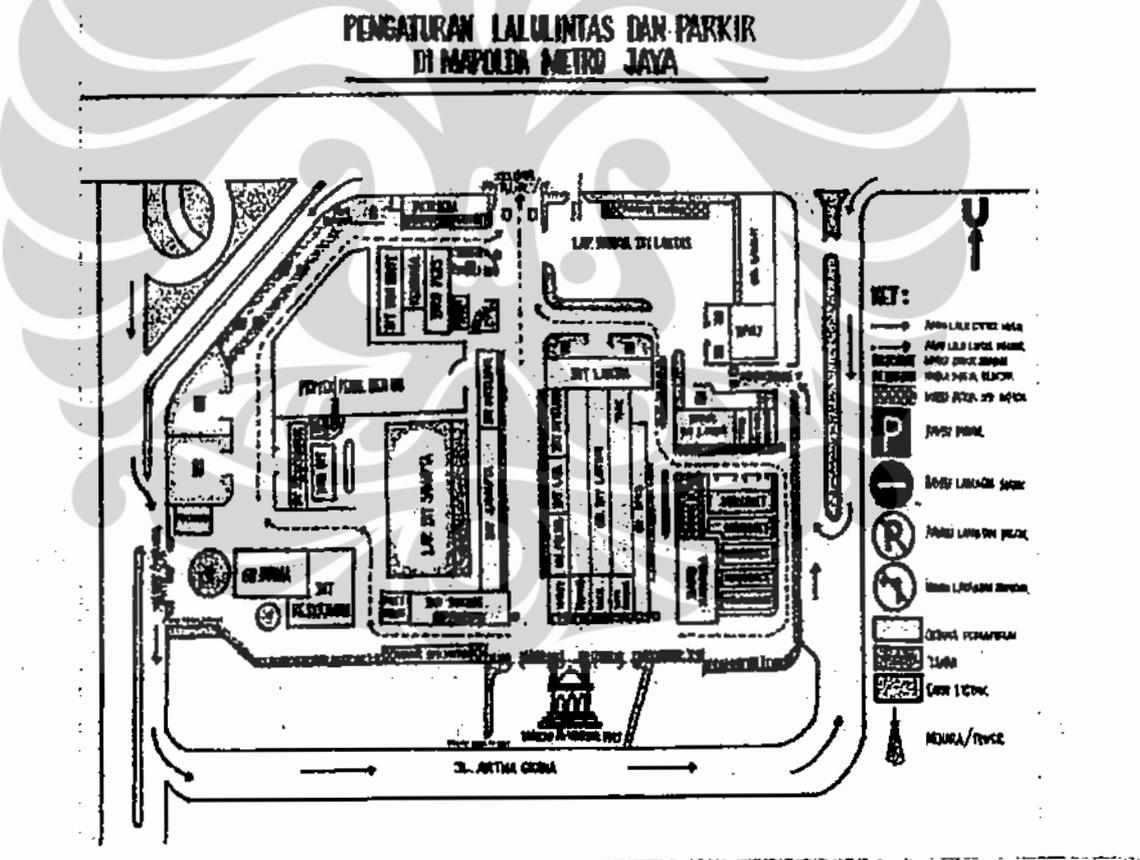
Sumber Data : Detasemen Markas Polda Metro jaya

3.4. Denah dan Aset-aset Markas Komando Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya, berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 55, Jakarta Selatan. Luas wilayah Markas Komando Kepolisian ini adalah sekitar 774.096 m². Luas bangunannya secara keseluruhan adalah sekitar 73.477 m². Areal ini terletak di antara perkantoran. Selain kantor, juga terdapat beberapa perusahaan dan tempat hunian apartemen. Pada bagian depan dan belakang Markas Komando ini terdapat jalan besar yang juga merupakan jalan protokol utama Jakarta.

Denah Markas Komando Polda Metro Jaya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 5
Denah Markas Komando Polda Metro Jaya



Sumber Data : Detasemen Markas Polda Metro Jaya

Dari denah ini dapat kita lihat beberapa gedung perkantornya dan tempat parkir kendaraan R2 maupun R4. Ada beberapa ruangan yang merupakan aset Polda Metro Jaya sebagai salah satu obyek vital negara yang harus dilindungi. Aset yang harus dilindungi tersebut antara lain :

1) Ruang Kantor

Ruang kantor yang berada di lokasi Markas Komando Polda Metro Jaya ini terdapat ruangan kantor masing-masing satuan kerja seperti Biro, Direktorat, dan staf lainnya pada gedung ini terdapat data/file dan dokumen penting yang menjadi rahasia negara.

2) Gedung utama tempat dimana terdapat ruangan kerja unsur pimpinan Polda Metro dan Wakilnya.

3) Gedung Samsat wilayah Jakarta selatan pada gedung ini terdapat file/dokumen penting dan berharga tentang kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.

4) Gudang senjata. Gedung ini merupakan tempat penyimpanan senjata api berikut peluru.

5) Gedung tempat rumah tahanan (Rutan) pelaku tindak pidana.

6) Alutsista yang berupa kendaraan dinas Polri.

7) Gedung balai pertemuan dan lapangan parkir di sekitar tersebut.

8) Gedung TMC (Traffic Manajement Centre) terdapat berbagai informasi dengan teknologi canggih.

9) Gedung proyek pembangunan Detasemen 88 yang sedang terhenti pembangunannya.

10) Perumahan pejabat utama Polda Metro Jaya.

11) Mess TMC yang dipergunakan anggota untuk keperluan dinas.

12) Masjid Al-Kautsar yang berdiri megah.

13) Luas areal Markas Komando Polda Metro Jaya sekitar 774.096 m².

BAB IV
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SEKURITI FISIK
DI MARKAS KOMANDO POLDA METRO JAYA

Penelitian mengenai penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada Markas Komando Polda Metro Jaya, yaitu berupa penggambaran dan penjelasan tentang kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan sistem keamanan di perusahaan tersebut. Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik mencakup beberapa kategori antara lain : potensi ancaman pada Markas Komando Polda Metro Jaya, aplikasi *Community Development (CD)* yang dilaksanakan, pelaksanaan pengamannya dan penyelenggaraan keamanan pada Markas Komando Polda Metro Jaya.

Di samping itu dalam tesis ini, penulis menggambarkan temuan-temuan berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada Markas Komando Polda Metro Jaya. Adapun penggambaran dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.1. Potensi Ancaman di Markas Komando Polda Metro Jaya

Dalam melakukan pengamanan dari berbagai ancaman yang dapat terjadi terhadap aset-aset negara yang menjadi inventarisnya, Polda Metro Jaya selalu berusaha untuk meminimalisir segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari alam, manusia maupun teknologi. Ancaman yang berasal dari alam, antara lain seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Untuk ancaman yang berasal dari manusia meliputi ancaman yang berasal dari luar perusahaan dan berasal dari dalam lingkungan perusahaan. Ancaman yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan dapat berupa pencurian kendaraan bermotor serta dokumen penting / berharga maupun dokumen rahasia milik negara, penggelapan terhadap aset inventaris (berupa *senjata api*) Polda Metro Jaya, tahanan yang melarikan diri dan tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh internal anggota Polda Metro Jaya itu sendiri. Ancaman yang berasal dari luar lingkungan perusahaan itu dapat berupa unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun LSM yang menuntut perbaikan kinerja Kepolisian terutama segala permasalahan dan kasus yang sedang ditangani, ataupun yang diminta harus

segera ditangani oleh Polda Metro Jaya, pencurian aset-aset perusahaan yang dilakukan oleh orang yang berasal dari luar seperti penipuan terhadap masyarakat wajib pajak pengendara bermotor serta berbagai gangguan sosial lainnya. Ancaman yang berasal dari penggunaan teknologi, antara lain seperti adanya polusi udara yang berasal kendaraan bermotor di lingkungan perkotaan sekitar Markas Komando Polda Metro Jaya dan berbagai akibat lainnya.

Ada beberapa potensi ancaman yang sekiranya dirasakan dapat mengganggu produktivitas dan pelayanan. Potensi ancaman yang sedemikian menjadikan kita harus berpikir mengatasinya. Hadiman (2009) mengatakan bahwa : “Dalam penyelenggaraan sekuriti kita harus memperhatikan : ancaman apa yang mungkin timbul, kapan akan terjadi, di bagian mana kemungkinan munculnya, siapa kemungkinan pelaku-pelakunya, dan bagaimana proses peristiwanya. Hal ini berarti upaya penyelidikan masa depan atau kegiatan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi”.

Dalam penulisan ini, penulis mengklasifikasikan potensi ancaman yang terjadi di Markas Komando Polda Metro Jaya dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1. Ancaman yang mungkin terjadi : Ancaman yang mungkin terjadi yang mana cakupannya bersifat lebih luas dan merupakan perkiraan keadaan. Ancaman jenis ini meliputi :
 - 1) Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran dan lain-lain.
 - 2) Pembakaran dan kebakaran.
 - 3) Pencemaran lingkungan.
 - 4) Unjuk rasa.
 - 5) Tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan / penipuan, tahanan yang melarikan diri dan lain-lain.
 - 6) Pembocoran rahasia negara.
 - 7) Pemalsuan data-data dan informasi komputer, dokumen, arsip, peralatan, dan lain-lain.
 - 8) Pengutulan aset-aset inventaris Polda oleh anggota kepolisian itu sendiri.
 - 9) Perampokan uang di kantor Samsat.

- 10) Perusakan dan penjarahan aset-aset inventaris Polda bila terdapat situasi *chaos*.
 - 11) Sabotase.
 - 12) Ancaman bom.
 - 13) Ancaman dari hipnotis, santet, teluh, guna-guna dan sebagainya yang bersifat metafisik dari pihak-pihak tertentu.
2. Ancaman yang terjadi : Adapun bentuk ancaman yang terjadi di Markas Kepolisian ini meliputi :
- 1) Unjuk Rasa

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan yang terjadi. Gangguan keamanan ini dapat menyebabkan sebagian atau seluruh proses pelayanan terhadap masyarakat berjalan tidak optimal, begitu juga dengan pelaksanaan tugas lainnya apalagi bila unjuk rasa ini tidak ditangani dengan baik sehingga massa yang melakukannya dengan anarkis dan melakukan perlawanan terhadap petugas yang mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Di hitung dari awal tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 ini saja telah terjadi 4 (empat) kali kejadian unjuk rasa di Markas Komando Polda Metro Jaya. Dari hasil wawancara di dapati bahwa kejadian unjuk rasa ini sering sekali terjadi dan penanganannya sudah sesuai dengan SOP pengamanan unjuk rasa sesuai dengan penjelasan salah satu Perwira Siaga Biro Operasional Polda Metro Jaya AKP. Ferro, Sik pada tanggal 8 Maret 2010 bahwa:

“ Unjuk rasa yang terjadi di Mapolda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pertama di mulai dari adanya surat pemberitahuan dari Direktorat Intelejen Keamanan Polda Metro Jaya tentang waktu dan perkiraan ancaman unjuk rasa yang akan berlangsung kemudian dari Biro Ops membuat surat perintah pengamanannya untuk anggota-anggota yang akan terlibat”.

Tabel 4
Data Kasus Unjuk Rasa Tahun 2009 – 2010

Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
2009		1				1		1			1	2
2010	2	1	1									

Sumber Data: Roops Polda Metro Jaya

Kasus unjuk rasa terakhir yang terjadi di Markas Komando Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret tahun 2010 yaitu yang dilakukan oleh aliansi Mahasiswa Jakarta yang menuntut agar di bebaskannya rekan-rekannya yang di amankan oleh petugas kepolisian dalam unjuk rasa yang dilakukan sehari sebelumnya di depan gedung MPR/DPR RI dengan aksi damai.

Yang menarik kasus unjuk rasa ini tidak pernah dilakukan oleh anggota kepolisian itu sendiri. Dari fakta yang ditemukan di lapangan unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat, mahasiswa maupun LSM merupakan penyampaian aspirasi dari masyarakat maupun kepentingan kelompoknya itu sendiri.

2) Tindak Kejahatan

Tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan Polda, antara lain :

- (1) Pencurian kendaraan bermotor.
- (2) Penipuan terhadap masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor oleh orang yang tidak bertanggung jawab / calo.
- (3) Tahanan pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari rumah tahanan yang berada di dalam Markas Komando Polda Metro Jaya.

Tabel 5
Data Rekapitulasi Kejadian tahun 2009 dan tahun 2010

Pencurian Ringan		1		2	1			2		
Penipuan					1			2		
Penggelapan										
Pemalsuan					1					
Pengrusakan										
Pencurian Kendaraan Bermotor	1		2		1	1			2	

Sumber data : Roops Polda Metro Jaya

Sesuai dengan data gangguan keamanan pada Markas Komando Polda Metro Jaya, tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian Kendaraan bermotor baik itu roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) baik itu milik pengunjung/ tamu yang datang juga kendaraan milik anggota Polda Metro itu sendiri, selama 1 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 tercatat 7 kasus pencurian kendaraan bermotor yang paling terbaru terjadi tanggal 4 Februari 2010, pencurian sepeda motor milik anggota Direktorat Samapta atas nama Brigadir Dua Joko di lokasi parkir Markas Komando Polda Metro Jaya. Kejadian tindak pidana lain yang terjadi di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya pencurian ringan dan pemalsuan di lakukan oleh orang dalam/ internal anggota Polda Metro ataupun orang luar/ eksternal yang bekerja sama dengan internal anggota kepolisian Polda Metro jaya. Hal ini di dapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Kasat Pamprot Denma Polda Metro Jaya AKP. H. Sende pada tanggal 10 Maret 2010 pukul 11.00 wib di ruang kerjanya mengatakan bahwa :

“setiap kejadian Tindak pidana Yang terjadi di Mapolda selalu saja ada anggota Kepolisian yang terlibat, yang saya ingat kejadian pencurian mobil tahun 2009 melibatkan oknum anggota Provost”.

4.2. Aplikasi *Community Development* yang dilaksanakan Polda Metro Jaya

Pemberdayaan masyarakat di lingkungan obyek vital seperti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, merupakan salah satu bentuk implementasi dari upaya taktis dan perencanaan strategi instansi Polda Metro Jaya sebagai salah satu obyek vital milik negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat.³¹ Pembinaan lingkungan masyarakat sekitar *Community Development (CD)* melalui upaya konkrit untuk membantu pembangunan masyarakat sekitar. Upaya-upaya konkrit tersebut melalui kegiatan bantuan sosial guna mendapatkan dukungan masyarakat dan rasa ikut memiliki sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya ancaman dan ikut berpartisipasi dalam pengamanan lingkungan secara terpadu. Kepedulian Polda Metro Jaya terhadap lingkungan sosial dengan melakukan kegiatan *Community Development (CD)* yang berdasarkan nilai-nilai (*values-based*) program merupakan wujud tanggung jawab sosial Polda Metro Jaya terhadap komunitas dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Hadiman bahwa aplikasi *community development (CD)* berdasarkan wilayah meliputi Ring I; RT, RW, Kelurahan Ring II ; Kecamatan, Kabupaten/ Kota Ring III ; Provinsi. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang berkaitan dengan *community development (CD)* adalah dalam bentuk *community policing* oleh Satuan Kerja Biro Bina Mitra Polda Metro Jaya, wujud *community development (CD)* yang dilakukan oleh Mapolda terhadap lingkungan sekitar adalah dengan membuka akses untuk masyarakat sekitar agar dapat melakukan ibadah sholat di masjid yang berda di dalam lingkungan Mapolda. Dari hasil wawancara dengan Ahmad masyarakat sekitar yang selalu melaksanakan ibadah shalat di masjid al-

³¹ Tokoh sosiologi modern Tolcott Parsons, merumuskan kriteria adanya masyarakat. Adapun kriteria adanya masyarakat sebagai berikut :“*Masyarakat* adalah suatu sistem sosial yang swa sembeda (self subsistent), melebihi masa hidup individu normal, merekrut anggota secara reproduksi biologis dan melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya” (Sukanto,1993:65).

kautsar Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Maret 2010 pukul 13.30 wib di depan masjid di dapati bahwa: "Dengan adanya jalan akses menuju Masjid ini saya merasa sangat senang bisa melaksanakan ibadah shalat di masjid Polda yang bagus dan megah ini".

Kegiatan lainnya memberikan bimbingan, pengarahan kepada masyarakat tentang keamanan swakarsa serta penghargaan kepada Siskamling, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), petugas Polmas (Perpolisian Masyarakat), dan Satpam teladan untuk menambah motivasi dalam membantu terpeliharanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif juga pelaksanaan sunatan massal untuk anak-anak terlantar dan tidak mampu.

Dari hasil penelitian di lapangan kegiatan Polda Metro Jaya dalam mengimplementasikan kegiatan yang berhubungan dengan *community development (CD)* sudah terprogram dan proaktif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat ibu kota Jakarta, hanya saja kurang memberdayakan warga sekitar untuk membantu pihak Markas Komando Polda Metro Jaya untuk ikut mengamankan meningkatkan ketertiban serta meningkatkan daya cegah, daya tangkal, dan daya upaya penanggulangan tindak kejahatan yang akan terjadi atau di lakukan oleh pelaku tindak pidana.

4.3. Pelaksanaan Pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya

Pengamanan lingkungan kerja Polda Metro Jaya diatur dalam Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak / 01 / I / 1994 tentang Peraturan Dinas dalam yang merupakan petunjuk dan ketentuan yang mengatur tentang cara-cara menanamkan disiplin anggota Polri dalam rangka pengamanan Polda Metro Jaya yang mencerminkan suatu sifat yang khas dari suatu kesatuan dari Markas Komando Polda Metro Jaya.

Markas Komando Polda Metro Jaya dilengkapi dengan bagian keamanan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Sistem pengamanannya dengan menggunakan petugas sekuriti *inhouse* yang terdiri dari anggota kepolisian dari Satuan Pengaman Protokol (Sat Pamprot) Detasemen Markas Polda Metro Jaya dan petugas piket fungsi masing-masing Satuan Kerja serta petugas sekuriti satuan pengamanan (Satpam) *out sourcing* di Markas Komando Polda Metro Jaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

menciptakan situasi keamanan dan ketertiban umum di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya. Komponen pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya terdiri dari sistem pengamanan oleh manusia (anggota piket jaga/ Satpam) dan sistem pengamanan infrastruktur atau fisik.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Detasemen Markas Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Gus Sudrajat pada tanggal 2 Maret 2010 sekitar pukul 10.00 Wib, di ruang kerja kantor Polda Metro Jaya, diijelaskan kepada peneliti bahwa:

“Sasaran pengamanan pada kawasan Mapolda ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas *inhouse* dari Satuan Pengamanan Protokol Detasemen Markas Polda Metro Jaya secara umum, dengan berpedoman pada kebijakan pimpinan berdasarkan juklak maupun juknis SOP dibidang keamanan dengan mengutamakan koordinasi serta kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini.”

Dalam tesis ini, penulis menggambarkan temuan-temuan berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada Markas Komando Polda Metro Jaya. Adapun penggambaran dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kebijakan Keamanan Markas Komando Polda Metro Jaya

Kebijakan keamanan tidak terlepas dari keamanan fisik yang diterapkan di Markas Komando Polda Metro Jaya. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan harus dapat berhasil dengan mangkus dan sangkil. Namun semua yang diterapkan itu sangat terkait sumber daya manusia yang akan melakukan kebijakan. Untuk mencapai tujuan agar kebijakan keamanan dapat terlaksana dengan baik maka perlu diberikan pelatihan kepada staf tentang pentingnya mematuhi dan menjalankan prosedur serta kebijakan yang berlaku. Pada kenyataannya bahwa anggota jaga dari Sat Pamprot Denma Polda Metro Jaya, banyak yang merupakan anggota kepolisian yang bermasalah, secara mental maupun kepribadiannya dan tidak dilakukan pelatihan yang berkesinambungan secara keseluruhan. Begitupun dengan proses rekrutmen dari Satuan pengamanan *outsourcing* tidak di lakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku yang di dapat dari hasil penelitian.

4.3.2. Sistem Pengamanan (Anggota Piket Jaga/Satpam)

Sekuriti yang baik harus memiliki kebijakan, proses monitoring, dan proses *assessment* yang bisa dilakukan baik oleh suatu institusi maupun mengundang pihak ketiga. Hal ini terkait erat dengan masalah sumber daya manusia khususnya personil sekuriti.

4.3.2.1. Pelibatan Petugas Sekuriti

Pengamanan petugas *inhouse* di Markas Komando Polda Metro Jaya dengan mempergunakan petugas jaga dari detasemen markas dan pelibatan piket fungsi dari masing-masing satuan fungsi organisasi pengamanan perusahaan dan pengelolaannya melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa tenaga keamanan. Yang menangani pengelolaannya saat ini yaitu PT. Mitra Mandiri sebagai klien dari Pemda DKI Jakarta yang ikut dalam mengamankan kantor Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat) cabang Jakarta Selatan dan yang membantu mengamankan Gedung biru direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang semuanya berkedudukan di Markas Komando Polda Metro Jaya.

Hasil wawancara dengan bapak Ernindya selaku bagian HRD PT Mitra Mandiri pada tanggal 14 Maret 2010, sekitar pukul 10.45 wib di kantor Samsat, yang mengatakan bahwa :

“Kami dari perusahaan penyedia jasa *cleaning service* di beri tugas untuk menyediakan petugas Satpam di lingkungan kantor Samsat oleh Pemda DKI Jakarta.”

Dari hasil penelitian bahwa semua pihak ketiga atau perusahaan yang menyediakan tenaga keamanan bukan merupakan suatu Badan Usaha Penyedia Jasa Pengaman. (BUJP)

Komponen petugas sekuriti yang dilibatkan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya dalam satu hari, meliputi :

- a. Petugas sekuriti *inhouse* Markas Komando Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 470 orang yang terdiri dari 20 orang dari petugas Denma dimasukkan ke dalam *shift* yang ada sedangkan sisannya bervariasi jumlah yang bertugas pada masing-masing

satuan fungsi terkait yang mempunyai tugas pengamanan terbatas pada tempat kerjanya saja.

- b. Petugas sekuriti *outsourcing* (PT. Mitra Mandiri) berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Danru, yang terbagi menjadi 1 *shift* Komandan *Shift* yang sudah masuk ke dalam jumlah tersebut. Yang membantu pengamanan pada daerah terbatas di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya yaitu hanya pada kantor Samsat dan gedung biru direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hanya pada hari kerja.

4.3.2.2. Sasaran Pengamanan

Dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Markas Komando Polda Metro Jaya, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah:

- a. Manusia, yaitu tamu dan anggota kepolisian yang dipekerjakan di Markas Komando Polda Metro Jaya berjumlah 9.536 anggota Polri dan 698 orang PNS serta tahanan pelaku tindak pidana yang berada di rutan Polda Metro Jaya.
- b. Fisik atau benda yang menjadi inventaris Polda Metro Jaya yaitu seluruh bangunan seluas 73.477m² yang terdapat di area Markas Komando Polda Metro Jaya seluas 774.096m² dan juga Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) milik negara .
- c. Dokumen-dokumen penting dan berharga serta rahasia negara yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di Markas Komando Polda Metro Jaya.
- d. Kegiatan-kegiatan pelayanan para anggota kepolisian yang bekerja di Markas Komando Polda Metro Jaya terhadap masyarakat ibu kota Jakarta dan sekitarnya.

Pada kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya pengamanannya dibagi menjadi 5 wilayah konsentrasi pengamanan yang berbeda tingkat kerawanannya atau klasifikasi pengawasan dan

pembinaan daerah berdasarkan *safety* pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya menjadi beberapa tingkatan, meliputi:

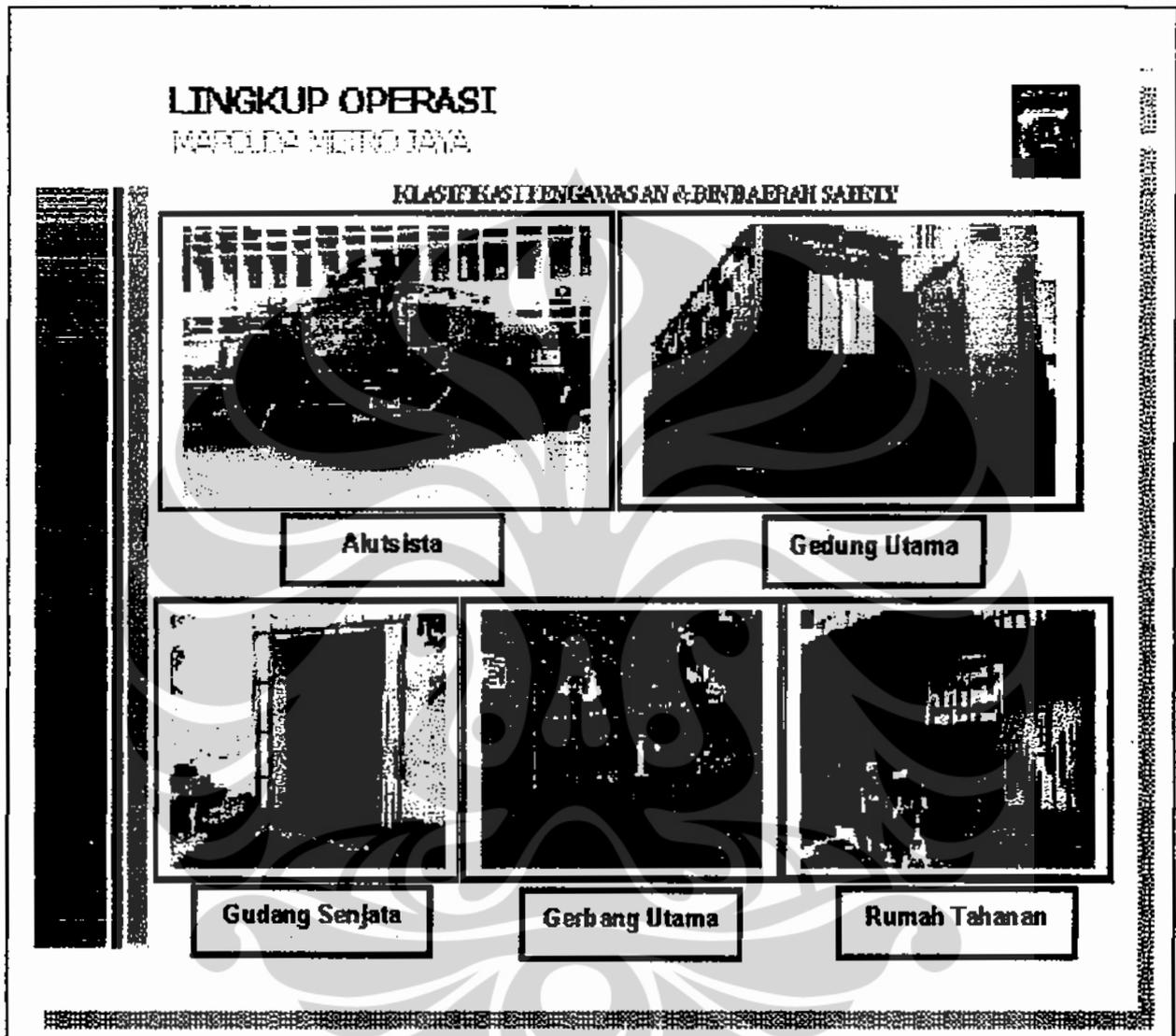
- a. Tingkat pengamanan level satu atau *minimum security*.
- b. Tingkat pengamanan level dua atau *low level security*.
- c. Tingkat pengamanan level tiga atau *medium security*.
- d. Tingkat pengamanan level empat atau *high security*.
- e. Tingkat pengamanan level lima atau *maximum security*.

Tingkat pengamanan tersebut memiliki ciri tersendiri sesuai dengan tingkatan keamanan yang dimiliki oleh Polda itu. Mulai dari gudang persenjataan, gudang arsip kendaraan bermotor sampai pada tempat perkantoran serta gedung pelayanan masyarakat. Dari pengamatan peneliti bahwa di Markas Polda Metro Jaya penerapannya banyak kekurangannya sesuai dengan persyaratan serta ketentuan pokok dari sistem pengamanan dari masing-masing tingkatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jendral Polisi Drs. Eko Bayu Seno di gedung utama pada tanggal 10 Maret 2010 pukul 10.00 wib bahwa:

“Pelaksanaan Pengamanan Markas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sepenuhnya di laksanakan oleh Detasemen Markas dan di bantu dengan pelibatan piket fungsi, sedangkan untuk tingkatan level pengamanan yang di terapkan oleh Polda Metro Jaya masih banyak kekurangannya dan masih perlu di tingkatkan lagi..”

Hasil pengamatan di lapangan di temukan bahwa pada kawasan Markas Markas Komando Polda Metro Jaya tidak di terapkan pembagian berdasarkan klasifikasi Zone dan Ring yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas pengaman di kawasan tersebut.

Gambar 5
Lingkup Operasi Sasaran Pengamanan



Sumber Data : Detasemen Markas Polda Metro Jaya

4.3.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses pelaksanaan tugas-tugas pengamanan, pengadaan beberapa peralatan pengamanan sangat diperlukan selain sebagai sarana pendukung dalam menjalankan

tugas pengamanan, hal tersebut juga sebagai investasi dari perusahaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain :

- a. Untuk kesiapan Satpam dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan *Handy Talky* (HT) dan telpon. HT sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi hanya ada 5 unit sedangkan 1 unit dalam kondisi rusak berat. Hal ini terasa sangat minim dari kebutuhan yang harus ada dan dapat menyebabkan pengawasan menjadi terbatas hanya pada petugas yang memegang HT saja. Sedangkan untuk telpon hanya ada 1 buah yang berada di pos terdepan saja (Pos 1).
- b. Kendaraan yang disediakan berupa 1 unit jenis Yamaha T-RS, dengan kondisi kendaraan yang kurang terawat sehingga sering mengakibatkan sepeda motor patroli mogok pada saat melakukan tugas patroli karena kerusakan mesin.
- c. Untuk peralatan pengamanan petugas *inhouse* maupun satpam *outsourcing* tidak dilengkapi dengan tongkat Polisi dan borgol, hanya ditambah dengan 3 buah *stick mirror* alat pendeteksi logam yang dimiliki oleh petugas pada saat ini sangat ketinggalan zaman, sehingga petugas sekuriti terbatas dalam memantau barang yang dibawa oleh tamu dan 2 buah senjata laras panjang yang dibawa oleh petugas kepolisian pada pos 4 dan 3 sesekali digunakan.
- d. Dalam menghadapi kebakaran Markas Komando Polda Metro Jaya tidak memiliki *fire station* dan juga tidak dilengkapi unit mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan sebanyak 10 buah berada pada masing-masing gedung dan *hydrant* air sebanyak 2 buah dalam kondisi rusak dan tidak dapat di pergunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti apabila terjadi bencana kebakaran maka akan terjadi kekacauan dan masing-masing petugas tidak mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan.

- e. Kantor sekuriti yang berfungsi sebagai posko keamanan tidak disediakan pihak Polda Metro Jaya untuk petugas sekuriti *outsourcing*.
- f. Pakaian yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana ditempatkan, antara lain:
 - 1) Pengamanan umum, yang dilaksanakan di Markas Komando Polda Metro Jaya, yaitu di area parkir, keluar masuk karyawan dan pengunjung, dengan menggunakan pakaian PDL Untuk perlengkapan dinas jaga yaitu: pakaian dinas khusus dengan kople riem hitam, memakai tanda dinas jaga berbentuk ban piket sesuai dengan ketentuan yang berlaku berbentuk ban lengan coklat dengan tulisan “Jaga” warna kuning pada lengan kiri, bersenjata organik laras panjang.
 - 2) Pengamanan terbatas, dilaksanakan oleh masing-masing piket fungsi satuan kerja pada lingkungan dalam gedung yang di tempati sebagai tempat kerjanya dengan menggunakan pakaian dinas harian yang di sesuaikan pada masing-masing fungsi satuan kerja berlaku pada hari itu dan kartu identitas diri. Sedangkan untuk pakaian seragam satpam menggunakan putih biru atau biru-biru dan menggunakan kartu identitas diri.

4.3.2.4. Pola Pengamanan

Bila ditinjau dari segi sistem keamanan yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya berdasarkan organisasi keamanan yang pengelolaannya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga keamanan (bukan BUJPP), maka sistem keamanan dibagi menjadi 2 sistem pengamanan, yaitu :

a. Sistem Terbuka.

Tanggung jawab pelaksanaan pengamanan dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas sekuriti *inhouse*. Mengelola sistem

keamanan dengan pembatasan hak akses yang berbeda untuk tiap bagian yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke dalam kawasan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang ada di dalam maupun di luar Markas Komando Polda Metro Jaya.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap semua orang (tamu maupun anggota), barang dan dokumen yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya.
 - 3) Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap pejabat dan tamu VIP (*Very Important Person*).
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan terhadap orang, barang dan kendaraan yang keluar dan masuk kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya.
 - 5) Melaksanakan kegiatan patroli di seluruh area Markas Komando Polda Metro Jaya.
 - 6) Melaksanakan penanganan apabila terjadi kasus unjuk rasa di Markas Komando Polda Metro Jaya.
- b. Sistem Tertutup.

Tanggung jawab pelaksanaan pengamanan menjadi tanggung jawab bersama seluruh Anggota Kepolisian yang ada di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya.

4.3.2.5. Pembagian Tugas Pengamanan Petugas Sekuriti *Inhouse*

Pembagian tugas dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib, serta dapat mengefektifkan pengawasan dan pengendalian.

Kegiatan-kegiatan rutin pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas sekuriti *inhouse* terbagi menjadi 3 shif/regu (2 shif jaga dan 1 shif cadangan) yaitu :

- a. Shif I berjumlah 21 orang yang terdiri dari tenaga sekuriti *inhouse* bertugas dari jam 08.00-20.00 WIB.
- b. Shif II berjumlah 20 orang yang terdiri dari tenaga sekuriti *inhouse* bertugas dari jam 20.00-08.00 WIB.
- c. Shif III (shif cadangan) berjumlah 20 orang yang terdiri dari tenaga sekuriti *inhouse* bertugas pada hari berikutnya.

Petugas jaga *inhouse* Markas Komando Polda Metro Jaya dari dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dengan melaksanakan kegiatan patroli dan kegiatan pengawasan area Markas Komando Polda Metro Jaya melalui pos-pos jaga yang telah ditentukan.

Pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan dengan patroli dan penjagaan. Patroli dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya seperti patroli area parkir kendaraan bermotor, pintu-pintu gerbang akses masuk dan keluar, kawasan gedung-gedung, gudang senjata, dan sarana atau tempat lain yang dianggap perlu. Sedangkan penjagaan dilakukan di setiap pos-pos yang jumlah seluruhnya ada 6 pos.

- a. Tugas patroli dilaksanakan dengan rutin dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau semua personil yang dilibatkan melaksanakan perannya masing-masing berpedoman pada rencana yang telah dibuat, dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah diatur dalam pengorganisasian. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dan hanya terlihat seperti patroli rutin saja. Jarang dalam pelaksanaan patroli petugas melakukan teguran terhadap orang-orang atau pengunjung yang tidak tertib dan mencurigakan.
- b. Sedangkan tugas jaga dilaksanakan dengan melakukan penjagaan di setiap pos-pos yang ada di Markas komando Polda Metro Jaya. Untuk pelaksanaan tugas pengamanan pada Pos III dan V perlu dilakukan pemeriksaan secara ketat agar kondisi keamanan gedung perkantoran dapat dinyatakan steril dari ancaman dan

gangguan. Sebagai tindak lanjut dari kondisi yang diinginkan tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan orang, tindakan yang dilakukan dengan menanyakan maksud kedatangan, siapa yang dituju, mencatat identitas pribadi, menghubungi pejabat yang dituju, dan diijinkan apabila telah mendapat persetujuan dari yang dituju..
- 2) Pemeriksaan kendaraan roda 4 atau lebih, tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kendaraan menggunakan *mirror detector*, pemeriksaan bagian dalam mobil dan bagasi (menggunakan *metal detector* atau *visual*), dan setelah dinyatakan steril diberikan tiket parkir untuk masuk dan diserahkan pada saat ke luar.
- 3) Pemeriksaan sepeda dan sepeda motor (kendaraan roda 2).

4.3.2.6. Pembagian Tugas Pengamanan Petugas Sekuriti *Out Sourcing*

Kegiatan-kegiatan rutin pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas sekuriti *out sourcing* terbagi menjadi 1 shift/regu, Shif I berjumlah 12 orang yang terdiri dari 12 tenaga sekuriti *outsourcing* bertugas dari jam 06.00-14.00 WIB (sesuai dengan jam kerja) sedangkan hari minggu / hari libur tidak bertugas. Pelaksanaan tugasnya terbatas pada lingkungan kerjanya saja yaitu kantor Samsat, dan Gedung Biru Direktorat Lalu-lintas.

Seperti yang di sampaikan Bapak. Josarem selaku Danru Satpam *outsourcing* kepada peneliti yaitu:

“Kami melaksanakan tugas setiap hari kerja dan pada jam kerja, hari minggu dan tanggal merah kami libur.”

Fakta di lapangan di temui bahwa yang seharusnya melakukan Satpam *outsourcing* pemeriksaan terhadap barang bawaan dari setiap pengunjung / tamu yang datang akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan.

4.3.2.7. Pengawasan dan Pengendalian Tugas Sekuriti *Inhouse* dan *Outsourcing*

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas anggota Satuan Pengamanan Sat Pamprot Denma Polda Metro Jaya selaku petugas *inhouse* dilaksanakan oleh Kepala Unit Pengawasan dan penjagaan (Kanit Walga), Kepala Satuan Pengamanan dan Protokol (Kasat Pamprot) berjenjang sampai dengan Kepala Detasemen Markas (Ka Denma) dibantu oleh satuan provost Polda Metro Jaya ataupun dari pimpinan Polda Metro Jaya lainnya begitu juga dengan Satuan Pengamanan tenaga sekuriti *outsourcing*. Tugas yang dilaksanakan oleh semua Satuan Pengamanan seperti telah dijelaskan sebelumnya pada umumnya bersifat rutin, kecuali ada hal-hal khusus seperti terjadinya tindak pidana.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan ditemukan fakta bahwa *monitoring* dan pengawasan dilaksanakan oleh Kanit Walga dengan dibantu oleh para Komandan regu dari masing-masing Shif seperti pelaksanaan kegiatan serah terima regu jaga setiap hari untuk mengecek kesiapan petugas yang akan naik dinas dan pengecekan situasi di pos-pos tertentu baik secara langsung atau dengan menggunakan alat komunikasi (*handy talky* dan pesawat telepon).

Untuk evaluasi pelaksanaan tugas sekuriti secara rutin dilaksanakan setiap satu minggu sekali, serta waktu pelaksanaan rapat secara rutin dilaksanakan pada hari Kamis dengan melaksanakan apel Satuan Kerja Denma Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk Satpam yang merupakan petugas sekuriti *outsourcing* evaluasi pelaksanaan tugas juga dilakukan hanya pada hari Kamis yang di ambil alih oleh Kepala Sub Seksi Samsat Jakarta Selatan (Kasubsie) atau Bintara Urusan Tata Usaha Samsatnya.

a. *Briefing* / APP.

Pengarahan / Arahan Petunjuk Pimpinan (APP) / *Briefing* berikut *anev* untuk piket fungsi masing-masing satker dilaksanakan oleh Perwira siaga biro operasi Polda Metro Jaya

selaku Koordinatormya dilaksanakan setiap hari pada pukul 06.00 WIB.

Seperti yang disampaikan oleh AKP. Priyo Utomo, Sik salah satu Perwira Siaga kepada peneliti pada tanggal 4 maret 2010 di lapangan apel Polda Metro Jaya yaitu :

“Apel Siaga dilaksanakan setiap hari untuk pengecekan pasukan dan pemberian APP pada pukul 06.00 WIB. bertujuan untuk melakukan pengecekan dan kesiapan anggota sebelum melaksanakan piket tugas jaga masing-masing fungsi.”

Pergantian tugas jaga dari Satpamprot Denma sebagai bagian dari petugas sekuriti *inhouse* dilaksanakan dilakukan dengan jajar serah terima tugas di penjagaan. Selesai apel jajar serah terima baru diberikan pengarahan/APP oleh Komandan Regu atau yang mewakilinya. Sedangkan untuk petugas sekuriti *outsourching* tidak melakukan kegiatan tersebut karena tidak ada pergantian Satpam jaga.

b. Sistem Administrasi.

Petugas Satuan Pengamanan baik itu petugas *inhouse* maupun *outsourching* masing-masing dilengkapi dengan kartu anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya para petugas Satuan Pengamanan tidak dilengkapi dengan surat tugas selama menjalankan tugasnya. Kartu Kontrol tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas patroli yang dilaksanakan.

Selain itu petugas juga diwajibkan mengisi buku jurnal mutasi penjagaan dengan disesuaikan pada lokasi pos jaga yang ditempatinya yang terdapat pada pos I (*gerbang utama*), dan kewajiban tersebut dilaporkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kasat Pamprot Denma Polda Metro Jaya.

Menurut keterangan salah seorang Komandan Regu I Aiptu Endang Purnama di pos penjagaan pada tanggal 4 Maret 2010 bahwa :

”Sistem pelaporan buku mutasi tidak pernah di laporkan kepada pimpinan hanya di letakkan pada pos saja, pengecekan dilakukan pada saat atasan saya yang datang ke pos tersebut.”

Sedangkan pembuatan laporan pelaksanaan tugas tidak di laksanakan karena menganggap merupakan kegiatan rutinitas saja, karena secara tidak langsung melakukan pengawasan kepada petugas jaga. Laporan pelaksanaan tugas mencakup semua bentuk kejadian baik itu yang sifatnya rutin maupun insidental, semuanya dimasukan dalam satu buku mutasi saja tanpa terkecuali termasuk jika ada kejadian khusus seperti tindak pidana dengan skala tinggi yang terjadi pada Markas Komando Polda Metro Jaya tersebut.

c. Sistem Pelaporan.

Sistem pelaporan dibuat terhadap insiden berikut tindak kejahatan yang ada, artinya dibuat laporan pelaksanaan tugas setiap pergantian shift, hari, minggu dan bulan. Temuan-temuan yang ada ketika melaksanakan patroli, hambatan yang dihadapi serta cara menanggulangi permasalahan serta hal-hal lain yang didapatkan secara rutin dibuatkan dalam suatu bentuk bentuk laporan. Hal-hal yang sifatnya rutin seperti pengecekan dan pelaksanaan patroli atau tugas jaga semuanya juga dimasukkan kedalam buku mutasi yang dibuat oleh regu jaga. Sistem pelaporan tidak dilakukan dan juga tidak terdokumentasi dengan baik. Padahal laporan tersebut penting untuk pelaksanaan analisa dan evaluasi kerja, dengan adanya data tersebut dapat diambil langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana yang dapat merugikan Markas Komando Polda Metro Jaya.

4.3.3. Sistem Pengamanan Konstruksi (Sekuriti Fisik)

Berbicara mengenai *Physical Security* atau keamanan yang bersifat fisik maka akan terkait dengan bagaimana akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. *Physical security* juga tidak terlepas dari hal-hal

yang terkait dengan keamanan fisik yang ada Markas Komando Polda Metro Jaya. Di samping itu juga terkait dengan perlindungan secara fisik terhadap aset perusahaan.

Untuk menjaga aset perusahaan secara fisik, tentu sudah menjadi tanggung jawab bersama dari semua petugas sekuriti yang ada di Markas Komando Polda Metro Jaya. Namun peran petugas *inhouse* Denma cukup jelas di sini mengingat tugas mereka yang berat yaitu mengamankan aset-aset Polda Metro Jaya. Sistem pengamanan fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya, yaitu :

4.3.3.1. Kontrol Akses (*Access Control*)

Markas Polda Metro Jaya dari sisi akses control belum menerapkan satu pintu masuk ke dalam kawasan lingkungannya, karena terdapat 4 (empat) jalan yang dapat di gunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi orang-orang yang berurusan dengan Polda Metro Jaya merupakan akses masuk maupun keluar kawasan tersebut, 1 (satu) pintu di gunakan untuk masuk dan 1 (satu) pintu lagi untuk keluar khusus bagi pengguna kendaraan bermotor, sedangkan yang 2 (dua) lainnya khusus di peruntukan bagi pejalan kaki yang masuk maupun keluar dari Markas Komando Polda Metro Jaya masing-masing pintu di jaga oleh beberapa petugas sekuriti *inhouse* dari Detasemen Markas. Karena Polda Metro Jaya adalah merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat umum, maka kontrol akses di pos untuk pintu akses keluar masuk areal Markas Komando Polda Metro Jaya terlihat diabaikan kecuali pada akses masuk gedung ruangan-ruangan tertentu. Beberapa pintu ditempatkan pos jaga untuk memonitor kondisi tempat tersebut sebagai pos jaga untuk piket fungsi masing-masing kantor satuan kerja yang ada.

4.3.3.2. Penghalang (*Barrier*)

Markas Komando Polda Metro Jaya tidak di lengkapi dengan *barrier* atau penghalang fisik permanen hanya *barrier* yang berupa pagar kawat berduri *portable* yang di pasang sepanjang gerbang

utama pada saat adanya unjuk rasa/ demonstrasi yang berguna untuk menghalangi masa pengunjuk rasa yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya.

4.3.3.3. Pagar (*Fances*)

Untuk pagar (*fance*) yang digunakan oleh Markas Polda Metro Jaya, terbuat dari 2 (dua) macam bahan material sebagian besarnya dibuat dengan sangat baik dari batu batako putih yang di semen kemudian di ujungnya di tambahi besi tajam, kecuali untuk sisi wilayah pagar di selatan yang berbatasan dengan jalan raya Sudirman yang hanya menggunakan pagar berbahan jenis besi biasa dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter yang tidak memenuhi standar dengan pertimbangan keamanan sehingga masih memungkinkan orang luar dapat dengan mudah masuk ke markas komando Polda Metro Jaya dengan cara melompati pagar tersebut.

4.3.3.4. Kunci (*Locks*)

Kunci dan anak kunci adalah mekanisme kontrol akses yang paling murah. Kunci dianggap sebagai alat pencegah terhadap penyusup dan alat penunda / mencegah bagi orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik untuk masuk ke dalam Mapolda . Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menghancurkan atau membuka kunci akan memberi waktu yang lebih panjang bagi seorang petugas jaga tiba di tempat jika penyusup mudah diketahui. Sistem penguncian yang digunakan oleh Markas Komando Polda Metro Jaya untuk mengunci semua pintu pagar dan palang besi dengan menggunakan rantai dan gembok. Cara sistem penguncian seperti itu masih sangat sederhana dan ketinggalan jaman (masih tradisional).

Hasil penelitian di lapangan diperoleh fakta yaitu untuk kunci gedung-gedung tertentu tidak pernah terkunci sehingga orang dapat memasuki gedung tersebut dengan leluasa pada waktu kapan pun. Sedangkan beberapa gedung kunci dipegang oleh pejabat terkait

seperti gudang senjata dan brankas bendahara satuan masing-masing.

4.3.3.5. Penerangan (*Lighting*)

Sistem penerangan listrik yang digunakan Markas Komando Polda Metro Jaya masih menggunakan sistem pengamanan lampu standar. Penerangan listrik digunakan dari malam sampai pagi hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan menggunakan jasa dari PLN. Namun untuk alasan efisiensi beberapa lampu hanya dinyalakan seperlunya, cukup untuk tidak membuat tempat tersebut gelap gulita. Selama penelitian dilakukan, penerangan di areal dinilai mencukupi dengan jarak pandang yang jelas disetiap area maupun sudut.

Untuk beberapa kawasan yang cukup rawan seperti sepanjang wilayah selatan dan Pos III yang orang luar dapat mudah masuk terlihat tidak cukup penerangannya hanya gedung utama dan ruang tahanan yang penerangannya cukup.

4.3.3.6. Lahan Parkir

Lahan parkir yang tersedia di Markas Komando Polda Metro Jaya sangat terbatas dari hasil pengamatan penelitian sehingga menyebabkan banyak terdapat tempat atau lahan parkir yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak ada pembagian yang baik antara parkir kendaraan anggota dengan parkir kendaraan tamu, hampir sepanjang gedung-gedung beberapa satuan fungsi di jadikan lahan parkir tanpa ada petugas yang khusus mengawasi kendaraan tersebut dan juga mengganggu kelancaran kendaraan lain yang sedang melintas daerah tersebut.

Faktanya, seperti yang peneliti alami pada saat masuk ke dalam area Markas Komando Polda Metro Jaya kendaraan yang dipergunakan oleh peneliti parkir di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi parkir kendaraan, sampai dengan peneliti akan meninggalkan lokasi tersebut tidak ada satu petugas yang menegur pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada penempatan

petugas khusus di area parkir yang bertugas untuk mengarahkan dan mengatur parkir kendaraan. Selain itu juga banyak kendaraan yang parkir tidak teratur sehingga mengganggu kendaraan lain yang akan parkir di lokasi tersebut. Dan sering kali menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Markas Polda Metro Jaya.

4.3.3.7. Pos Jaga

Pos jaga diperuntukan sebagai tempat untuk memudahkan petugas jaga dalam mengawasi dan mengontrol setiap orang yang akan ke luar dan masuk area Markas Komando Polda Metro Jaya.

Terdapat 6 buah pos jaga yang berada di Markas Komando Polda Metro Jaya, yaitu :

- a. Pos 1, digunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi kendaraan pimpinan Polda serta tamu VVIP (*very very important person*). Pada pos ini dijaga oleh 6 orang petugas sekuriti dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang akan masuk dan keluar area Markas Komando Polda Metro Jaya dan tertutup untuk umum.
- b. Pos 2, digunakan untuk orang pejalan kaki yang akan masuk dan keluar area Markas Komando polda Metro Jaya di berlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang di jaga oleh 2 orang petugas dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang akan masuk.
- c. Pos 3 adalah pos untuk keluar kendaraan dan orang yang akan keluar maupun memasuki Markas Komando Polda Metro jaya yang di berlakukan dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB yang di jaga oleh 4 orang petugas setelah itu pos ini di pergunakan hanya untuk kendaraan yang akan keluar yang dijaga oleh 2 orang petugas sekuriti.
- d. Pos 4 digunakan untuk orang pejalan kaki yang akan masuk dan keluar area Markas Komando polda Metro Jaya di berlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB yang di jaga

- oleh 2 orang petugas dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang akan masuk.
- e. Pos 5 adalah pos keluar masuk khusus untuk kendaraan bermotor dan dijaga oleh 4 orang petugas sekuriti yang melakukan pemeriksaan kendaraan roda 2 atau lebih, tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kendaraan menggunakan *mirror detector*, pemeriksaan bagian dalam mobil dan bagasi (menggunakan *metal detector* atau *visual*), dan setelah dinyatakan steril kemudian mengambil karcis parkir dan diserahkan pada saat keluar.
 - f. Kemudian untuk Pos tambahan adalah pos di pergunakan orang pejalan kaki yang akan melaksanakan ibadah sholat di masjid Polda Metro Jaya, pos ini di buka hanya pada waktu-waktu tertentu yaitu pada pukul 12.00 WIB dan 15.00 WIB yang di jaga oleh 2 petugas sekuriti.

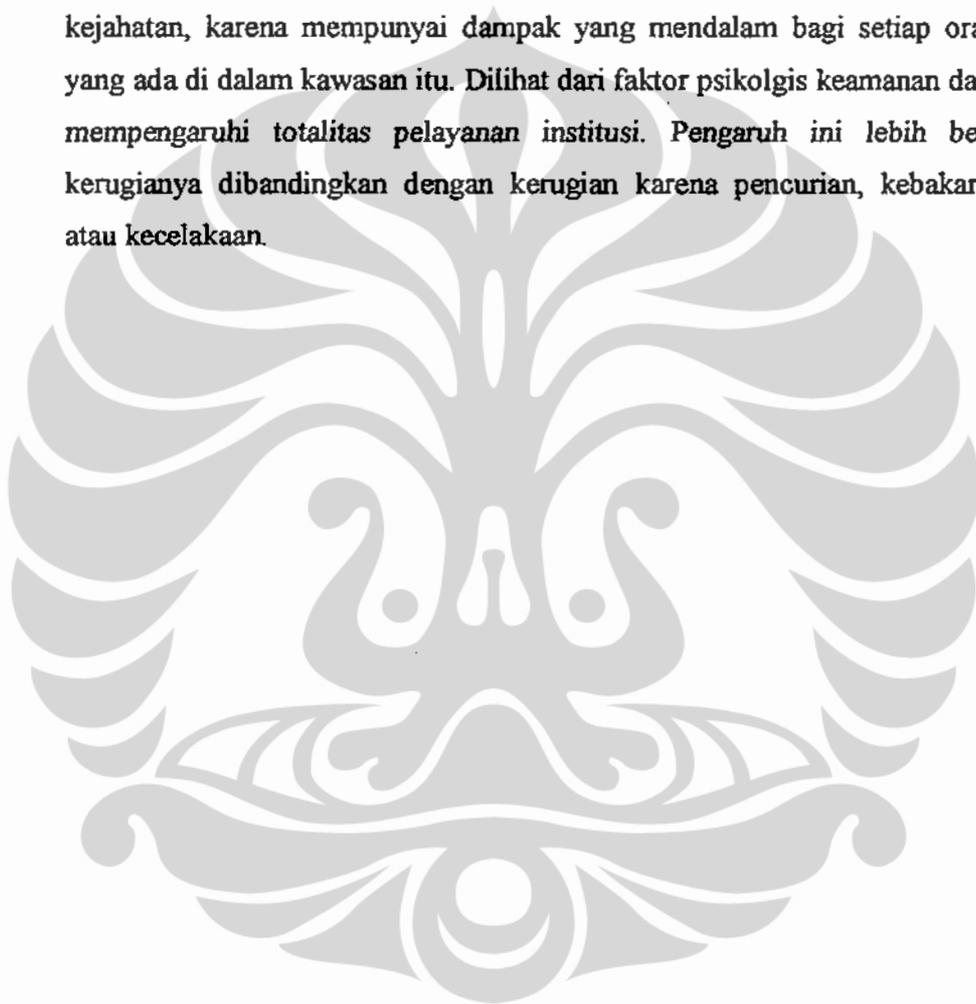
4.3.4. Sistem Pengamanan Elektronik

Institusi yang digolongkan sebagai obyek vital nasional, idealnya dilengkapi dengan piranti keamanan yang dipasang mulai dari ring luar hingga dalam, termasuk pemasangan kamera CCTV di setiap area dan penempatan kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada titik-titik tersembunyi yang benar-benar dinilai vital. Selain itu juga, untuk pemantauan semua kamera yang terpasang itu ditangani oleh orang-orang khusus di suatu ruangan khusus pula.

Sistem pengamanan elektronik yang digunakan oleh Markas Komando Polda Metro Jaya masih belum didukung dengan teknologi yang modern, seperti untuk sistem penguncian masih menggunakan gembok dan rantai serta palang yang dibuka secara manual. Fakta di lapangan bahwa sistem pengamanan dengan menggunakan CCTV tidak pada seluruh kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya yang dianggap rawan, sehingga tidak ada ruangan pengendali yang dapat memantau situasi lengkap dengan

menggunakan komputer serta tidak ada petugas yang khusus untuk mengawasi monitor CCTV.

Dengan terbatasnya anggota sekuriti dan luasnya daerah yang harus diawasi, cakupan CCTV dinilai kurang maksimal untuk menggantikan pengawasan yang dilakukan oleh anggota sekuriti. Penggunaan sistem CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan, karena mempunyai dampak yang mendalam bagi setiap orang yang ada di dalam kawasan itu. Dilihat dari faktor psikologis keamanan dapat mempengaruhi totalitas pelayanan institusi. Pengaruh ini lebih besar kerugiannya dibandingkan dengan kerugian karena pencurian, kebakaran, atau kecelakaan.



BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisa Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Polda Metro Jaya

Kebutuhan akan rasa aman dan jaminan keselamatan (*safety and security need*) untuk kawasan Polda Metro Jaya agar bisa tumbuh dan berkembang lebih maju lagi melalui sistem pengamanan fisik Polda Metro Jaya dalam rangka mengamankan aset-aset negara yang dimiliki Polda Metro Jaya.

Kondisi sistem pengamanan dan pelaksanaan upaya pembinaan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan segala kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang akan menunjang dalam terlaksananya pengamanan fisik dapat dikatakan berhasil seperti antara lain adanya pemagaran, tempat parkir, penerangan, sistem alarm, pemadam kebakaran, tenaga pengamanan *inhouse* dan *outsourcing*.

Hadiman (2008) mengatakan:

Manajemen sekuriti fisik sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian dan sebab apapun, dengan menggunakan wujud fisik pengamanan yang didukung proses manajemen agar hasilnya bagus yaitu sangkil (efektif/yang dikerjakan benar) dan mangkus (efisien/cara mengerjakannya benar). Menggunakan proses manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian, karena manajemen merupakan suatu ilmu agar hasilnya *sangkil* dan *mangkus*.

Definisi manajemen sekuriti fisik yang digunakan oleh penulis adalah mengacu pada pendapat Fay yang mengatakan bahwa:

“Physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facility’s full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, installation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and integrated electronic system. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, system involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical asets, and intellectual property (Mc Crie, 307-308), yang terjemahannya adalah sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran

fisik yang di desain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindunginya dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dan ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dan perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan penggunaan fisik penghalang, kunci, penyelamatan, penerangan, alarm, *CCTV*, pengawasan elektronik, akses kontrol, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan hak intelektual”.

Apabila penulis menganalisis terhadap kondisi sistem pengamanan fisik di Polda Metro Jaya dengan menggunakan teori manajemen. Teori manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh James George. F. Terry bahwa sistem pengamanan di Polda Metro Jaya akan diawali dengan perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya manusia yaitu Satuan Anggota Pengamanan *inhouse* dan *outsourcing* yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya.

Pengertian terhadap manajemen pengamanan fisik di lingkungan Polda Metro Jaya merupakan bagian yang utuh dari struktur dan institusi itu sendiri, sama halnya dengan bagian-bagian yang lainnya yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan, dimana organisasi sekuriti tersebut merupakan satu wadah/unit organisasi mulai dari anggota Polri Sat Pamprot Denma Polda Metro Jaya selaku petugas *inhouse* dilaksanakan oleh Kepala Unit Pengawasan dan penjagaan (Kanit Walga), Kepala Personil sekuriti dan Protokol (Kasat Pamprot) berjenjang sampai dengan Kepala Detasemen Markas (Ka Denma) ataupun oleh dari pimpinan Polda Metro Jaya lainnya begitu juga dengan Personil sekuriti tenaga sekuriti *outsourcing* yang merupakan satuan fungsional untuk mengamankan Polda Metro Jaya sebagai subyek dari pada pelaksanaan manajemen pengamanan fisik .

Secara garis besar data pelaksanaan metode manajemen pengamanan fisik meliputi dari beberapa kegiatan berdasarkan fungsinya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian sebagaimana urutan kegiatan atau proses manajemen dalam suatu organisasi pengamanan itu berjalan.

5.1.1. Perencanaan

Secara garis besar perencanaan mengenai kebutuhan akan pengamanan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana telah disusun suatu program perencanaan oleh Denma Polda Metro Jaya sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing, antara lain sebagai berikut :

- a. Program perencanaan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan personil baik masalah penempatan personil, pendidikan dan latihan fungsi teknis dilakukan oleh Denma Polda Metro Jaya. Dengan demikian perencanaan terhadap pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dipersyaratkan telah sesuai dengan pedoman, hanya dalam pelaksanaannya berkaitan dengan perekrutan dan mutasi personil dikoordinasikan dengan bagian Biro Personalia Polda Metro Jaya.
- b. Program perencanaan yang berhubungan dengan kebutuhan peralatan elektronik maupun perlengkapan pengamanan dilakukan oleh Denma Polda Metro Jaya bersama Biro Renbang Polda Metro Jaya yang mempunyai fungsi menangani kontrak dalam hal pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perangkat *Security Elektronik Devices* untuk menunjang berjalannya peraturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebutuhan dari Denma Polda Metro Jaya yang dalam atau sesuai dengan ketentuan dan dalam pelaksanaan pengadaannya melalui laporan dan pengajuan kepada Kapolda Metro Jaya .
- c. Perencanaan yang berhubungan dengan operasional dan fungsi-fungsi peralatan keamanan (*Security Devices*) dan pengembangan sistem baik secara *hardware* dan *software* dilaksanakan oleh Denma Polda Metro Jaya sesuai dengan pedoman yang telah ada, yang dalam pelaksanaannya terkoordinasikan dengan bagian lainnya di lingkungan Polda Metro Jaya .

Hasil analisis tersebut di atas terhadap kegiatan fungsi perencanaan yang bersifat operasional yang dilakukan oleh Denma Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya yang telah berjalan sesuai dengan pedoman walaupun dalam hal pelaksanaan mengalami beberapa fase atau tahapan yang harus dilalui dengan mengikuti proses manajemen secara umum.

5.1.2. Pengorganisasian

Secara umum pengorganisasian pada Denma Polda Metro Jaya yang mengelola Satuan Tenaga Pengamanan *inhouse* dan *outsourching* masih belum memenuhi apa yang menjadi pedoman dan ketentuan yang berhubungan dengan prinsip utama dari organisasi yang baik, yaitu tidak adanya hubungan otoritas yang jelas, kesetaraan komando antara petugas sekuriti *inhouse* maupun *outsourching* serta kerja sama melalui pelatihan dan komunikasi walaupun keseluruhan proses pengelompokan tugas, adanya pendelegasian wewenang, adanya tindakan pengorganisasian yang dalam pelaksanaannya dapat tergambar ke dalam :

- a. Adanya struktur organisasi pengamanan di bawah Denma Polda Metro Jaya yang telah pula dirinci masing-masing tugas pokoknya dalam organisasi tersebut. Pembagian pekerjaan yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Ka Polda Metro Jaya .
- b. Pedoman kerja disusun masing-masing berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing personil sekuriti *inhouse* sebanyak 61 orang mengamankan seluruh kawasan Polda Metro Jaya dan satuan pengamanan *outsourching* hanya berjumlah 12 orang yang membantu pengamanan pada daerah terbatas di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya yaitu hanya pada kantor Samsat dan gedung biru direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hanya pada hari kerja.
- c. Hubungan tata cara kerja dalam pengamanan fisik di lingkungan Polda Metro Jaya khususnya yang berhubungan dengan organisasi Denma Polda Metro Jaya yang berdasarkan *job description* masing-masing.

5.1.3. Pelaksanaan

- a. Rangkaian kegiatan pengamanan fisik belum terkoordinasikan dengan dalam setiap tugas dan tanggung jawab pada masing-masing personil petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* dalam lingkup Denma Polda Metro Jaya dari mulai sistem pengamanan (*Sistem Security*), peralatan pengamanan elektronik (*Security Elektronik Devices*), pengamanan fisik (*Physical Security*) dan

- administrasi logistik (*Security Administration & Support*), karena hanya menjadi tanggung jawab dari petugas sekuriti *inhouse* saja.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pengamanan secara rutin berjalan berdasarkan standarisasi dari pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasi dan karekteristik dari masing-masing penugasan.
 - c. Penyelenggaraan tindakan pengamanan terhadap obyek-obyek pengamanan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif dan represif sebagaimana telah diuraikan di atas, dilaksanakan pada batas-batas pengamanan terhadap orang dan bangunan baik berupa sarana dan prasarana yang bersifat material maupun perangkat keras yang bersifat fisik melalui tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan pada personel petugas sekuriti (*Security Guard*) sesuai dengan fungsinya yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
 - d. Pembagian tugas berdasarkan pada *job description* masing-masing yang secara umum sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengecekan fisik pada setiap orang yang memasuki dan meninggalkan .
 - b) Melindungi dan mengamankan personel, materiil dan informasi (dokumen).
 - c) Melakukan penjagaan dengan sistem 3 shift masing-masing shift 20 orang.
 - d) Menempatkan pos-pos statis sebanyak 6 pos penjagaan ditempat/wilayah yang rawan secara selektif.
 - e) Mengadakan pencatatan terhadap setiap orang (karyawan, tamu) yang masuk dan keluar, termasuk memeriksa identitas tamu.
 - f) Melakukan hubungan antar satuan pengaman *inhouse* dan *outsourcing*, serta dengan unsur-unsur pengamanan dalam lingkungan dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

Pada pelaksanaannya dari beberapa poin mengenai *job description* di atas masih ada yang belum di laksanakan dengan baik dan benar seperti tidak melakukan pengecekan terhadap semua orang yang masuk maupun yang keluar, tidak melakukan pencatatan serta tidak ada komunikasi antar petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

5.1.4. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Untuk memperlancar dan memperkecil rentang kendali pengawasan, maka membagi area pengawasan dalam satuan kerja masing-masing.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sistem dan metoda pengamanan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing satuan pengaman *inhouse* dan *outsourching* yang dikelola oleh Denma Polda Metro Jaya .
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian melalui pelaporan bersifat tertulis dan dalam bentuk laporan lisan setiap pelaksanaan tugas pengamanan merupakan sarana pengendalian pimpinan dalam mendinamisasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para anggota pelaksana.
- d. Pengawasan dan pengendalian secara langsung di lapangan dari pimpinan secara berjenjang dari masing-masing anggota personil sekuriti fisik baik *inhouse* maupun *outsourching* yang bertanggung jawabannya kepada Kadenma Polda Metro Jaya.
- e. Penyelenggaraan kegiatan analisa dan evaluasi dari masing-masing petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan, penyempurnaan maupun pengembangan terhadap sistem dan metode pengamanan yang dilaksanakan di lingkungan.

5.2. Kondisi Ideal dan Kondisi Saat Ini Pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya

Pada bagian bab sebelumnya telah diuraikan tentang kondisi awal penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya. Hal ini dimaksudkan agar nanti didapat solusi yang terbaik oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan analisa dan pembahasan pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya, dengan melihat kondisi yang ideal/seharusnya dilaksanakan oleh petugas sekuriti dengan kenyataannya dalam satu bab pembahasan.

Penganalisaan penulis persempit dengan melihat adanya subyek pengamanan, metode yang digunakan dan obyek yang harus diamankan, agar lebih sistematis dalam penyajiannya.

5.2.1. Subyek Pengamanan (Petugas Sekuriti *Inhouse* dan *Outsourcing*)

Menurut Hadiman (2008) dalam Theodore Levitt mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok untuk menghadapi ancaman yang diperlukan adalah:

5.2.1.1. Personel

Personel yang bagus dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, antara lain :

- (1) Kualitas, idealnya lebih menekankan terhadap adanya pelatihan yang berkesinambungan, agar petugas sekuriti terlatih, sehingga dapat mengaplikasikan pengamanan untuk mencegah kerugian dari sebab apapun, kenyataannya di lapangan dari segi kualitas, petugas sekuriti yang melaksanakan tugas pengamanan di Polda Metro Jaya tidak mengetahui SOP tentang pengamanan Markas dan tidak ada pelatihan/ sosialisasi tentang SOP tersebut serta banyak anggota Sat Pamprot Denma merupakan anggota yang bermasalah baik mental maupun kepribadiannya

sehingga menimbulkan image yang negatif terhadap kesatuan Denma.

- (2) Kuantitas, berarti idealnya jumlah petugas sekuriti dibandingkan dengan area yang diamankan 10 personel melaksanakan tugas pengamanan di dalam 1 ha. Namun, pada kenyataannya jumlah personel sekuriti *inhouse* yang ada di Polda Metro Jaya ini dibagi dalam 3 shift masing-masing shift sebanyak 20 orang dan dibantu personel sekuriti *outsourcing* sebanyak 12 orang yang hanya menjaga pada gedung Samsat dan gedung biru Dit Lantas Polda Metro Jaya. Akibat dari kesenjangan tersebut, maka pelaksanaan pengamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya itu tidak berjalan secara optimal, sehingga sering terjadi tindak pidana/kejadian yang membuat mengalami kerugian. Kekurangan tenaga sekuriti disebabkan karena perbedaan penghitungan jumlah petugas pengamanan yang disediakan oleh Biro Personel Polda Metro Jaya.
- (3) Petugas sekuriti yang melaksanakan pengamanan harus mengenali wilayah tugasnya agar mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya namun pada kenyataannya walaupun petugas sekuriti mengenali wilayah tugasnya dengan baik tetap saja banyak terjadi tindak pidana pencurian di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya disebabkan keterbatasan petugas sekuriti.

5.2.1.2. Teknologi

Teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pengamanan harus tepat dan dapat membantu petugas sekuriti yang bersangkutan. Pelaksanaan pengamanan di Polda Metro Jaya dengan menggunakan teknologi tersebut berdasarkan dua komponen sistem pengamanan, yaitu sistem pengamanan manusia (dilakukan oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*) yang melaksanakan pengamanan langsung

di Polda Metro Jaya dan sistem pengamanan konstruksi (pengamanan fisik) yang dilengkapi dengan peralatan keamanan.

Faktanya di lapangan teknologi atau sistem pengamanan elektronik pada kawasan tersebut masih sangat sederhana sekali. Peralatan elektronik yang digunakan hanyalah berupa *metal detector* saja. Sementara untuk peralatan seperti CCTV masih sangat minim dan kondisi rusak sehingga tidak dapat di pergunakan. Untuk melakukan pemantauan terhadap para anggota dan masyarakat pengunjung yang keluar masuk kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya lebih banyak dilakukan dengan manual saja, yaitu dengan melakukan penggeledahan apabila dirasa ada yang mencurigakan.

Idealnya petugas sekuriti mempunyai sebuah ruang pengendalian yang dapat memantau situasi lengkap dengan komputer dan sarana lain penunjang pelaksanaan tugas. Namun pada kenyataannya ruang yang digunakan sekuriti ini sangat tidak memadai dengan tidak terdapat sarana yang dimaksud yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas pengamanan kawasan dan aset .

Idealnya pengamanan di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya sudah memakai sistem penguncian elektronik. Namun pada kenyataannya penguncian masih menggunakan gembok dan rantai yang sudah ketinggalan jaman, walaupun semua kunci dipegang oleh petugas sekuriti yang diletakkan dalam satu boks tempat penyimpanan kunci.

Idealnya setiap pos jaga yang telah dibagi menurut wilayah yang dijaga juga harus dilengkapi sarana dan peralatan yang mendukung tugas sekuriti. Peralatan yang dimilikipun sangat terbatas dan yang bersifat peralatan yang dapat melekat pada seragam petugas sekuriti saja, seperti pesawat HT dan senter saja. Kemudian untuk komunikasi tambahan yang digunakan petugas sekuriti adalah telepon genggam yang dimiliki oleh masing-masing petugas sekuriti.

5.2.1.3. Strategi

Strategi, yaitu cara yang dipakai untuk menghadapi ancaman yang dihadapi. Strategi terkait dengan kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan dihadapi dan perencanaan yang matang untuk menghadapi ancaman tersebut. Di dalamnya pula terdapat kemampuan teknis yang berisi kemampuan untuk mengenal, mengerti, memahami dan melaksanakan tugas, serta kemampuan taktis berupa pengenalan apa yang kita miliki untuk menghadapi ancaman tersebut.

Idealnya Polda Metro Jaya harus mempunyai strategi yang dijabarkan menjadi cara bertindak agar tersebut tidak mengalami kerugian dari sebab apapun. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah jumlah tenaga sekuriti baik yang berasal dari *outsourcing* maupun *inhouse*. Namun, pada kenyataannya tidak memiliki strategi ke depan untuk mengamankan kawasan nya. Hal ini dapat dilihat ketika ini petugas sekuriti *outsourcing* hanya berjumlah 12 orang saja. Kemudian petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* seharusnya diberi tanggung jawab untuk memegang kunci-kunci yang ada, sehingga Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dapat melakukan pengawasan terkait dengan rencana pengamanan dengan mempertimbangkan dua periode pengawasan yaitu ketika area digunakan dan ketika area tidak digunakan. Namun pada kenyataannya hanya kunci-kunci tertentu saja yang dipegang petugas pengaman *inhouse* dan *outsourcing*, seperti ruangan kantor dan ruang/gedung petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* tidak memegang kuncinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk kasus-kasus yang terjadi permasalahannya terletak pada masalah manajemen, sebab sekuriti itu tidak ada 100% yang *secure*. Secanggih apapun teknologi dan peralatan yang digunakan, jika manajemennya berjalan tidak bagus akan tetap saja terjadi tindak pidana pencurian atau dengan kata lain, secanggih apapun sarana dan prasarana keamanan yang cukup, jika manajemen tidak bisa mengelola keamanan dengan baik, akan tetap saja akan tergolong rawan.

5.2.2. Metode Pengamanan

Metode pengamanan Polda Metro Jaya berdasarkan pada 2 komponen sistem pengamanan dengan melaksanakan pola pengamanan oleh manusia (petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*) dan pola pengamanan konstruksi (sekuriti fisik).

Pengamanan oleh manusia dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajerial, yaitu dengan cara melihat fungsi-fungsi manajemen di dalam proses pencapaian tujuan dengan menggerakkan orang lain sudah berjalan atau belum dan dikaitkan dengan aspek hukumnya.

Analisa manajemen sekuriti fisik yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya dilakukan dengan mengacu pada definisi manajemen sekuriti fisik di atas, juga didasarkan pada Teori *Situasional Crime Prevention* yang dikemukakan oleh Clarke. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen sekuriti fisik Polda Metro Jaya terkait dengan standar sekuriti fisik yang sudah baku dapat dilihat dalam bahasan di bawah ini.

5.3. Analisa Petugas Sekuriti *Inhouse* dan *Outsourcing* Ditinjau dari Konsep Pencegahan Kejahatan Situasional

Dalam bahasan ini dianalisa tentang pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya dilakukan dengan mengacu pada Teori *Situasional Crime Prevention* yang dikemukakan oleh Clarke.

Keberadaan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam suatu kawasan juga termasuk bentuk upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke dengan langkah pengawasan pintu ke luar (*screen exits*), memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*) dan menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*).

- (1) Pengawasan pintu ke luar (*screen exits*). Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* berkewajiban mengawasi pintu masuk/ke luar kawasan. Dalam pelaksanaan mengawasi juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain seperti memeriksa orang, dan barang yang masuk dalam kawasan Polda Metro Jaya, serta menanyakan identitas serta keperluan orang yang ingin masuk ke dalam kawasan Polda Metro Jaya. Pekerjaan ini

membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang baik dan akan lebih mudah dilakukan apabila Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching*nya berusia muda, berlatar belakang pendidikan cukup (paling rendah SMA atau sederajat) dan mempunyai pendidikan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* bersertifikat. Penulis melihat bahwa petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* yang bertugas di Polda Metro Jaya ini pada umumnya masih berusia muda, dan walaupun ada yang berusia tua, namun tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas pengamanan kawasan Polda Metro Jaya.

- (2) Memperluas pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*). Pengawasan formal memang merupakan tugas Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* di lingkungan Mapolda demi terciptanya suasana aman, di mana tidak kehilangan asetnya.
- (3) Menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan (*deflect offender*). Keberadaan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* di Polda Metro Jaya akan menyebabkan pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Hal ini tentu saja dapat menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan akan malakukan kejahatan dengan memilih terlebih dahulu tingkat keamanannya yang longgar pada suatu kawasan yang akan dijadikannya sebagai sasaran. Oleh sebab itu diperlukan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* yang bertugas yang dapat bersikap tegas, bermental baik, profesional dan memiliki latar belakang yang baik dari segi pendidikan, sudah pernah mengikuti pelatihan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* dan memiliki latar belakang bela diri.

5.4. Analisa Petugas Sekuriti *Inhouse* dan *Outsourching* Ditinjau dari Konsep Manajemen

Stoner dan Wankel (1986) menyatakan bahwa Manajemen sebagai suatu proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Proses ini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan.

- (1) Dalam membuat suatu perencanaan, dapat diartikan bahwa peran manajer sangat penting dalam memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Peran suatu rencana yaitu mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Pembagian petugas sekuriti *inhouse* ke dalam 3 *shift*, sistem administrasi yang diwujudkan dalam pengisian buku mutasi, sarana dan prasarana penunjang tugas masuk ke dalam fungsi perencanaan ini. Dari jumlah petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang ada saat ini dirasakan masih kurang jumlahnya dibanding dengan luas areal kawasan yang harus diamankan. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada di pos-pos pintu masuk dan keluar kawasan juga dirasakan kurang dalam menunjang tugas. Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang ada tidak dibekali dengan perlengkapan dasar petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* seperti tongkat, dan borgol maupun fasilitas kendaraan roda dua secara lengkap. Demikian juga dalam hal patroli, Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* melaksanakan tugas dengan berjalan kaki pada sekitar kawasan, dan dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat untuk patroli dalam kawasan. Dalam hal sistem penjagaan keluar/masuk orang maupun barang ke dalam kawasan pada pos-pos penjagaan, masih belum dilaksanakan secara optimal. Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang ada pada pos-pos pintu masuk dalam melaksanakan tugasnya hanya sekedar melihat, dan mengamati orang, dan barang yang masuk ke dalam kawasan. Kadangkala pada pos tidak ditemukan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang jaga pada saat itu. Hal ini karena tidak ada ketentuan dari manajemen untuk melakukan tindakan lain terhadap orang maupun barang yang masuk ke dalam kawasan, sehingga terkesan tidak ada beban dari petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* tersebut dalam bertugas. Dalam pos tertentu

yang merupakan tempat keluar/masuknya kendaraan dan orang ini. Setiap orang maupun barang yang akan masuk ke dalam kawasan akan diperiksa dan di beri kartu tanda masuk serta harus meninggalkan KTP atau identitas lainnya. Hal ini tentunya sebagai upaya dalam mencegah kejahatan yang terjadi di dalam kawasan tersebut.

- (2) Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Pembagian kerja merupakan pemecahan suatu tugas kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dikerjakannya. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Secara struktur organisasi, sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas, khususnya dalam struktur organisasi petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*. Namun secara organisasi masih ada sedikit permasalahan, dimana terdapat perbedaan jumlah petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang berada dalam tiap-tiap pos penjagaan yang ada. Pada pos-pos yang dinilai mempunyai banyak kegiatan baik yang menyangkut pada masalah kinerja pelayanan terhadap masyarakat maupun keluar/masuknya orang ke/dari dijaga oleh 4-5 personel, sedangkan dalam pos yang tidak banyak kegiatan dijaga oleh \pm 2 personel. Pembagian tugas merupakan bagian dari fungsi pelaksanaan. Dalam hal pembagian tugas, sudah dilaksanakan oleh pihak dengan baik dengan adanya *job description* pada masing-masing jabatan. Memang dalam buku petunjuk SOP yang tidak dimiliki oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*, masing-masing pos telah diatur apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Namun dikarenakan jumlah petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang terbatas, maka masih terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan tugas. Standarisasi kegiatan merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian juga. Rute patroli yang

teratur adalah merupakan jenis standarisasi kegiatan yang baik dan harus dilaksanakan oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* ketika mereka melaksanakan tugas. Demikian halnya juga dengan tugas, dan jumlah personel dalam melaksanakan patroli juga sudah mempunyai standarisasi kegiatan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan, terdapat pengaturan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para anggota/pelaksana dapat bekerja dengan cara-cara yang telah ditetapkan yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua kegiatan pelaksanaan tugas petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam kawasan, yaitu patroli dan penjagaan. Terhadap pelaksanaan tugas patroli dapat membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali, jika ingin memasuki kawasan , dikarenakan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* nya yang terus berpatroli setiap dua jam sekali. Akan tetapi bagi penjahat yang mengerti akan pergerakan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* ini, tentunya mereka dapat bertindak lebih cerdik, dengan bergerak setelah patroli dilaksanakan, karena setelah patroli Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* akan *stand by* lagi di posnya masing-masing. Penulis berpendapat bahwa akan lebih efektif lagi jika tugas patroli diemban oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang berada dalam pos-pos yang ada dalam kawasan, dan memperketat penjagaan pintu masuk menuju kawasan Polda Metro Jaya.
- (4) Dalam hal pengendalian, manajer memastikan bahwa tindakan dan pekerjaan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terlalu jauh menyimpang dari tujuannya. Pengendalian dilakukan oleh Kadenma Polda Metro Jaya yang dibantu oleh Kasat Pamprot berjenjang sampai Kanit Walga dan para Danru dengan menggunakan HT. Jumlah HT yang ada masih dirasakan kurang. Idealnya para personel sekuriti dibekali dengan HT. Apel juga termasuk salah satu fungsi pengendalian. Idealnya serah

terima tugas jaga dilaksanakan secara formal, sehingga para petugas sekuriti dapat mengetahui perkembangan situasi yang ada dan juga Komandan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dapat memberikan atensi terhadap hal-hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal penjagaan, terdapat hal-hal yang menunjang pelaksanaan tugas antara lain : jumlah personel, pendidikan, ketrampilan teknis yang dimiliki, sifat dan karakter personel, sarana dan peralatan penunjang pelaksanaan tugas dan faktor-faktor lainnya. Karakteristik kepribadian Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* adalah juga hal terpenting penunjang tugas. Karakteristik ini dapat dilihat dari perbedaan perlakuan antara petugas sekuriti *inhouse* yang dikelola oleh Denma dan petugas sekuriti *outsourcing* yang dikelola oleh PT. Mitra Mandiri. Petugas sekuriti *outsourcing* yang dikelola oleh PT. Mitra Mandiri lebih semangat dalam pelaksanaan tugas dibanding dengan petugas sekuriti *inhouse* yang dikelola oleh Denma Polda Metro Jaya.

5.5. Analisa Petugas Sekuriti *Inhouse* dan *Outsourcing* Ditinjau dari Konsep Sekuriti Fisik

Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa "*As important as hardware system are to protection of critical assets, the essential element in any and every maximum security environment is the security officer. Their basic qualifications are suitability, physical and mental qualifications, screening, and training*", yang terjemahannya adalah sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting. Elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan.

Dalam hal kepatutan, telah terdapat keberhasilan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam memelihara keamanan pada kawasan Polda Metro Jaya dengan terbukti dari beberapa pengungkapan kasus kriminalitas dalam kawasan Polda Metro Jaya. Di sisi lain dengan masih ditemukan kasus kriminalitas di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya yang pada umumnya berupa kasus

pencurian membuktikan bahwa pengamanan fisik pada kawasan tersebut perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya masih adanya petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang mangkir dalam menjalankan tugasnya adalah wujud dari rendahnya mental petugas sekuriti tersebut.

Dalam hal fisik, Kadenma Polda Metro Jaya tidak pernah membina fisik petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*-nya. Pembinaan fisik dilakukan oleh masing-masing petugas sekuriti, dan tidak ada jadwal secara khusus yang mengatur petugas sekuriti dalam membina fisiknya. Dalam hal pelatihan ketrampilan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*, keseluruhan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* telah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dan telah bersertifikasi.

a. Akses Kontrol

Akses kontrol yang ada pada Polda Metro Jaya dalam Teori Upaya Pencegahan Kejahatan Situasional Clarke merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) dengan langkah mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*), sedangkan bila ditinjau dan sekuriti fisik akses kontrol juga merupakan salah satu bentuk pengamanan fisik.

Kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya yang memiliki 2 akses kontrol yang merupakan akses masuk maupun keluar kawasan tersebut. Akses kontrol yang pertama terdapat pada pos yang menghadap jalan Gatot Subroto, akses kontrol ini selalu terbuka (24 jam), sekalipun kegiatan di Polda Metro Jaya telah usai. Akses kontrol ini juga digunakan sebagai akses kontrol kendaraan roda 2 dan roda 4 yang akan masuk kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya, maka petugas sekuriti akan melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan yang digunakan oleh tamu tersebut. Petugas sekuriti *inhouse* yang bertugas diwajibkan untuk menanyakan identitas orang dan meninggalkan kartu identitas orang yang ingin masuk kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya. Begitu juga dengan kendaraan yang masuk khususnya kendaraan barang wajib dilakukan pemeriksaan terhadap

barang bawaannya, menanyakan maksud dan tujuan kedatangan, dan selanjutnya memberikan kartu tamu terhadap orang yang masuk kawasan Polda Metro Jaya. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak terdapat masalah, selanjutnya petugas sekuriti *inhouse* menunjukkan tempat yang dituju dan mengawasinya.

Akses kontrol adalah akses keluar/masuknya orang-orang dan kendaraan yang dijaga oleh penjaga pelindung areal yang melakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual terhadap keluar masuknya orang-orang dan kendaraan.

Pada kantor posko petugas sekuriti *inhouse* pada Polda Metro Jaya yang juga merupakan akses kontrol, para petugas sekuriti *inhouse* melakukan proses identifikasi dan pengendalian. Hal ini sesuai dengan konsep akses kontrol. Pengendalian dilakukan dengan menanyakan maksud kedatangan tamu yang datang dan menghubungkannya kepada pihak yang dituju. Akses kontrol pada posko adalah posko juga menjalankan fungsinya sebagaimana akses kontrol yang sesungguhnya. Orang yang datang ke kantor Posko umumnya adalah orang yang tidak tahu jalan menuju tempat yang ingin dicari. Artinya adalah tidak semua orang diwajibkan untuk datang ke posko untuk dilakukan pemeriksaan. Pembinaan yang perlu dilakukan pada akses kontrol Posko adalah menjadikan posko sebagai pusat pelaporan, pusat informasi, maupun pusat keamanan dalam kawasan Polda Metro Jaya. Sebagai pusat pelaporan artinya posko diharapkan dapat menampung setiap laporan yang berasal dari pos-pos jaga lain yang ada ke posko. Pos-pos wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap hari kepada posko. Sebagai pusat informasi adalah melayani setiap tamu yang ingin berkunjung ke dalam kawasan Polda Metro Jaya dengan memberikan informasi terhadap tempat yang ingin dituju.

Pengunjung yang ingin berkunjung ke Polda Metro Jaya bisa mendapatkan informasi yang jelas terhadap tempat yang ingin dituju. Sebagai pusat keamanan artinya adalah sebagai kantor pusat sekuriti, dimana pada tempat ini selain sebagai tempat berkumpul/apel bagi semua

personel sekuriti sebelum bertugas pada pos-pos jaga yang telah ditentukan dalam kawasan, dan sebagai tempat kantor pejabat sekuriti pada kawasan juga diharapkan dalam posko ini adalah tingkat pengamanannya lebih dibanding pada pos-pos lainnya. Pengunjung yang ingin berkunjung ke dalam kawasan adalah benar-benar orang yang ingin berkunjung, dan bukan sebaliknya melakukan kejahatan dalam kawasan itu, sehingga seharusnya orang-orang yang ada dalam baik itu anggota dan pengunjung lain harus terdata dengan baik pada posko maupun pos-pos yang ada. Kenyataan yang ada adalah setiap orang maupun barang yang akan masuk dalam kawasan melalui pos jaga I, II, III maupun yang langsung datang ke kantor posko selalu dilakukan pemeriksaan barang yang mau masuk saja. Untuk pemeriksaan fisik kepada orang yang berkunjung, tidak selalu dilakukan. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai saja walaupun sangat jarang dilakukan pemeriksaan tersebut.

b. Penghalang

Barrier yang ada mengitari dalam teori upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) dengan langkah mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*).

Barrier pada kawasan Polda Metro Jaya tidak dilengkapi dengan *barrier* atau penghalang fisik permanen hanya *barrier* yang berupa pagar kawat berduri yang di pasang sepanjang gerbang utama pada saat adanya demonstrasi yang berguna untuk menghalangi masa pengunjung rasa yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kawasan Mapolda.

Barrier adalah halangan yang dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis dan penghalang jarak. Penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan *barrier* seperti kawat berduri yang mengelilingi kawasan tersebut dapat menghambat pelaku kejahatan dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan/berniat jahat mengurungkan niat mereka untuk memasuki kawasan, akan tetapi

tidak semua kawasan dikelilingi oleh kawat berduri, sehingga tetap potensial untuk membuat pelaku kejahatan dengan bebas memasuki kawasan Polda Metro Jaya dengan cara melompat tembok ataupun melalui pintu masuk.

c. Pagar

Pagar yang ada mengitari kawasan Polda Metro Jaya dalam Teori Upaya Pencegahan Kejahatan Situasional Clarke merupakan pengendalian akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*), sedangkan bila ditinjau dari sekuriti fisik pagar termasuk pengamanan perimeter berupa *fences*.

Pagar sebagaimana diuraikan pada bab 4, pagar pada kawasan Polda Metro Jaya mempunyai tiga bagian pokok, yaitu pagar sendiri yang terbuat dari batako putih di ujungnya di tambahi besi tajam, kecuali untuk sisi wilayah pagar di selatan yang berbatasan dengan jalan raya Sudirman yang hanya menggunakan pagar berbahan jenis besi biasa dengan ketinggian tidak lebih dari 1 meter yang tidak memenuhi standar dengan pertimbangan keamanan sehingga masih memungkinkan orang luar dapat dengan mudah masuk ke markas komando Polda Metro Jaya dengan cara melompati pagar tersebut.

Idealnya, pagar merupakan baris pertahanan pertama areal dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilengkapi dengan personel sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan bentuk pengamanan fisik lainnya yang secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah seperti pencurian dan sifat pengrusakan ke dan dari fasilitas. Fungsi pagar adalah pengendalian akses ke dalam fasilitas. Adapun bentuk pagar yang direkomendasikan pagar dengan ketinggian sekitar 8 kaki atau 2,5 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dengan bagian atasnya berbentuk huruf "v" dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri.

Kondisi pagar yang ada di Kawasan Polda Metro Jaya, sebagian besar telah sesuai dengan konsep pagar yang ada. Idealnya kegunaan pagar adalah untuk menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas.

Aplikasi pagar yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya belum sampai pada taraf konsep yang disebutkan di atas, sehingga masih ada beberapa “jalan tikus” yang kemungkinan dapat dilalui orang-orang untuk masuk ke dalam kawasan dan sebaliknya.

Fungsi pagar adalah pengendalian akses ke dalam fasilitas. Bila demikian maka seharusnya dengan adanya pagar tersebut fasilitas dapat dikatakan aman dikarenakan aksesnya dibatasi. Kenyataan yang ada adalah pagar itu sendiri banyak yang rusak, maka justru dari pagar itu sendiri pihak luar dapat memasuki fasilitas dalam kawasan .

Pagar merupakan satu halangan perimeter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas. Dengan bentuk pagar yang terlihat “seadanya”, maka tidak mungkin dapat menghalangi pihak yang tidak berkepentingan keluar/masuk dengan tidak sah secara fisik dan psikologis. Pagar yang dibangun oleh Polda Metro Jaya sebagian besar sudah masuk ke dalam 3 kriteria pagar yang dikonsepsikan oleh Ricks, Idealnya tinggi pagar adalah sekitar 8 kaki atau 2,5 meter.

d. Kunci

Kunci yang ada dalam lingkungan termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap mempersulit upaya (*increase the effort*) yang merupakan langkah memperkuat sasaran (*target harden*), dengan cara melakukan penguncian pada ruangan-ruangan tertentu pada kawasan. Kunci juga merupakan upaya sekuriti fisik guna mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun.

Sedangkan sistem penguncian yang digunakan oleh Markas Komando Polda Metro Jaya untuk mengunci semua pintu pagar dan palang besi dengan menggunakan rantai dan gembok. Cara sistem penguncian seperti itu masih sangat sederhana dan ketinggalan jaman (masih tradisional). Kemudian untuk kunci gedung-gedung tertentu tidak pernah terkunci sehingga orang dapat memasuki gedung tersebut dengan leluasa pada waktu kapan pun. Sedangkan beberapa gedung kunci

dipegang oleh pejabat terkait seperti gudang senjata dan brangkas bendahara satuan masing-masing.

Kunci merupakan bagian dan perencanaan sekuriti fisik dan mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Adapun kriteria kunci adalah mudah digunakan, dapat digunakan berulang kali dan mempunyai level berbeda tergantung standar sekuriti sesuai dengan kebutuhan dan lokasi (Mc Crie, 2001). Analisa penulis terhadap sistem kunci yang ada di adalah kunci yang ada mudah digunakan, dapat digunakan berulang kali, namun mudah dirusak oleh pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan menggunakan kunci yang dijual bebas di pasaran yang standar pembuatan kuncinya sangat sederhana. Terkait adanya akses kontrol ke dalam kawasan yang tidak dikunci seperti pada bagian lainnya, hal ini dikarenakan adanya Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* yang menjaga pos-pos akses kontrol tersebut. Penulis berpendapat bahwa seharusnya akses kontrol yang ada dalam kawasan harus terkunci sekalipun ada atau tidaknya kegiatan di kawasan Polda Metro Jaya. Kemampuan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching* dalam memonitor, dan mengawasi lalu-lintas orang dan barang yang masuk maupun ke luar kawasan sangatlah terbatas khususnya pada malam hari. Untuk itu diperlukan alat penunjang tugasnya yang berupa kunci, dan gembok.

e. Penerangan

Lampu penerangan yang ada di termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap mempersulit upaya (*increase she effort*) yang merupakan langkah memperkuat sasaran (*target harden*), dengan cara melengkapi penerangan pada areal.

Penulis melihat bahwa sistem penerangan listrik yang digunakan Markas Komando Polda Metro Jaya masih menggunakan sistem pengamanan lampu standar. Penerangan listrik digunakan dari malam sampai pagi hari mulai pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, dengan menggunakan jasa dari PLN. Namun untuk alasan efisiensi

beberapa lampu hanya dinyalakan seperlunya, cukup untuk tidak membuat tempat tersebut gelap gulita. Selama penelitian dilakukan, penerangan di areal dinilai mencukupi dengan jarak pandang yang jelas disetiap area maupun sudut. Untuk beberapa kawasan yang cukup rawan seperti sepanjang wilayah selatan dan Pos III yang orang luar dapat mudah masuk terlihat tidak cukup penerangannya hanya gedung utama, dan ruang tahanan yang penerangannya cukup.

Penulis melihat bahwa masih banyak areal Markas Komando Polda Metro Jaya yang tidak mendapatkan penerangan yang cukup. Adapun areal yang tidak mendapatkan penerangan meliputi di sepanjang tembok pembatas yang menghadap jalan Sudirman dan pada lahan-lahan parkir kendaraan roda empat. Hal ini sangat rawan bagi masuknya pelaku kejahatan ke bagian ini. Keberadaan pagar yang mengalami banyak kerusakan ditambah tidak adanya penerangan di beberapa sisi pada kawasan akan memudahkan bagian ini ditembus oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk dan mencuri aset-aset milik Polda Metro Jaya pada malam hari.

f. Pos Jaga

Pos-pos jaga yang ada di Markas Komando Polda metro Jaya termasuk salah satu upaya pencegahan kejahatan situasional Clarke yang merupakan tahap meningkatkan resiko (*increase the risk*) dengan langkah memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*). Dengan adanya pos-pos jaga pada kawasan, maka pengawasan formal dapat dilakukan oleh Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* di pos-pos jaga tersebut.

Pos jaga merupakan tempat bagi para anggota petugas sekuriti *inhouse* dalam melakukan tugas penjagaan dan pengawasan pada kawasan Polda Metro Jaya. Keberadaan pos jaga dipandang mutlak harus ada demi menunjang tugas personel sekuriti *inhouse*. Pos jaga selain menjadi pos penjagaan, juga menjadikan tempat berlindung Petugas sekuriti *inhouse* dari keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Dikarenakan keberadaannya yang vital guna menunjang pelaksanaan tugas, maka

tentunya pos jaga harus dilengkapi dengan peralatan penunjang tugas seperti alat komunikasi, tongkat, borgol, perlengkapan P3K, lampu senter, tabung pemadam kebakaran dan peralatan penunjang tugas lainnya. Terkait dengan hal tersebut, penulis menganalisa bahwa dari 6 pos jaga yang ada pada kawasan Polda Metro Jaya. Semuanya sudah hampir mendekati sesuai dengan ketentuan standar yang ada. Di pos-pos tersebut terdapat alat komunikasi, tongkat, borgol, perlengkapan P3K, lampu senter, tabung pemadam kebakaran sampai kepada dispenser yang menyediakan air minum bagi petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*. Keberadaan peralatan penunjang tugas ini tentunya sangat membantu tugas petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*.

Penulis mengamati bahwa rata-rata semua pos jaga yang ada pada kawasan hanya bersifat statis, artinya adalah personel sekuriti *inhouse* yang ada di pos hanya melakukan penjagaan pada pos tersebut, tanpa ada dilakukan kegiatan lainnya seperti patroli maupun pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk.

g. Alat Komunikasi

Alat komunikasi yang ada pada kawasan selain telepon yang ada di pos jaga, juga terdapat HT pada masing-masing pos yang digunakan untuk mengetahui situasi sekaligus sebagai sarana komunikasi.

Alat komunikasi yang digunakan petugas sekuriti *inhouse* termasuk salah satu Upaya Pencegahan Kejahatan Situasional Clarke yang merupakan tahap mempersulit upaya kejahatan (*increase the effort*) dengan langkah memperkuat sasaran (*target harden*). Dengan adanya sarana komunikasi, bisa berupa telepon maupun HT (*handy talkie*) yang dipegang dan digunakan oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*, maka hal ini sama saja dengan memperkuat sasaran kejahatan, dimana standar keamanan gedung mengalami peningkatan, karena dengan adanya HT maka petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang bertugas di pos-pos yang berlainan akan tetap saling terhubung dan mengkomunikasikan situasi dan kondisi lingkungannya kepada rekan sekerja ataupun atasannya.

Alat komunikasi yang digunakan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* juga termasuk salah satu upaya mewujudkan manajemen sekuriti fisik. Dalam hal komunikasi (Mc Crie, 2001), operasi sekuriti yang efektif harus mengizinkan komunikasi diantara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang lain pada saat kondisi normal, komunikasi akan meningkat jika keadaan bersifat darurat.

Idealnya menurut pandangan Mc Crie tentang alat komunikasi di atas, maka penulis memandang telah berupaya mewujudkan manajemen sekuriti fisik dimana telah menyediakan sarana komunikasi berupa pesawat telepon di beberapa pos jaga dan HT yang dialokasikan pada tiap pos ditambah HT untuk komandan regu, namun belum diberikan secara keseluruhan kepada masing-masing personel sekuriti baik *inhouse* maupun *outsourcing*. Alat komunikasi HT yang sering digunakan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dapat digunakan untuk media komunikasi antara komandan petugas sekuriti *inhouse*, danru dan petugas sekuriti *inhouse* di pos-pos jaga yang telah ditentukan. Namun hal ini juga menurut penulis masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya, dikarenakan penggunaan HT masih jarang sekali digunakan oleh anggota petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang berdinias.

h. Lahan Parkir

Idealnya area yang digunakan sebagai lahan parkir yang memadai bagi semua kendaraan yang memasuki kawasan Polda Metro Jaya. Dalam penggunaan lahan parkir dibedakan antara lahan parkir kendaraan bagi anggota, dan bagi tamu atau masyarakat pengunjung yang datang, serta pengelompokan kendaraan menurut jenisnya, yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4, sehingga terlihat baik dan tertib. Hal ini juga membantu memudahkan petugas sekuriti *inhouse* untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang berada di area parkir. Pada kenyataannya, lahan parkir di kawasan Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan peruntukannya bagi parkir kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak ada penempatan petugas khusus di area parkir yang bertugas untuk mengarahkan dan mengatur parkir kendaraan. Selain itu juga banyak

kendaraan yang parkir tidak teratur sehingga mengganggu kendaraan lain yang akan parkir di lokasi tersebut. Dan sering kali menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Markas Komando Polda Metro Jaya.

5.5.1. Obyek Pengamanan

Obyek pengamanan dalam tulisan ini adalah Markas Komando Polda Metro Jaya, apabila dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh Polda Metro Jaya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pengamanan, antara lain :

- a. Ada beberapa obyek pengamanan berupa kawasan Polda Metro Jaya yang harus steril dari orang-orang (khususnya anggota dan tamu) seperti gudang penyimpanan senjata dan amunisi dan lain-lain.
- b. Menurut Richard J. Gigliotti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2008), yang membagi level upaya sekuriti menjadi 5 level, antara lain :
 - 1) Level 1 disebut *minimum security* dengan kelengkapan *simple physical barrier* dan *simple lock*;
 - 2) Level 2 disebut *low level security* dengan kelengkapan *basic local alarm security, simple security lighting, basic security physical barrier, high security locks*;
 - 3) Level 3 adalah *medium security* dengan kelengkapan *advance remote alarm system. high security physical barrier at perimeter, guard dogs, watchmen with basic communication*;
 - 4) Level 4 adalah *high level security* dengan kelengkapan *CCTV. perimeter alarm system, highly trained alarm guards with advance communication. access controls, high security lighting, local law enforcement coordination. formal contingency plans*;
 - 5) Level 5 adalah *maximum security* dengan kelengkapan *on site armed response force dan sophisticated alarm system*.

Sekuriti fisik yang diaplikasikan di Polda Metro Jaya meliputi pendayagunaan tenaga petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourching*, penggunaan akses kontrol di dua pintu masuk/keluar kawasan, penerapan *barrier* penghalang di sekeliling, pemagaran keliling walaupun tidak sesuai standar konsep pagar menurut konsep sekuriti fisik, penggunaan kunci, lampu penerangan kawasan, adanya pos-pos jaga dan peralatan komunikasi. Hal ini semuanya diaplikasikan pada lingkungan, walaupun tidak maksimal dan sesuai standar ukuran sekuriti fisik. Dengan adanya bentuk-bentuk sekuriti fisik tersebut penulis menganalisa bahwa manajemen sekuriti fisik yang diaplikasikan di Polda Metro Jaya sesuai dengan pendapat Gigliotti dan Jason merupakan upaya sekuriti tingkat 3 yaitu tingkat *medium security*, namun ada kekurangannya berupa tidak adanya *advance remote alarm system* dan *guard dogs*. Adapun kelebihanannya adalah adanya akses kontrol pada lingkungan yang sebenarnya termasuk dalam kategori tingkat 4 yaitu *high level security*, karena level ini dibuat dan merupakan urutan dan tingkatan, maka level 3 atau upaya sekuriti tingkatan *medium security* sudah mencakup upaya sekuriti level I (*minimum security*) dan level 2 (*low level security*). Kegunaannya selain untuk menghalangi merintangi, mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak syah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase, juga dirancang untuk menghalangi/merintangi beberapa gangguan aktivitas dan luar yang tidak sah.

- c. Pengamanan obyek secara fisik juga harus dilengkapi dengan *hydran* tempat air guna memadamkan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dalam menghadapi kebakaran Markas Komando Polda Metro Jaya tidak memiliki *fire station* dan juga tidak dilengkapi unit mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan sebanyak 10 buah berada pada masing-masing gedung dan *hydran* air sebanyak 2 buah dalam kondisi rusak dan tidak dapat di

pergunakan. Berdasarkan pengamatan peneliti apabila terjadi bencana kebakaran maka akan terjadi kekacauan dan masing-masing petugas tidak mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan. Idealnya, instansi sebesar Polda Metro Jaya setidaknya menyediakan mobil kebakaran yang *stand by* di tempat dan *fire station*.

- d. Polda Metro Jaya idealnya dilengkapi dengan alat-alat pengamanan canggih seperti pendeteksi logam dan lain sebagainya. Pada kenyataannya Polda Metro Jaya telah menggunakan *stick mirror* dan *metal detector*. Hal ini menunjukkan bahwa perwujudan aspek sekuriti di lingkungan sudah cukup baik. Hal ini tentunya akan menjadi dasar bagi pimpinan untuk dapat membuat suatu rancang bangunan yang dapat dipandang dari sekuriti fisik dapat menghalangi orang luar yang tidak berkepentingan masuk ke dalam fasilitas, sehingga akan dapat mencegah hilangnya aset. Bila langkah ini yang mereka ambil, tentunya mereka membangun pagar keliling lingkungan sesuai dengan konsep *fences* yang benar, mereka membuat *barrier* yang benar-benar dapat menghalangi pihak luar masuk ke dalam fasilitas, benar-benar mengaplikasikan bagaimana pelaksanaan akses kontrol yang sesuai dengan konsep akses kontrol, mengaplikasikan sistem kunci yang sesuai dengan standar kunci, melengkapi penerangan yang ada di kawasan , mengamati berapa pos jaga yang harus diadakan yang sesuai dengan luas areal, memperkirakan dan mengadakan berapa jumlah personel sekuriti yang seharusnya bertugas, berapa alat komunikasi yang dibutuhkan guna menunjang tugas pengamanan, bahkan kalau perlu melengkapi lingkungan usaha dengan anjing penjaga dan bantuan alat-alat elektronik penunjang tugas petugas sekuriti seperti *metal detector*, alarm sampai kepada *CCTV*. Kebalikannya dari itu semua adalah para pimpinan dapat juga mengambil kebijakan yang sebaliknya, dimana pada saat mereka acuh bahkan tidak tahu keberadaan akan pentingnya sekuriti yang dapat

menunjang peningkatan kinerja terhadap pelayanan masyarakat. Bila mendapatkan pimpinan yang model seperti ini, maka akan terjadi proses pembiaran, seperti pagar yang dibuat tidak sesuai standar sekuriti fisik, *barrier* yang dibuat asal-asalan atau bahkan tidak dibuat sama sekali, akses kontrol yang mudah ditembus, banyaknya ruangan yang tidak terkunci, banyaknya lingkungan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas penerangan, pos jaga yang dirasakan kurang dalam segi jumlah dan sarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada di dalamnya, personel sekuriti yang kurang dalam hal jumlah dan kecakapan yang dimiliki, tidak adanya atau kurangnya alat komunikasi penunjang tugas tenaga sekuriti dan sektor sekuriti fisik lainnya yang masih dirasakan sangat minim. Semua bergantung pada banyak faktor antara lain persepsi tentang sekuriti para pengambil kebijakan dan anggaran. Tetapi yang lebih penting adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan, karena bicara sekuriti tidak selalu mengarah kepada *cost*. Banyak hal yang dapat diakali oleh para pimpinan selaku pengambil kebijakan guna mewujudkan lingkungan yang aman.

- e. Idealnya pengamanan sebesar Polda Metro Jaya menggunakan anjing penjaga (*guard dogs*) untuk membantu petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* melaksanakan pengamanan sehari-hari guna mencegah kerugian dari sebab apapun. Kenyataan yang ada, tidak memiliki anjing penjaga

5.5.2. Analisa Resiko Keamanan di Polda Metro Jaya

Salah satu tindakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan untuk bahaya keamanan fisik di Polda Metro Jaya adalah dengan mengetahui resiko keamanan yang terjadi di tersebut. Resiko keamanan fisik meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

5.5.2.1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan berkaitan erat dengan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan Polda Metro Jaya didirikan sebagai langkah awal

pengamanan aset-aset. Penerapan keamanan fisik harus memperhatikan faktor lingkungan dan menerapkan kontrol keamanan lingkungan.

Bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun setidaknya kita dapat mengantisipasi untuk mengurangi resiko dan kerugian yang disebabkan bencana alam tersebut. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, misalnya dengan membuat konstruksi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap gempa, membuat alarm tanda bahaya. Atau dengan kata lain, antisipasi terhadap bencana alam, kebakaran dan gempa bumi tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pengamanan fisik. Oleh karena itu, keamanan fisik dan keamanan aset-aset adalah hal yang tidak dapat ditawar.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan di Polda Metro Jaya meliputi beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan Polda Metro Jaya, contohnya adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat dan dari tindak pidana pencurian.
- b. Faktor Internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam, antara lain :
 - Luas area Polda Metro Jaya tidak sebanding dengan jumlah petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang ada.
 - Sarana dan prasarana pendukung tugas pengamanan yang tidak memadai, seperti sarana alat komunikasi, CCTV dan lain sebagainya.
 - Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota/karyawan Polda Metro Jaya sendiri.

5.5.2.2. Faktor Manusia

Manusia merupakan faktor penting dalam keamanan fisik. Eksploitasi keamanan terhadap aset-aset Polda Metro Jaya kebanyakan dilakukan oleh manusia. Jika menganggap bahwa seseorang yang tidak sah tak mungkin masuk ke kawasan adalah suatu anggapan yang salah. Hal ini dapat menjadi ancaman terbesar bagi pihak. Namun demikian, pihak tidak hanya memperhatikan eksploitasi keamanan oleh orang dari luar, namun harus peduli dengan orang yang berasal dari dalam juga. Hal ini dimungkinkan menjadi ancaman terbesar karena orang yang berasal dari dalam, biasanya lebih mengetahui dan mengenal dibandingkan penyusup yang berasal dari luar.

Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan zona keamanan atau ring pada kawasan Polda Metro Jaya. Cara ini dilakukan untuk membatasi masuknya orang ke dalam kawasan tertentu atau fasilitas vital lainnya dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Hendaknya dalam setiap zona atau ring yang dibuat, diterapkan kebijakan keamanan yang berbeda, keberadaan pos jaga, sarana dan prasarana yang berasal dari teknologi yang canggih dan lain-lain yang digunakan untuk pengamanan fisik.

5.5.2.3. Faktor Finansial

Untuk mengimplementasikan keamanan fisik yang terintegrasi di Polda Metro Jaya, diperlukan investasi yang tidak sedikit. Namun terkadang karena alasan keuangan, pengimplementasian keamanan fisik tidak jadi dilakukan. Jika pihak pimpinan Polda Metro Jaya mengabaikan hal tersebut, bisa jadi tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang benar. Namun pandangan yang demikian adalah salah, sebab pengimplementasian keamanan fisik harus diinvestasikan seefektif dan seefisien mungkin, karena bila terjadi sesuatu baik karena faktor manusia maupun lingkungan telah ada pencegahan dan penanggulangannya.

Dengan penerapan keamanan fisik, resiko kehilangan pada aset-aset milik Polda Metro Jaya menjadi lebih kecil atau dengan kata lain

kerugian yang diderita tidak sebesar jika keamanan fisik dilaksanakan. Jadi adalah sangat wajar saja jika diinvestasikan untuk keamanan fisik.

Penulis menganalisa persepsi anggota/karyawan dan pimpinan terhadap persepsi penciptaan keamanan sangat jelas bahwa anggota/karyawan dan masyarakat pengunjung membutuhkan keamanan, namun tidak dapat berbuat banyak terhadap penciptaan rasa aman di Polda Metro Jaya. Pimpinan lah yang dapat berbuat banyak terhadap penciptaan keamanan ini. Hal ini dikarenakan pimpinan dapat membuat kebijakan yang berguna bagi penciptaan keamanan, dan pengelolaan keamanan pada kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya. Analisa penulis terhadap persepsi pimpinan terhadap penciptaan rasa aman ini adalah membutuhkan keamanan, sesuai dengan Teori Kebutuhan dari Abraham Maslow dimana membutuhkan keamanan terhadap aset miliknya, namun juga menyadari bahwa untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan kondisi profit juga mengalami kemunduran akibat dari krisis global saat ini, sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan sekuriti fisik yang sesuai dengan standar konsep yang ada.

5.5.3. *Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)*

Mc. Crie (2001) mengatakan bahwa *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)* adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan desain lingkungan.

CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan. Keempat prinsip dasar perencanaan keamanan tersebut akan penulis bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Keempat prinsip CPTED tersebut meliputi:

- a. Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, sehingga

mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Di antara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali. Pembagian area pengawasan yang dilakukan oleh petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* sudah dilaksanakan oleh Kadenma Polda Metro Jaya. Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* sudah ditugaskan di pos-pos jaga. Namun hal tersebut tidak optimal dikarenakan terbatasnya jumlah petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* di pos-pos tersebut, dan kewenangan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang dibatasi oleh manajemen. Pelaksanaan patroli dilakukan oleh Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* yang bertugas dan dilaksanakan setiap dua jam sekali. Adanya akses kontrol dapat menghalangi pihak yang tidak berkepentingan memasuki kawasan, namun hal itu menjadi tidak berarti dikarenakan ukuran fisik pagar yang mengelilingi tidak memakai ukuran standar pagar, sehingga dikhawatirkan banyak pihak yang tidak berkepentingan dapat memasuki kawasan dari berbagai cara baik dengan jalan memanjat dan melompati pagar kawasan maupun langsung masuk lewat akses kontrol karena tidak dilakukan pemeriksaan. Polda Metro Jaya sesungguhnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sudah memadai, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh pihak manajemen.

- b. Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar lingkungan dan dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan *Closed Circuit Television (CCTV)* dan sistem alarm. Kelemahan kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya adalah kurangnya *CCTV* dan sistem alarm.
- c. Citra/*image*, reputasi yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah dan diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif

sesuai dengan peruntukannya. Pengamatan penulis terhadap Polda Metro Jaya adalah bahwa ini selalu berusaha untuk menciptakan citra/*image* yang baik. Hal ini hasil pengamatan penulis melalui beberapa hal yang dilakukan oleh petugas sekuriti, seperti pengaturan tempat dan lokasi parkir kendaraan roda dua dan empat, pengaturan gedung tempat perkantoran dan pengaturan pos-pos jaga fisik dan sebagainya. Namun dalam pengaturannya ada sebagian yang tidak tertata rapi, sehingga menimbulkan kesan tidak tertata dengan baik dan teratur.

- d. Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar Polda Metro Jaya, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan belum dimanfaatkan serta lokasi parkir baik yang merupakan areal parkir untuk karyawan maupun areal parkir untuk kendaraan roda empat dan dua bagi tamu merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar/masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat serta tidak tersedianya areal yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan. Lingkungan sekitar yang rawan dimasuki pelaku kejahatan Angka dan kualitas kejahatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang kurang maksimal dari petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*, maupun banyaknya akses kontrol menuju kawasan tersebut, ditambah lagi dengan kondisi sebagian tembok pembatas sebagai *target hardening* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

5.6. Upaya Antisipasi Bentuk Kerawanan dan Ancaman Terhadap Pengamanan fisik di Polda Metro Jaya

Upaya taktis pengamanan fisik yang perlu dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam mengamankan (aset-aset negara) yang dilakukan secara preventif dan represif.

5.6.1. Preventif

Pencegahan (*preventif*) yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah timbulnya ancaman dan gangguan, dalam hal ini mencakup kegiatan-kegiatan pembimbingan karyawan dalam rangka untuk

meningkatkan kesadaran keamanan dan ketertiban dari segenap karyawan termasuk masyarakat disekitarnya belum dapat terselenggara dengan maksimal. Peranan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam upaya preventif ini dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan yang berhubungan dengan upaya deteksi dini (*early warning*) yang berupa penerapan terhadap peralatan elektronik sebagaimana dijelaskan dalam tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik dan pelaksanaan pengamanan umum dan khusus terhadap kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya sebagai mana akan dijelaskan dibawah ini termasuk dalam upaya preventif.

5.6.2. Pengaturan dan Penjagaan

Dalam penugasan anggota personil sekuriti baik tugas jaga di pos utama, pos jaga kantor/gedung maupun pos-pos lainnya telah terjadwal dengan baik, kemudian pos utama dan pos pintu gerbang depan untuk memasuki kawasan Polda Metro Jaya dan pintu masuk ke kawasan harus secara langsung dapat diawasi oleh petugas sekuriti yang bertugas jaga secara langsung dapat mengawasi kendaraan yang parkir selain dari pada terdapat khusus yang mengawasi kendaraan di tempat parkir maupun kendaraan yang terdapat di luar kawasan parkir bagi kendaraan yang tidak dapat tertampung di kawasan parkir kendaraan.

Pelaksanaan tugas jaga mengisi buku mutasi yang memuat jadwal penugasan dan daftar nama-nama anggota Personil sekuriti yang bertugas baik patroli jalan kaki terhadap rute-rute yang bersifat terbatas maupun patroli roda 2 pada kawasan Polda Metro Jaya secara menyeluruh.

Pengaturan dan pengendalian tugas personil sekuriti dalam hal tugas penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terus-menerus selama 24 jam dengan pembagian waktu jaga 1 x 12 jam yang terbagi dalam tugas pengamanan dengan pembagian 3 shift yang diatur oleh seorang Kepala Satuan/Unit kerja yang dibantu oleh staf dengan kedudukan di kantor Denma Polda Metro Jaya sebagai posko induk untuk pengendalian dan pengaturan tugas Personil sekuriti dan tugas sesuai dengan pos-pos penjagaan yang disesuaikan dengan luasnya kawasan Polda Metro Jaya, jumlah obyek yang

harus dijaga dan tingkat kerawanan yang terdapat dalam kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya.

Dalam hal penugasan bagi anggota Personil sekuriti *inhouse* tentang tugas penjagaan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain tugas patroli yang dilaksanakan bervariasi mulai dengan penggunaan kendaraan roda 2 dan patroli jalan kaki, pengawalan dan adanya pembuatan dan penyusunan administrasi maupun mutasi yang harus dibuat dan dilaporkan pada pimpinan.

5.6.3. Pengawasan

Peranan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan bersamaan dengan tugas penjagaan. Peranan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam pengawasan ini mengandung maksud untuk melihat dan memperhatikan tingkah laku orang atau barang yang dianggap penting, sehingga terkendalinya situasi keamanan dan ketertiban di Polda Metro Jaya. Pengawasan ini dilakukan oleh Petugas sekuriti *inhouse* setiap hari secara rutinitas 1 x 24 jam secara bergantian dengan 3 shift pada seluruh kawasan Polda Metro Jaya sedangkan petugas sekuriti *outsourcing* hanya pada gedung Samsat dan Gedung Biru dit Lantas Polda Metro Jaya.

5.6.4. Patroli

Pelaksanaan tugas patroli yang dibebankan kepada Satuan Pengamanan, dimaksudkan untuk mengawasi, memeriksa atau mengontrol aset-aset Negara yang ada pada Markas Komando Polda Metro Jaya. Dalam pelaksanaan Patroli yang dilakukan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dibagi dalam dua areal yaitu areal luar dan areal dalam yang dilakukan dengan menggunakan roda 2 dan berjalan kaki khususnya dilakukan pada jam-jam rawan seperti pada malam hari sekitar jam 01.00-03.00 WIB.

5.6.5. Represif

a. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dalam pelaksanaan mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang merupakan tugas Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* telah berjalan dengan baik yaitu bila ada kejadian perkara TKP sudah tidak diganggu orang, kemudian bila ada pelaku kejahatan dilakukan penangkapan dan jika ada korban langsung dibawa ke Klinik di Polda Metro Jaya dan berkoordinasi dengan Dit. Reskrim.

b. Penanganan Kasus Pencurian.

Dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* sudah berjalan dengan baik, dimana Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* sudah selalu waspada agar tidak menimbulkan kerugian, pelaku segera dilakukan penangkapan, pencatatan dalam buku mutasi dan dilakukan investigasi, sehingga penanganan kasus pencurian tersebut sudah tuntas dan pelaku diserahkan kepada Sat Reskrim serta kasus tersebut selalu dipantau sampai maju pada sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim.

c. Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa.

Apabila terjadi Unjuk rasa di tempat Markas Komando Polda Metro Jaya maka setiap anggota Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* telah dilatih untuk mengambil tindakan-tindakan yang di perlukan apabila ada peningkatan eskalasi kerawanan dan juga situasi kotijensi yang di akibatkan rusuh massa dari pengunjung rasa.

Peranan Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*) yang dilakukan untuk mengatasi gangguan dan menekan/mengurangi resiko/kerugian, yang dalam hal ini termasuk segala kegiatan untuk membantu proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga didukung dari data tentang pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sangat minim, bahkan jarang terjadi, hal menunjukan bahwa stabilitas kamtibmas di lingkungan Polda Metro Jaya dapat terselenggara dengan baik. Adapun hal-hal yang telah disebutkan diatas yang berhubungan dengan kejadian-kejadian dimaksud seperti

misalnya dalam penanganan kebakaran dan pemogokan tidak pernah terjadi dan faktor pendukung dalam pemeliharaan dan penciptaan situasi lingkungan instansi yang aman, tertib dan teratur dengan letaknya yang strategis.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Suatu instansi pemerintahan seperti Polda Metro Jaya dalam menjalankan kegiatannya perlu melakukan manajemen sekuriti untuk melindungi semua aset negara, sehingga terhindar dari kerugian dalam bentuk apapun seperti dalam dalil aman itu mahal tetapi akan lebih mahal lagi apabila tidak aman. Dalam melaksanakan manajemen sekuriti, perlu kordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menyelenggarakan manajemen sekuriti dalam instansi Polda Metro Jaya adalah melakukan analisa terhadap ancaman, kejahatan dan upaya taktis. Hal ini tentunya dimanfaatkan untuk merespon adanya kejahatan yang terjadi pada masa yang akan datang dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat sebagai alternatif upaya penyelamatan masa depan institusi Polri ini.

Kondisi sistem pengamanan fisik Markas Komando Polda Metro Jaya dalam rangka mengamankan aset-aset yang dimilikinya agar instansi tersebut bisa tumbuh dan berkembang yaitu adanya pemagaran kawasan lingkungan yang sudah memadai, tertatanya tempat parkir, adanya penerangan lampu yang ditujukan pada tempat-tempat yang dianggap penting, adanya pintu masuk dan keluar sebagai tempat pemeriksaan kendaraan, anggota/masyarakat dan barang yang akan keluar dan masuk, adanya pos-pos penjagaan sebanyak 6 pos statis, terdapatnya jaringan komunikasi dan alarm, sistem identifikasi bagi setiap orang yang akan memasuki kawasan Polda Metro Jaya, adanya petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* untuk menjaga aset perusahaan dan secara garis besar pelaksanaan sistem pengamanan dilaksanakan melalui manajemen sekuriti fisik.

Manajemen sekuriti fisik yang digunakan oleh Polda Metro Jaya dengan memberdayakan tenaga pengaman dari dalam (*inhouse*) dan juga menggunakan perusahaan jasa pengamanan (*outsourcing*) Apabila membahas pengamanan obvit nasional, Polda Metro Jaya termasuk sebagai obvit nasional. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya seharusnya menggunakan sistem "*inhouse security guards*" sesuai dengan SKEP. KAPOLRI Nomor 738/X/2005 . Pendekatan manajemen

keamanan dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Dalam manajemen keamanan yang dilaksanakan tidak menunjukkan suatu sistem yang terpadu, karena adanya kepentingan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pencapaian tujuan tidak dapat berhasil dengan efektif dan efisien. Hal ini dengan adanya sistem keamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya yang secara struktur dibawah kendali Kadenma Polda Metro Jaya, sedangkan petugas sekuriti *outsourcing* di laksanakan oleh jasa pengaman dari luar Polda Metro Jaya yang dikendalikan oleh perusahaan jasa pengaman PT. Mitra Mandiri.

Peranan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam meningkatkan sistem pengamanan di Polda Metro Jaya lebih dititik beratkan pada pengamanan fisik (aset-aset Polda Metro Jaya) yang dilakukan secara preventif dan represif. Peranan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam upaya preventif dengan melakukan pengaturan dan penjagaan pada aset-aset Polda Metro Jaya secara terjadwal, pengawasan yang dilaksanakan bersama dengan tugas penjagaan yang dilaksanakan 1 x 24 jam dengan 3 (tiga) *shift* dilakukan pada kawasan Polda Metro Jaya, patroli untuk mengawasi, memeriksa atau mengontrol aset-aset Polda Metro Jaya agar tetap berfungsi dan biasanya dilakukan dengan menggunakan roda 2 dan jalan kaki. Peranan petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing* dalam pelaksanaan tugas represif yaitu penanganan TKP berkordinasi dengan fungsi terkait dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal agar tidak diganggu orang, penanganan kasus pencurian dengan segera pelaku dilakukan penangkapan, pencatatan dalam mutasi, dan penanganan bila terjadi kasus unjuk rasa yang diarahkan agar dapat mengantisipasi para pengunjung yang akan berbuat anarkis terhadap Markas Komando Polda Metro Jaya.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Polda Metro Jaya masih berjalan dan dapat memberikan adanya rasa aman. Namun Polda Metro Jaya dalam menjalankan manajemen sekuriti fisik masih dilakukan apa adanya dan belum dapat mencegah terjadinya kejahatan secara optimal. Kondisi manajemen sekuriti fisik yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya untuk idealnya dengan melihat konsep sekuriti fisik adalah :

1. Petugas sekuriti *inhouse* dan *outsourcing*-nya yang terbatas, tidak adanya rencana latihan mengenai pengamanan, sosialisasi terhadap SOP yang berlaku dan simulasi penanggulangannya belum di laksanakan serta tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari serta secara keseluruhan petugas sekuriti yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Satpam.
2. Image negatif yang melekat pada kesatuan Denma sebagai pencerminan dari kualitas yang kurang baik dari personilnya.
3. Akses kontrol yang masih menggunakan kartu identitas yang belum di lakukan dan masih melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan terhadap anggota/masyarakat yang dicurigai masih bersifat konvensional.
4. Ketinggian pagar pembatas kawasan Polda Metro Jaya dapat dikatakan belum ideal, dan tampilan secara fisik kurang optimal. Hal ini terlihat masih banyak pepohonan dan rerumputan yang menghalangi pandangan orang dan juga hal ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap aset-aset Polda Metro Jaya.
5. Kunci yang digunakan sebagai penutup pintu-pintu di kawasan Polda Metro Jaya, masih menggunakan kunci yang dijual bebas di pasaran. Pada tiap-tiap Satker pada Polda Metro Jaya masih banyak terdapat ruangan yang tidak dikunci, hal ini menjadikan kerawanan akan hilangnya aset-aset Polda Metro Jaya.
6. Pos jaga yang dirasakan masih kurang dari segi jumlah maupun kualitas bangunan secara fisik. Demikian juga dengan sarana dan prasarana yang mendukung pada pos jaga ini masih dirasakan kurang memadai.
7. Alat komunikasi yang dirasakan masih kurang. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak jarang petugas sekuriti menggunakan *hand phone* pribadi dalam berkomunikasi dengan sesama petugas sekuriti ataupun anggota/karyawan Polda Metro Jaya.
8. Anggaran untuk melakukan perawatan dan pengadaan alat-alat atau sarana dan prasarana yang mendukung tugas pengamanan masih sangat kurang.

9. Masih belum maksimalnya penyelenggaraan program CPTED dan SCP oleh Polda Metro Jaya dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat serta minimnya program pengembangan kekuatan (sendiri, seprofesi, instansi terkait).

Polda Metro Jaya menurut upaya sekuriti Gigliotti sudah memasuki pada tahap *medium security*, walaupun belum dilengkapi dengan alarm, namun pada kenyataannya semua ukuran fisik yang ada masih ada beberapa yang tidak memenuhi standar ukuran sekuriti fisik, sehingga pencurian yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih kerap terjadi.

Bila sekuriti fisik perusahaan yang kurang optimal, seharusnya membuat perusahaan berpikir untuk menerapkan konsep *crime prevention through environmental design* (CPTED) guna meringankan beban tugas dan tenaga sekuriti. Namun pada kenyataannya, CPTED yang diterapkan di Markas komando Polda Metro Jaya ini dirasakan masih belum dapat mencegah dan menghalangi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Pelaksanaannya belum mencerminkan empat prinsip CPTED dikarenakan terbatasnya petugas sekuriti, pagar yang belum memenuhi standar, kurang memadainya CCTV dan sistem alarm serta belum tertatanya lingkungan ini dengan baik dan teratur.

Faktor keamanan lingkungan kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya yang berupa lingkungan fisik yang terdapat dalam kawasan, yang meliputi :

1. Fasilitas jalan lingkungan dalam Mapolda, sebagian yang sudah kelihatan dan tertata rapi serta beraspal. Akan tetapi ada beberapa bagian dari fasilitas jalan tersebut yang belum bagus.
2. Penataan lingkungan perkantoran Polda Metro Jaya yang sebagian sudah tertata rapi, akan tetapi masih ada bagian-bagian yang masih belum terlihat rapi, karena ditutupi pepohonan dan rerumputan. Hal ini jelas saja dapat dijadikan sebagai tempat persembunyian yang baik bagi pelaku kejahatan yang melakukan aksinya di dalam lokasi perusahaan.
3. Sarana parkir yang belum tertata rapi serta belum dilakukan pengawasan yang maksimal terhadap lahan peparkiran yang ada.

Spesialisasi sistem keamanan di Markas Komando Polda Metro Jaya secara umum lebih mengutamakan tingkat keamanan eksternal, sehingga keamanan

internal memiliki mutu jauh di bawah mutu keamanan eksternal. Pihak Polda Metro Jaya kurang menyadari bahwa masalah keamanan lebih sering dan mudah muncul karena faktor internal, baik disengaja maupun tidak. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan yang sangat signifikan berasal dari faktor internal Polda Metro Jaya, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota atau petugas sekuriti Polda Metro Jaya itu sendiri. Idealnya sistem keamanan pada Markas Komando Polda Metro Jaya yaitu dengan menyatukan antara keamanan fisik (eksternal) dan sistem (internal). Jika keduanya disatukan di bawah satu koordinasi, pengamanannya akan lebih efektif. Yang harus dipahami bahwa sistem keamanan di Polda Metro Jaya perlu dipandang secara menyeluruh dan *top-down*. Secara umum, ada tiga komponen pokok keamanan yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Apabila Polda Metro Jaya hanya fokus pada komponen sumber daya manusia saja dan melupakan kedua komponen penting lainnya, maka solusi itu pasti akan gagal. Masalah keamanan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan pengamanan sekuriti pada obyek vital nasional terlebih pada Markas Komando Polda Metro Jaya. Maka Polda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan kejahatan dari seseorang yang mencoba untuk merusak atau mencuri aset-aset perusahaan yang ada yaitu dengan penyediaan tenaga sekuriti (Satpam), pembuatan pagar, akses kontrol, pembuatan pos-pos jaga statis.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka menurut penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Idealnya keamanan fisik dianggap tidak penting dan seringkali diabaikan, namun dengan adanya penelitian dari konsultasi *International Ernest* dan *Young Consulting* (2004/2005), yang menjelaskan bahwa sebanyak 84% penipuan (*fraud*) terhadap perusahaan, dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri selain itu juga bencana alam, membuat orang merubah pandangan akan pentingnya keamanan fisik. Bagaimana menjaga aset perusahaan, bagaimana strategi pemulihan setelah terjadi bencana alam, bagaimana pengontrolan akses perusahaan dan bagaimana menilai resiko

dan ancaman keamanan fisik serta metode pengamanannya dalam rangka mencegah dan menanggulangi ? Aman itu mahal akan tetapi akan lebih mahal lagi apabila tidak aman, oleh karena itu perlu investasi yang mangkus dan sangkil untuk mengaplikasikan keamanan fisik yang terintegrasi di Polda Metro Jaya, sehingga jika terjadi sesuatu (mungkin karena faktor lingkungan atau faktor manusia) telah ada tindakan pencegahan dan penganggulangan kejadian tersebut. Dengan penerapan keamanan fisik, resiko kehilangan pada aset-aset milik Polda Metro Jaya menjadi lebih kecil.

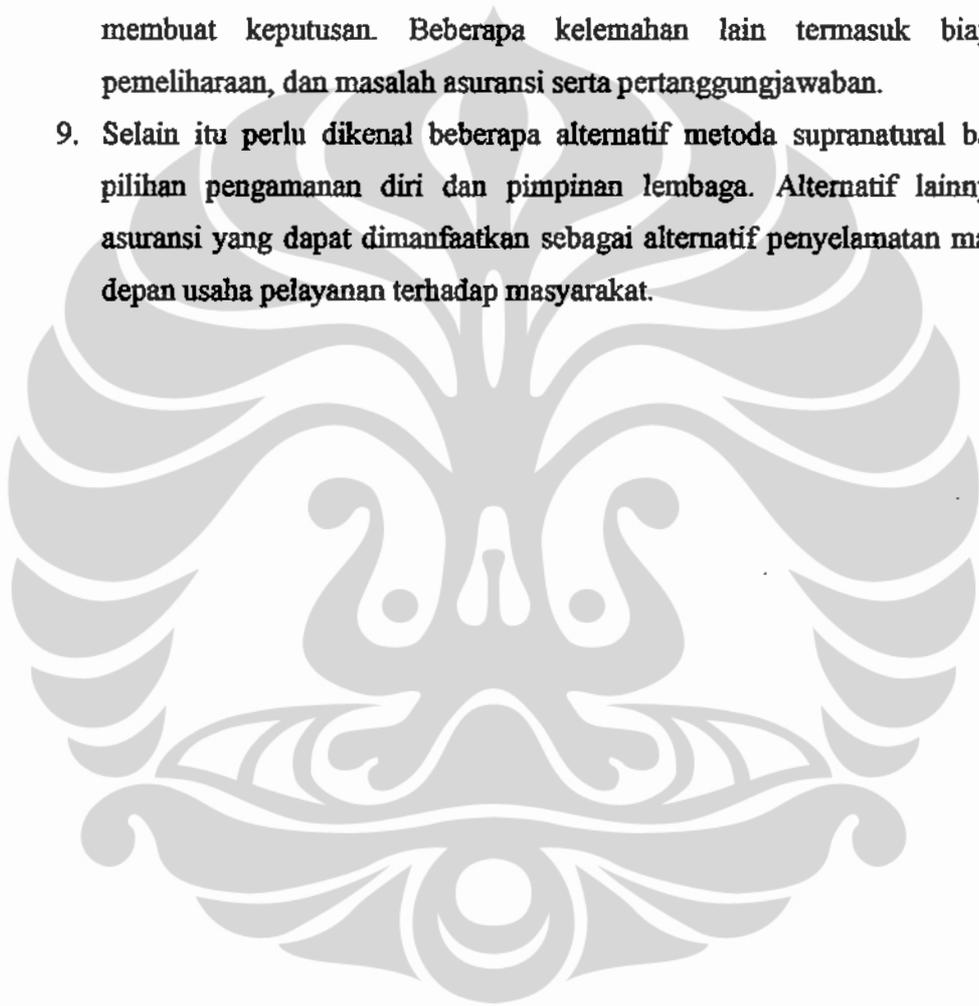
2. Idealnya Polda Metro Jaya dilengkapi dengan pemasangan kamera CCTV di setiap area yang rawan dan penempatan kamera tersembunyi (*hidden camera*) pada titik-titik tersembunyi yang benar-benar dinilai vital. Pengawasan secara visual atau perangkat perekam seperti CCTV digunakan sebagai tambahan penjaga untuk meningkatkan kemampuan penjagaan dan pengawasan serta merekam peristiwa sebagai bukti bila terjadi suatu kejahatan dan penuntutan. Dengan memonitor keseluruhan peristiwa dan kegiatan yang ada di Polda Metro Jaya adalah tindakan pencegahan serta pendeteksian.
3. Harus di lakukannya perbaikan sistem pembinaan personil Denma Polda Metro Jaya di khusus kan mereka yang terlibat dalam petugas pengamanan markas, dengan melakukan *punishmen* dan *reward* untuk memotivasi terhadap pelaksanaan kinerja petugas sekuriti *inhouse* yang baik, juga petugas sekuriti di beri pelatihan dan simulasi tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya secara periodik dan berkesinambungan sehingga petugas sekuriti mengerti apabila di hadapkan dengan kejadian pada saat yang sebenarnya.
4. Idealnya, apel serah terima jaga dilaksanakan oleh petugas sekuriti *outsourching* dengan dipimpin oleh komandan Regu yang berdinis pada saat itu dan serah terima jaga dilakukan secara bersama-sama dengan para petugas sekuriti *inhouse* yang pengawasannya langsung dibawah kendali Kadenma Polda Metro Jaya serta mengadakan pembinaan fisik juga harus dilakukan. Disamping itu perlunya pendidikan dan latihan

bagi petugas sekuriti secara terus menerus dan berjenjang dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memperlancar tugas-tugas sekuriti sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sistem pengamanan pada kawasan Polda Metro Jaya. Di samping itu, pengusulan untuk penambahan anggaran guna pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan alat-alat pengamanan yang modern (*security device*) pada RKA-RL tahun berikutnya.

5. Idealnya, pagar-pagar pembatas dibersihkan dari rerumputan dan pohon-pohon yang tumbuh dengan lebatnya dengan menempel pada pagar pembatas tersebut dapat dirapikan agar semakin baik dan fungsi peneranganpun menjadi tidak terganggu. Di samping itu, pagar juga merupakan baris pertahanan pertama areal dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilengkapi dengan personel sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan bentuk pengamanan fisik lainnya yang secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah seperti pencurian dan sifat pengrusakan ke dan dari fasilitas. Bentuk pagar yang ideal dengan ketinggian sekitar 8 kaki atau 2,5 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dengan bagian atasnya berbentuk huruf "v" dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri.
6. Penyediaan lahan parkir atau berupa gedung dan sistem pemarkiran yang modern di kawasan Markas Komando Polda Metro Jaya.
7. Polda Metro Jaya melakukan penambahan terhadap pos jaga statis serta melengkapi sarana dan prasarananya semua pos jaga untuk mendukung tugas pengamanan serta aset-asetnya dan sarana dan prasarana yang sudah ada perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pada saat ini, contoh : karena situasi Jakarta yang rawan terjadi peledakan bom, maka Polda Metro Jaya harus menyiapkan peralatan yang bisa digunakan untuk mendeteksi masuknya bom ke dalam lingkungan Markas Polda Metro Jaya (pada main gate).
8. Idealnya, pengamanan sevitral Polda Metro jaya menggunakan anjing penjaga (*guard dogs*) untuk membantu petugas Satpam melaksanakan

pengamanan sehari-hari guna mencegah kerugian dari sebab apapun. Menggunakan anjing penjaga hampir sama pentingnya dengan konsep menggunakan petugas sekuriti untuk menjaga sesuatu. Anjing sangat setia, dapat diandalkan, dan memiliki indra pendengaran dan penciuman yang tajam. Anjing penjaga dapat diterima untuk penjagaan fisik garis batas luar (*perimeter*), namun tidak seberguna manusia yang dapat membuat keputusan. Beberapa kelemahan lain termasuk biaya, pemeliharaan, dan masalah asuransi serta pertanggungjawaban.

9. Selain itu perlu dikenal beberapa alternatif metoda supranatural bagi pilihan pengamanan diri dan pimpinan lembaga. Alternatif lainnya, asuransi yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penyelamatan masa depan usaha pelayanan terhadap masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirin, Tatang M., 2003, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barefoot, J. Kirk & David A. Maxwell, 1987, *Cooperate Sircuit Administration and Management*, butteroot Publisher, USA.
- Barry, Cushway, 1996, *Human Resources Management, The Fast Track MBA Series (terjemahan)*, Jakarta : PT. Elekmedia Computindo.
- Bungin, Burhan, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada.
- Charles, Everentt. E. Adam Jr, Ebert, 1985, "*Manajemen*", New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Cresswell, John W, 2002, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches (terjemahan angkatan IV dan V KIK UI)*, Jakarta: KIK Pers.
- Darmawan, Mohammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djamin, Awaloedin, 1999. *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- , 1997. *Satpam dan Manager Security*, Jakarta.
- , 1988. *Siskamswakarsa dan Industrial Security*, Jakarta.
- , 1999. *Pengembangan Sistem Personel Polri di Masa Depan*, Jakarta :KIK-UI.
- Hadiman, 2005, *Manajemen Sekuriti*, Jakarta : Bahan kuliah Program Pasca Sarjana KIK-UI.
- , 2009, *Management Security*, penyampaian materi kuliah Management Security, pada Mahasiswa KIK Angkatan XIII, Jakarta.
- Herujito, Yayat M., 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo.

- Jammes, D' Addario Francis, 1999, *Loss Prevention Through Crime Analysis* (mencegah Kerugian Dengan Analisa Kejahatan), Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: CV. Gunung Agung.
- , 2002. *Memahami : Undang-undang Kepolisian undang-undang no. 2 tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Koenarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta.
- Mabes Polri, 1987, *Kamus Istilah Polri*, Dinas Penelitian dan Pengembangan, Oktober 1987.
- Mercado, Caesar M. "*The Conduct of Social Science Research*",
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk. dan Djaali. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, PTIK Press, Jakarta.
- Post, Richard S., 1996. *Security Managers Desk Reference, Policies Procedures Operation*, Publisher, Butterword.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Robbins, Stephen P., 1974, "*Managing Organizational Conflict*", New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Sabardi, Agus, 2001, *Manajemen Pengantar, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Siagian, Sondang, 1985, *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan Sarwono, 1995, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Payaman, 2003, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Smith, Clifton, 1992. *Obtimation Througt Total Security*, Australia.

Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers.

Stoner, James A.F.& Charles Wankel. 1986. *Manajemen, Third Edition*, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.

Suparlan, Parsudi, 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana UI, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Terry, George R., 1986, *Azas-Azas Manajmene, Terjemahan dari Prinsiple of Management*, oleh Winardi, Bandung : Alumni.

Dokumen :

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Mabes Polri. 1980. *Ketentuan-ketentuan Tentang Pembinaan Satpam*, Jakarta.

-----, *Kebijakan dan Strategi Kapolri* tahun 2002-2004, Keputusan Kapolri No.Pol.Kep/01/2002 tanggal 2 Januari 2002.

-----, Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri Tingkat Polda.

-----, Keputusan Kapolri No.Pol.:SKEP/7/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Polri Tingkat Polda

-----, *Reformasi Menuju Polri Mandiri*, Mabes Polri. 2002

-----, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, 1993. *Buku Pedoman Pengamanan Swakarsa*, direvisi oleh Kombes Pol. Drs. Achmad Hassan, Jakarta.

-----, 1993. *Security Guide Book, Pembinaan Satpam di Indonesia*, disusun oleh Kombes Pol.Drs. Wirman Burhan, Jakarta: MPKN.

Polda Metro Jaya, 2009, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Polda Metro Jaya Tahun 2008*, 11 Februari 2009, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya.

Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia.

BIO DATA PENULIS

1. Nama; : Muhammad Mustofa, SIK.
2. Pangkat/NRP : AKP/75121176.
3. Kesatuan : PTIK.
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1975.
5. Agama : Islam.
6. Status Perkawinan : Belum Kawin.
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

9. Pendidikan Umum : 1. SDN KP I . Jakarta, 1988.
2. SMPN 178. Jakarta, 1991.
3. SMAN 86. Jakarta, 1994.

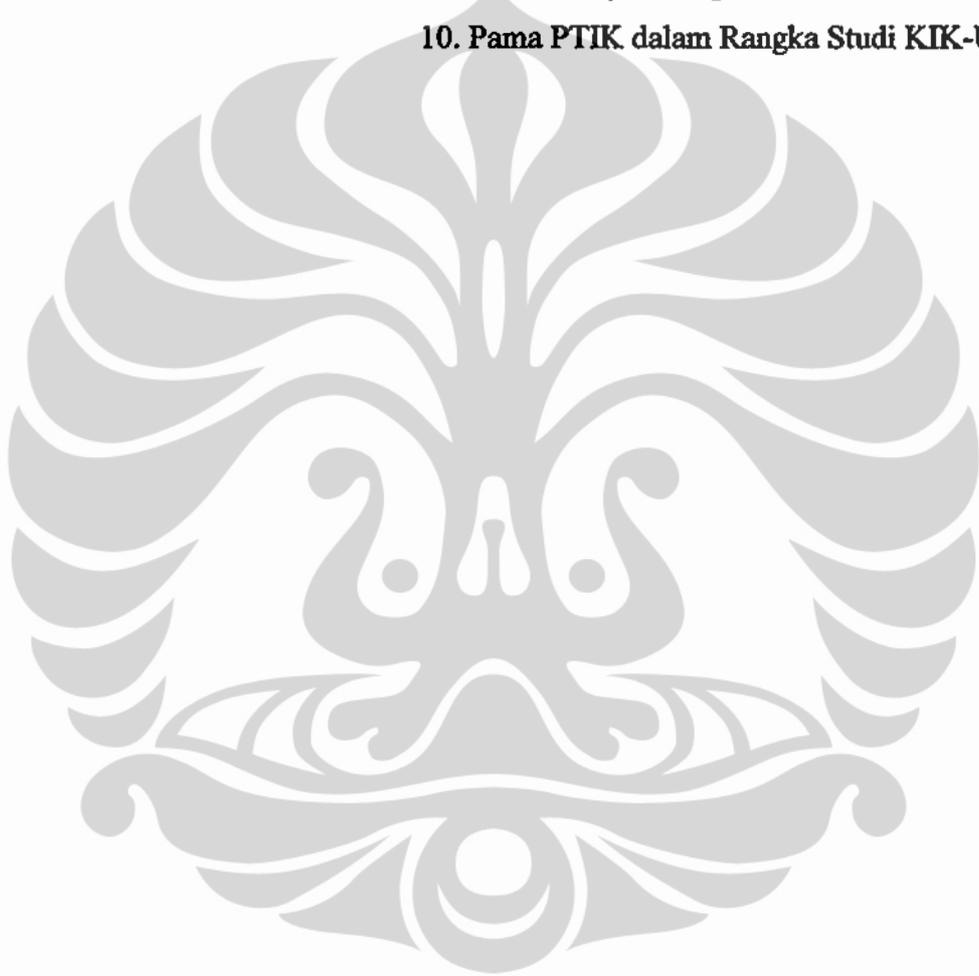
10. Pendidikan Polri :1. Akpol, 1998.
2. PTIK, 2005.

11. Pendidikan Kejuruan : 1. Dikjur Daspa Lantas, 1999.
2. KIBI Sebasas Akpol, 2001.
3. Dikjur Lanpa Rekayasa Lantas, 2003.

12. Tanda Jasa : 1. Satyalancana Dharma Nusa.
2. Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun.

13. Riwayat Jabatan : 1. Pamapta Polres Hulu Sungai Selatan, 1999.
2. Kanit Res-Intel KPPP Banjarmasin, 2000.
3. KaurRegident Lantas Poltabes Banjarmasin, 2001.
4. Kasat Lantas Polres Tanah Laut, 2002.

5. Kani II Dikyasa Ditlantas Polda Kalsel, 2005.
6. Pama PTIK dalam Rangka DIK PTIK, 2005.
7. Kasat lantans Polres Ambon, 2006.
8. Kasi STNK Polda Maluku, 2007.
9. Ka Induk PJR Polda Maluku, 2007.
9. Ka Sub Bag Ren Ops Polda Maluku, 2008.
10. Pama PTIK dalam Rangka Studi KIK-UI, 2008.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
 Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI

KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana L. 2
 Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
 Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Program Studi Ilmu Kepolisian (PTIK)
 Jl. Tidar Raya No. 6, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7258374, 7263414, Fax. 7258374

Nomor : 010 /F2.F3/KIK/II/2010
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian

Jakarta, 13 Januari 2010

Kepada yang terhormat,
KAPOLDA METROPOLITAN
JAKARTA RAYA
 di-
 Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerjasama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan Pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XIII dan menginjak Semester Genap T.A. 2009/2010, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : M. Mustofa
 NPM : 0806447381
 Angkatan : XIII
 Semester : Genap T.A. 2010/2011
 Judul Penelitian : Manajemen Sekuriti Fisik pada Polda Metro Jaya

Demikian Permohonan Kami, dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
 Program Pascasarjana Universitas Indonesia



Handwritten signature

Dr. Harto W. Sarwono, Psi
 170783006



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Telp. : (021) 3100059, 3146737. Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Jl. Terusan Raya No. 6, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7258374, 7261414, Fax. 7258374

Nomor : B6/H2.F13.KIK/PPM.00.Penelitian/2010
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Jakarta, 12 Mei 2010

Kepada yang terhormat,
KAPOLDA METRO JAYA
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerjasama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan Pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XIII dan mengajark Semester Genap T.A. 2009/2010, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak kiranya berkenan untuk menyediakan waktu guna menerima mahasiswa S2-KIK dalam rangka wawancara yang berkaitan dengan Judul Penelitian Saya. Untuk waktu sepekenanya diceraikan kepada Bapak.

Adapun Mahasiswa yang akan melakukan wawancara adalah :

Nama : M. Mustofa
NPM : 0906447381
Angkatan : XIII
Semester : Genap T.A. 2009/2010
Judul Penelitian : Manajemen Keamanan Fisik di Markas Komando Polda Metro Jaya

Demikian permohonan kami, dan atas terimakasihnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Kema.

Sarilita Wicakana

Prof. Dr. Sarilita W. Sarilita, Fdi
NUP : 110701006

**POLRI DAERAH METRO JAYA
BIRO PERSONEL**

NOTA DINAS

Nomor : BANO- 341 /A/2010/Personel

Kepada : 1. Para Karo Polda Metro Jaya
2. Para Kabid Polda Metro Jaya
3. Para Dir Polda Metro Jaya
4. Kadem BBAT Polda Metro Jaya
5. Ka Deoma Polda Metro Jaya

Dari : Karo Pers Polda Metro Jaya

Perihal : Penelitian Mahasiswa S2-KIK di Polda Metro Jaya.

1. Rujukan Surat Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia Nomor : 005/H2.F3/KIKM/2010 tanggal 07 Januari 2010 perihal Penelitian.
2. Selubangan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka dan Dir bahwa salah satu Mahasiswa KIK Program S-2 yang akan melaksanakan Penelitian di Marhas Komando Polda Metro Jaya untuk Penelitian Tesis mulai tanggal 18 Januari s.d 01 Maret 2010.
3. Berita surat satu dan dua di atas, dimohon Ka dan Dir untuk membantu pelaksanaan penelitian untuk memfasilitasi Data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK atas nama :
 - a. nama : **MI MUSTOFA;**
 - b. pangkat/rp : **Kompol/75121176;**
 - c. rpa : **0805447381;**
 - d. angkatan : **XIII;**
 - e. Semester : **Gesap TA. 2010/2011; dan**
 - f. Judul penelitian : **Manajemen Sekuriti Fisik pada Marhas Komando Polda Metro Jaya.**
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 2 Februari 2010

KEPALA BIRO PERSONEL POLDA METRO JAYA

Dr. HAKA ASTANA M.P., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 57050901

**BUKU
BIMBINGAN/KONSULTASI TESIS**

NAMA MELAJISISWA

MUHAMMAD MUSTOFA, S.Pd

NPM

0806417301

PENDAHULU

1. Dr. G. H. HADJIAN, M.Pd

2.



**PROGRAM STUDI STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
MAHASISWA ANGGARAN XII (KELAS REGULER)
JAKARTA, 2009**

Universitas Indonesia

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD MUSTOFA
NPM : 0806447381
ANGKATAN : XII (TIGA BELAS)
JUDUL PROPOSAL : MANAJEMEN SEKURITI FISIK
KOMANDO POLDA METRO J

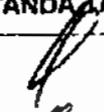
PEMBIMBING : 1. Dr. dr. H. HADIMAN

2.

PEMBIMBING : (UJF) : Dr. dr. H. HADIMAU, SH. Mcc

TANGGAL	URAIAN	TANDA
12/2010 01	- Menyerahkan proposal lit & surat kesediaan sebagai pembimbing tesis.	
25/2010 01	- Revisi proposal lit dan menyerahkan penulisan tesis.	
17/2010 02	- Perbaiki tulisan bab I dan persiapan penelitian	
28/2010 02	- Serahkan tulisan bab I dan gambar untuk arahan bab II.	
15/2010 03	- Revisi bab II dan arahan gambar penulisan bab III.	
27/2010 03	- Perbaiki penulisan bab II dan gambar untuk penulisan bab berikutnya, yaitu bab IV.	

PEMBIMBING : (u/s) : Dr. dr. H. HADIMAN S.H. M.Sc.

TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
04/2010 /04	- Mengetik bab V dan bab VI dan persiapan ujian tesis	
20/09 2010	- Revisi bab V dan bab VI	
17/05 2010	- Pengisian tesis keseluruhan dan pengesahan tesis	

KIPOLRIAN DAERAH MITRO JAYA
 IRO PERSOUBEL

DSP BERDASARKAN KEP 7 TCL 31 JANUARI 2005
 RIL LAPORAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2010

NO	KEMBATUAN	PADA												PAMA				PAMA				PAMA				JUMLAH POLRI			
		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA		PADA	
		RIL	DSP	RIL	DSP	RIL	DSP																						
1	PINPILAN / SPILPAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ITWADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	RO RUMBANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	RO OPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	RO BINAMITRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	RO PERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	RO LOP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	RO HAMBAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	RO BIKAWAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	RO PROGRAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	RO TELUKAYRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	RO DORONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	RO KUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	RO LODO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	RO SETUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	RO DENIMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	RO MITELKAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	RO PERORIN TAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	RO PERORIN BUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	RO MALAKURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	RO BANAYITA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	RO PAN ORYIT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	RO LANTAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	RO POLAIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	RO ORAJI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	RO BARABOS POLDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH SATEK POLDA		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	

KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
BIRO PERSONEL

DATA PNS GOLONGAN I dan IV 2008

NO	SATKER	GOLONGAN				JUMLAH RHL	D.SP	KET +
		IV	III	II	I			
1	PIMPINAN & SP/PPM	0	7	6	1	14	12	2
2	IT/ASDA	0	7	5	0	12	15	-3
3	RO RENBANG	0	5	3	0	8	25	-17
4	RO OPS	0	3	6	0	9	31	-22
5	RO SINANTRA	0	4	0	0	4	27	-18
6	RO PERS	3	41	20	4	77	46	31
7	RO LOO	1	15	10	3	35	52	-17
8	RO HUMBAS	0	4	2	0	6	15	-8
9	RO DURGAM	0	5	1	0	6	13	-7
10	RO PROPAM	0	5	0	2	15	35	-20
11	RO TELEMATIKA	0	0	0	0	14	41	-27
12	RO DONKER	2	15	34	0	51	19	32
13	RO RIJ	0	0	13	0	18	23	-5
14	SPN LIDO	0	0	47	0	61	55	6
15	SETUS	0	0	10	0	10	19	-9
16	DIEMMA	0	0	23	4	35	60	-25
17	DIT INTELKAM	0	0	0	1	14	40	-26
18	DIT RESPRIM LRI	0	15	16	3	34	30	4
19	DIT RESPRIM BUS	0	12	6	3	28	26	2
20	DIT MARHODA	0	2	4	0	6	17	-11
21	DIT RAMAPTA	0	6	0	2	17	21	-4
22	DIT PAS OBHIT	0	0	5	0	10	30	-20
23	DIT LAHTAS	0	0	124	20	203	168	105
24	DIT POLAIR	0	3	2	0	5	21	-16
25	DEM RI ANTI TEROR	0	5	3	0	8	10	-2
26	BAT BIRIBIR POLDA	0	7	15	1	23	40	-17
JUMLAH PNS MAPOLDA		0	257	404	45	726	1.117	-391
28	RESTRO JANGPUB	0	22	24	3	49	111	-62
29	RESTRO JANGUT	1	20	21	3	54	111	-57
30	RESTRO JANGBAR	0	22	17	2	51	111	-60
31	RESTRO JANGSEL	0	20	40	3	63	111	-48
32	RESTRO JANGRI	0	20	33	0	53	111	-57
33	RESTRO TAMERANG	1	27	42	4	74	111	-37
34	RESTRO BELANG	0	27	30	4	61	111	-50
35	RESTRO DEPOK	1	25	31	1	58	111	-53
36	RESTRO KIPP T.I. PROK	0	2	11	1	14	52	-38
37	RESTRO BANDARA SOETA	0	2	0	0	2	11	-9
38	RESTRO TAMERANG KAB	0	10	12	1	23	111	-88
39	RESTRO BEKASI KAB	0	12	0	1	13	111	-98
40	RESTRO KEP. BERINGIN	0	1	1	0	2	111	-109
JUMLAH PNS MAPOLRES		3	281	789	76	1.149	1.947	-804
JUMLAH PNS POLDA + POLRES						1.307		
CAPEG			0	14	0	14		
TOTAL JUMLAH PNS		0	636	747	77	1.329	2.264	-937

KEPALA BIRO PERSONEL POLDA METRO JAYA

Dasar:

Keterangan:

Drs. HAKA ASTAMA S.H.
KOMANDAN BESAR POLRES METRO JAYA

JL. RAJAWALAYU NO. 100 JAYA DA: SEKITARNYA
DETASEMEN HAKKAS

DIKAS
REKAM
TANGGAH
JAJI

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DEKRA POLDA METRO JAYA

REGU 1

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KETERANGAN
1	SARBI	AIPTU	55100425	1
2	HALIMHASDI	AIPTU	55120513	2
3	ATOK TRI YUNARTO	AIPTU	64050631	3
4	HERI MUJONO	BRIPKA	66020531	4
5	EDI SANTOSO, SH	BRIPKA	67080623	5
6	ABDUL MANAN	BRIGADIR	70070227	6
7	SONI PURWANTO	BRIGADIR	74090313	7
8	AMISWARDI	BRIGADIR	78080410	8
9	SODIKIN	BRIP TU	76110756	9
10	JUHAERI	BRIP TU	76060989	10
11	SUGENG SUGHARTO	BRIP TU	77090876	11
12	SUGENG PRASTJO	BRIP TU	77090625	12
13	UNTUNG MULIA	BRIP TU	78010479	13
14	MIDODD	BRIP TU	79050810	14
15	ASEP HIRONO	BRIP TU	79060225	15
16	SUDARMAJI	BRIP TU	79090173	16
17	ELIYADHIL DACHI	BRIP TU	85071355	17
18	DISTRA	BRIPDA	73030448	18
19	JUANDA	BRIPDA	85101641	19
20	INDRA SUMANJAYA	BRIPDA	86121058	20
21	HENDRIK F SILAEN	BRIPDA	88060129	21

Jakarta, 2010

KASAT PAMPROT

H. SENDE HASIBUAN, SH
ANP NRP. 6406253

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SELEKSI
DETASEMEN MARKAS

DINAS
HARI:
TANGGAL
JAM:

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DENMA POLDA METRO JAYA

REGU I

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KETERANGAN
1	RIZKY HIDAYAT	BRIPDA	66371638	1.....
2	SIGI NUR DWI S	BRIPDA	66381723	2.....
3	RUDOLF PAJADU	BRIPDA	89071168	3.....
4	TOPAN SATRIO	BRIPDA	86101850	4.....
5	FREDY MARKUS	BRIPDA	87030438	5.....

Jakarta,

2010

KASAT PAMPROT

H. DEKASRIAN, SH
APP NIP. 64060298

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DETASEMEN MARKAS

04148
RAB
TANGGAL
JAM

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DENHMA POLDA METRO JAYA

REGU II

NO	NAMA	PANGKAT	HRP	KETERANGAN
1	RACHMAT R. KURMA	APTU	61070582	1
2	DEDE MULYANA	APTU	62100454	2
3	CEK UJIANG ANWAR	APTU	63060335	3
4	TB HENDRA GUNAWAN	BRIPKA	69100138	4
5	JANUS SITORUS	BRIGADIR	78010364	5
6	WIDO GANTONO	BRIPTU	62060438	6
7	IMRAN	BRIPTU	76040554	7
8	PURWANTA	BRIPTU	77040876	8
9	NARJIN KALABE	BRIPTU	77060533	9
10	PUPUT WAHYU P.	BRIPTU	85120589	10
11	JUMARTONO	BRIPTU	78050527	11
12	DWIYANTO	BRIPTU	78120404	12
13	BAPTO ALI	BRIPTU	79030375	13
14	YUSUF SUSANTO	BRIPTU	75020403	14
15	DEDE SETIANA	BRIPTU	78061016	15
16	IMAN BUDIANA	BRIPDA	76040882	16
17	HERU SUGIARTO	BRPDA	87120344	17
18	M. MUSLIM	BRPDA	87110476	18
19	RIZKI EKA SONI P.	BRPDA	85121329	19
20	TRI SULISTIONO	BRPDA	88010427	20

Jakarta,

2010

KASAT PAMPROT

H. SENDE HASIBUAN, SH
AKP HRP. 64060294

DAFTAR DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DETASEMEN MARKAS

DIKAS
HARI
TANGGAL
JAM

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DENMA POLDA METRO JAYA
REGU II

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KETERANGAN
1	ASYAR PRANATA	BRIPDA	86101751	1
2	M. HAFID	BRIPDA	87051243	2
3	ANIS PURBO CAHYONO	BRIPDA	88030528	3
4	ZAENAL ABIDIN	BRIPDA	88050477	4
5	DWI SURYANTO	BRIPDA	80100208	5

Jakarta, 2010

KASAT PAMPROT

H. SERIHC HASBIJAN, S.P.
AKP NRP. 64060208

DAFTAR DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DETACHMENT 101015

011111

011111

011111

011111

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DEHMA POLDA METRO JAYA

REGU III

NO	NAMA	PANGKAT	HRP	KETERANGAN
1	ENDANG PURNAMA	AIPTU	55050038	1
2	A. SABATU	AIPTU	63050186	2
3	K. KUATHO	AIPTU	65100221	3
4	BOKSA SINAMBELA	AIPDA	64040323	4
5	EDI UTOMO	BRIPKA	70880065	5
6	JUMANTO	BRIPKA	75063489	6
7	NURHALI	BRIPTU	76063156	7
8	M. YUSUF	BRIPTU	85121199	8
9	ARIS MUDA NASUTION	BRIPTU	76110756	9
10	USMAN NAWAWI	BRIPTU	76100848	10
11	TONO	BRIPTU	77061001	11
12	SURYONO	BRIPTU	77101008	12
13	BAMBANG CAHYONO	BRIPTU	78120150	13
14	JUNWONDO	BRIPTU	78060584	14
15	HARYANTO SRAWOSIR	BRIPTU	78110579	15
16	EFENDI MULYONO	BRIPTU	79030259	16
17	ANDI NATOWEN	BRIPTU	86120589	17
18	AGUS SUYANA	BRIPDA	68060027	18
19	MUJIB RIDWAN	BRIPDA	87071889	19
20	DARUL HANIP	BRIPDA	85111855	20

Jakarta,

2010

KASAT PAMPROT

H. SENDE HASIBUAN, SH
AKP HRP. 64060298

POL. DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DETASEMEN MARKAS

DINAS
HARI
TANGGAL
JAM

DAFTAR ANGGOTA SAT PAMPROT DENMA POLDA METRO JAYA
REGU III

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KETERANGAN
1	R. GILARIS S	BRIPDA	87101774	1
2	M. SATRIA YUDHA	BRIPDA	87320700	2
3	LANGGENG ANGGARA	BRIPDA	87321175	3
4	INDRA SUPRIYADI	BRIPDA	88320459	4
5	TANTO CAHYO. H	BRIPDA	88340491	5

Jakarta,

2010

KASAT PAMPROT

H. BENDI HASBIYAN, SH
AKP NRP. 84090298

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
BIRO OPERASI

NOTA DINAS

NO.POL : B / ND- 128 / IV / 2010 / Ro Ops

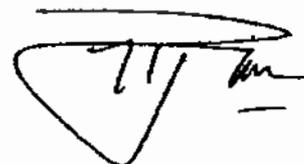
Kepada : Yth. KARO OPS POLDA METRO JAYA
Dari : KA SIAGA OPS "A" POLDA METRO JAYA
Perihal : Laporan Ploting Pasukan Siaga Polda Metro Jaya Dan Jajaran.

1. Rujukan :

- a. Keputusan Kapolri No.Pol : KEP / 7 / 1 / 2005 / tentang Organisasi dan tata kerja satuan satuan organisasi.
- b. Surat Keputusan Karo Ops Polda Metro Jaya No.Pol : SKEP / 10 / IX / 2008 tanggal 22 April 2008 tentang HTCK (Hubungan Tata Kerja) Biro Ops Polda Metro Jaya.

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini kami laporkan kuat piket dan ploting pasukan Polda Metro Jaya dan Jajaran pada Tanggal **10 APRIL 2010** berjumlah 8.477 Personil, sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 11 APRIL 2010
KA SIAGA OPS "A"



DJUWITO PURNOMO, SIK
AKBP NRP 67070629

Universitas Indonesia

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
BIRO OPERASI
SIAGA OPS "A"

KEKUATAN PIKET SIAGA POLDA METRO JAYA DAN IAJARAN

HARI : SABTU
TANGGAL : 10 APRIL 2010
PUKUL : 08.00 WIB

NO	SATUAN	CALL SIGN	PIMPINAN	KUAT PERSONIL	LOKASI	KET
A	POLDA METRO JAYA					
	1. BRIMOB					
	- DEN A	GADA 32	AKP BAMBANG	75 PERS	LD	KWITANG
		GADA 33	AKP SUGENG	75 PERS	LD	
		GADA 34	AKP SUWARNA	75 PERS	OBVIT	
		GADA 35	IPTU YONGKI	75 PERS		
	- DEN B	GADA 42	AKP AGUS	75 PERS	OBVIT	CIPINANG
		GADA 43	AKP SAKRAWI	75 PERS		
		GADA 44	AKP DIAN	75 PERS		
		GADA 45	AKP CAHYO	75 PERS	LD	
	- DEN C	GADA 52	AKP SADIKT	75 PERS	D.02	PANJULANG
		GADA 53	AKP HENDRI	75 PERS		
		GADA 54	AKP KUSNADI	75 PERS	OBVIT	
		GADA 55	IPTU WASONO	75 PERS	KEDUTAAM	
	- DEN D	GADA 62	AKP SAHRO EDI	75 PERS	OBVIT	CIKARANG
		GADA 63	AKP SUWARNA	75 PERS	PROTAP	
		GADA 64	AKP KARJAN	75 PERS	OPSNAL	
		GADA 65	AKP SALMAN	75 PERS		
	- DEN GEGANA	GADA 72	AKP SULYANTO	10 PERS		UNIT RBOM
		GADA 73	AKP JOKO.P	10 PERS	KPU	U. RESINTEL
		GADA 74	IPTU ALVIYANTO	10 PERS		UNIT CRT
		GADA 75	AKP HERMOYO	40 PERS		UNIT RANTIS
		GADA 76	AKP S.WAHYUDI	(20 KR 2)		UNIT PATMOR
	2. DIT SAMAPTA					
	- SAT PATMOR	TOMBAK 51	AKP SARWONO	90 PERS (15 KR R4)		PATKO
		TOMBAK 52	AKP M. AHDJ	60 PERS (30 KR R2)		PATMOR
		TOMBAK 53	AKP BINTANG	90 PERS		YANWAL
		TOMBAK 54	AKP MULIONO	81 PERS		PENJAGAAN UTAMA
	- SAT DALMAS	TOMBAK 55	AKP ELOM COSLAN	120 PERS		YANPAM

Universitas Indonesia

	TOMBAK 61	AKP WIDODO	68 PERS		D.02
	TOMBAK 62	AKP MARSITO	75 PERS	PIKET	MAKO PMJ
	TOMBAK 63	AKP RASYID	82 PERS		MAKO PMJ
	TOMBAK 64	AKP SAHRONI	85 PERS		MAKO PMJ
	TOMBAK 65	AKP MISNO	80 PERS		MAKO PMJ
	TOMBAK 66	AKP SUWARNA	80 PERS		LEPAS DINAS
	TOMBAK 67	AKP WARSITO	80 PERS		MAKO PMJ
	TOMBAK 68		80 PERS		LEPAS DINAS
	TOMBAK 69	AKP SUHARTO	80 PERS		MAKO PMJ
	- UNIT SATWA	AKP YULI	21 PERS		
3. DIT LANTAS					
- SAT PATWAL	CAKRA 71	KOMPOL H. IAZARI	86 PERS		PMJ
	CAKRA 72		(61 KR R2 &		
	CAKRA 73		25 KR R4)		
- SAT GATUR	CAKRA 74	AKP KETUT DANE	174 PERS		
	CAKRA 81		(74 KR R2 &		
	CAKRA 82		4 KR R4)		
	CAKRA 83				
	CAKRA 84				
- SAT PJR	CAKRA 85	PTU ESTU	90 PERS		
	CAKRA 91		(33 KR R4)		
	CAKRA 92				
	CAKRA 93				
- TMC	CAKRA 94	AKP SUGENG	20 PERS		
4. DIT RESKRIM UM	PIKET PANAH	KOMPOL ENI S	9 PERS		PMJ
- JATANRAS		KOMPOL AMIRUDIN	9 PERS		
- RENAKTA		BRIPTU TITTA R	2 PERS		
- RANMOR		AIPTU SUWANDI	5 PERS		
- RESMOB		KOMPOL MADIN	14 PERS		
- IDENTIFIKASI		AKP KAIMAN MALIK	4 PERS		
5. DIT RESKRIMSUS		KOMPOL NYOMAN A	5 PERS		PMJ
6. DIT MARKOBA		KOMPOL KRIS SUBANDRIJO	14 PERS		PMJ
7. DIT INTELKAM	PIKET KRIS	KOMPOL SUKARDI	6 PERS		PMJ
-SAT A		KOMPOL PAIDI	6 PERS		
-SAT B		KOMPOL MARYONO	6 PERS		
-SAT C		KOMPOL SUGITO	6 PERS		
-SAT D		KOMPOL CATUR	6 PERS		

6.RESTRO DEPOK	DEPOK OD	KOMPOL SAMANTA	330 PERS	DEPOK
7.RESTRO BEKASI KOTA	BEKASI OD	KOMPOL SURO	266 PERS	BEKASI
8.RESTRO BEKASI KAB	CIKARANG OD	KOMPOL SIANIPAR	350 PERS	KAB BEKASI
9.RESTRO TNG KOTA	TNGRANGOD	AKP SUKIMAN, SH	256 PERS	TANGERANG
10.RESTRO TNG KAB	RAKSA OD	AKP SUHARYONO	352 PERS	KAB.TNGRNG
11.KPPP	KPPP	AKP GATOT	154 PERS	KPPP
12.KEP.SERIBU	KEP.SERIBU	AKP SUMAROTO	155 PERS	KEP.SERIBU
13.BANDARA SOETTA	BANDARA OD	AKP JAJANG	93 PERS	BANDARA
JUMLAH PERSONEL			5.456 PERS	

Ket:

Jumlah Keuatan Seluruhnya : 8.477 Personil , 77 Unit KR R-4, 185 Unit KR R-2

JAKARTA, 10 APRIL 2010

MENGETAHUI
PA SAGA OPS "A"


FERYO SANO GINTING, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79101237

Universitas Indonesia

POLRI DAERAH METRO JAYA
 BIRO OPERASI
 Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190

DAFTAR HADIR APEL SIAGA FUNGSI POLDA METRO JAYA

HARI : SABTU
 TANGGAL : 10 APRIL 2010
 PUKUL : 08.00 WIB

NO	FUNGSI	JUMLAH	HADIR	KURANG	KET
1.	DIT RESKRIM UM	9	2	7	7 DINAS
2.	DIT RESKRIM SUS	6	5	1	1 DINAS
3.	DIT NARKOBA	14	6	8	8 DINAS
4.	DIT INTELKAM	6	2	4	4 DINAS
5.	DIT PAM ORVIT	5	2	3	3 DINAS
6.	DIT LANTAS	17	1	16	16 DINAS
7.	BIRO LOGISTIK	7	1	6	6 DINAS
8.	BID TELEMATIKA	3	1	2	2 DINAS
9.	DENMA	3	1	2	2 DINAS
10.	SPK UNIT I	8	4	4	4 DINAS
11.	SIAGA OPS "A"	25	4	21	1 DINAS 2 SAKIT, 1 BKO
12.	SAT BRIMOBDA	50	1	49	49 DINAS
13.	BID DOKRES	5	2	3	3 DINAS
14.	WATTAM UM	10	9	1	1 DINAS
15.	WATTAM NARKOBA	9	8	1	1 DINAS
16.	HUMAS	2	1	1	1 DINAS
17.	BID PROPAM	18	8	10	8 DINAS
19.	BID KEU	-	-	-	TIDAK HADIR
20.	DEN SAT	10	3	7	7 DINAS
21.	BO BINAMITRA	2	1	1	1 DINAS
22.	DIT SAMAPTA	258	1	257	257 DINAS
	JUMLAH	469	62	407	404 DINAS 2 SAKIT, 1 BKO

Jakarta, 10 APRIL 2010
 PA SIAGA OPS "A"


 FERID SANO GINTING
 AJUN KOMSABUS POLISI NRP 79101237

Universitas Indonesia

POLRI DAERAH METRO JAYA
BIRO OPERASI
Jl. Jend. Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190

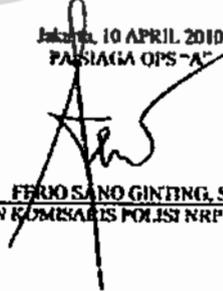
DAFTAR NAMA APEL PIKET FUNGSI

HARI/UGI. : SABTU, 10 APRIL 2010
 PUKUL. : 08.00 Wtb

NO	KESATUAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DIT. RESKRIM UM Jumlah : 9 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 7 Orang	1. KOMPOL EHS 2. KOMPOL RITA IRIANA 3. AKP INYOMAN 4. AKP EPI P 5. APTU HARUN 6. BRPKA DIAH 7. BRIPTU SAMILAN 8. BRIPTU ARIEF 9. BRIPTU SUTIKNO	DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR HADIR
2.	DIT. RESKRIM SUS Jumlah : 6 Orang Hadir : 5 Orang Kurang : 1 Orang	1. KOMPOL NYOMAN ARDANA 2. AKP AZHAR 3. AKP RONGGEO 4. BRKADIR YUINI 5. BRIGADIR FITRI YONALDI 6. BRIPTU DWI	DINAS HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR
3.	DIT. KARKOBA Jumlah : 14 Orang Hadir : 6 Orang Kurang : 8 Orang	1. KOMPOL KRIS SUBANDRIO 2. KOMPOL SAMUDHO 3. IPDA PETRUS 4. IPDA CHITTYA 5. APTA SULAEMAN 6. BRPKA AGUS PRAYITNO 7. BRIGADIR IMAN BERLIAN 8. BRIGADIR ARI WOROYO 9. BRIGADIR SUTRISNO, SH 10. BRIGADIR AGUS WICAKSONO 11. BRIGADIR ASEP HERMAWAN 12. BRIPTU YASMER 13. BRIPTU DASA HERUDIN 14. BRIPDA ANDI KORNATAN	HADIR HADIR DINAS HADIR HADIR DINAS DINAS DINAS HADIR DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR
4.	DIT. INTELKAM Jumlah : 6 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 4 Orang	1. KOMPOL SUKARDI 2. AKP SUPRAPTO 3. BRIGADIR DIDIK 4. BRIPTU KIBAL 5. BRIPDA HERU 6. BRIPDA RAHMAT	DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR HADIR
5.	DIT. PAM OBVIT Jumlah : 5 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 3 Orang	1. AKP ADIF 2. BRPKA WAKIJAN 3. BRIGADIR TABAH 4. BRIGADIR ACHUNG 5. BRIGADIR DULIADIONO	HADIR DINAS DINAS DINAS HADIR
6.	DIT. LANTAS Jumlah : 19 Orang Hadir : 1 Orang Kurang : 18 Orang	1. APTU KASNO	HADIR (18 ANGGOTA DINAS)
	RO. LOGISTIK Jumlah : 7 Orang Hadir : 1 Orang Kurang : 6 Orang	1. APTA AHMAD ALI 2. BRIPTU TAUFIK II 3. BRIPTU DANANG 4. BRIPTU ALFIAN 5. BRIPDA YANDA 6. BRIPDA SARNO 7. BIRU LANTUNG	DINAS HADIR DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS

15.	WATAH KARKOBA Jumlah : 9 Orang Hadir : 8 Orang Kurang : 1 Orang	1. APTU AGUS TAMBAJ 2. BRIGADIR SUPENDI 3. BRIGADIR SUMARDIYOTO 4. BRIPTU YUDEL 5. BRIPTU DENI 6. BRIPTU ISHAR 7. BRIPTU MUFID 8. BRIPDA DIAJI 9. BRIPDA FERRI	HADIR HADIR HADIR DINAS RS KRAMAT JATI HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR
16.	HUMAS Jumlah : 2 Orang Hadir : 1 Orang Kurang : 1 Orang	1. BRIPDA FANRI 2. PNS WIDODO	DINAS HADIR
17.	BID. PROFAM Jumlah : 18 Orang Hadir : 8 Orang Kurang : 10 Orang	1. AKP SUHARI 2. APTU ABDUL HARIS 3. APTU LAHANUDIN 4. BRIPKA AGUS R 5. BRIPKA DADANG 6. BRIPKA PURWANTONO 7. BRIPKA DWI M 8. BRIGADIR PARULIAN 9. BRIPTU MUKHILISON 10. BRIPDA KEZA 11. BRIPKA FERRY 12. BRIGADIR BOY 13. AKP BAMBANG 14. IPDA SUGHARTONO 15. APDA SARTONO 16. BRIPKA SUHENDAR 17. BRIGADIR WIDODO 18. BRIGADIR YUDHO	HADIR HADIR DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR HADIR HADIR HADIR HADIR
18.	DEN SUS EKAT Jumlah : 10 Orang Hadir : 3 Orang Kurang : 7 Orang	1. AKP RINI UBAS 2. AKP SUKAR 3. AKP SANTOSO 4. IPTU TEGUH 5. APTU MANUNG P 6. BRIPKA SURACHMAN 7. BRIGADIR ROGANDA 8. BRIGADIR BEMO SANTI 9. BRIPTU DAVID P 10. BRIPTU MAHFUD	HADIR DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS HADIR HADIR
19.	RD. BIDAMITRA Jumlah : 2 Orang Hadir : 1 Orang Kurang : 1 Orang	1. APDA SUJONO 2. BRIGADIR RAHMAT	DINAS HADIR
20.	DIT. SAMAPTA Jumlah : 258 Orang Hadir : 1 Orang Kurang : 257 Orang	1. AKP TAIBUD	HADIR
21.	BID KEU Jumlah : - Orang Hadir : - Orang Kurang : - Orang	TIDAK HADIR APPL	TIDAK HADIR APPL

Jakarta, 10 APRIL 2010
PANSIAGA OPS "A"


FERI SANO GINTING, SIK
ALUN KOMSARIS POL. ISI NRP 79101237

Universitas Indonesia

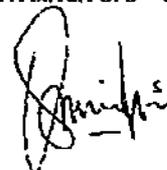
POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
BIRO OPERASI

DAFTAR HADIR APEL SIAGA FUNGSI POLDA METRO JAYA

HARI : RUMAH
TANGGAL : 09 APRIL 2010
WAKTU : 08.00 SD 20.00 WIB

NO	FUNGSI	JUMLAH	HADIR	KURANG	KET
1	DIT RENKRIM UM	9	5	4	DINAS: 4
2	DIT RENKRIM SUS	5	5	0	HADIR LENGKAP
3	DIT NARKOBA	12	4	8	DINAS: 8
4	DIT INTELKAM	0	0	0	TIDAK HADIR APEL
5	DIT PAM OBVIT	5	2	3	DINAS: 3
6	DIT LANTAS	19	1	18	DINAS: 18
7	BIRO LOGISTIK	0	0	0	TIDAK HADIR APEL
8	BIRO TELEMATIKA	3	1	2	DINAS: 2
9	ITENMA	4	1	3	DINAS: 3
10	SPK UNIT II	7	2	5	DINAS: 5
11	SIAGA OPS "C"	22	21	1	SAKIT: 1
12	SAT BRIGORDA	50	1	49	DINAS: 49
13	BIDYAKKES	5	1	4	DINAS: 4
14	WATTAH UM	10	1	9	DINAS: 9
15	WATTAH NARKOBA	10	1	9	DINAS: 9
16	IRMAS	0	0	0	TIDAK HADIR APEL
17	BIRO PROFAM	20	2	18	DINAS: 18
18	INDO KIRI	3	3	0	HADIR LENGKAP
19	DEN SSAT	21	3	18	DINAS: 18
20	BIRO BINAMITRA	2	1	1	DINAS: 1
21	RO PERS	0	0	0	TIDAK HADIR APEL
22	DIT SAMAPTA	266	1	265	DINAS: 265
	JUMLAH	473	56	417	DINAS: 416, SAKIT: 1

Jakarta, 09 APRIL 2010
A.n KA SIAGA OPS "C"
PA SIAGA OPS "C"



PRIYO UTOMO TEGUH SANTOSO, SH, SIK
AKP NRP 79051482

Universitas Indonesia

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
BIRO OPERASI

DAFTAR NAMA PIKET FUNGSI
HARI/TANGGAL : RUM'AT, 09 APRIL 2010
PKL : 08.00 WIB

NO	KESATUAN	NAMA	KETERANGAN
1.	DIT. RESKRIM UM JUMLAH : 9 HADIR : LENGKAP	1. KOMPOL H. SUMARYONO 2. AKP B. WAHYU H 3. AKP FIRDAUS 4. APTU AGUS 5. APTU SUPRIYADI 6. APTU TALFIK 7. APTU SAFEI 8. AIPDA AHMAD 9. BRIPKA SUPADI	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
2.	DIT. RESKRIM SUS JUMLAH : 5 HADIR : LENGKAP	1. AKP NGADIMIN 2. AKP SUNTO ILITONGA 3. APTU HERMANSYAH 4. APTU BINSAR SAGALA 5. BRIPKA WAHYUDI	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
3.	DIT. MARKOBA JUMLAH : 12 HADIR : 4 KURANG : 8	1. AKP HERGIL 2. BRIPKA JARMANTO 3. BRIGADIR SAGIANA 4. BRIGADIR ROY	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
4.	DIT. INTELKAM	N I H I L	TIDAK HADIR APEL
5.	DIT. PAM OBVT JUMLAH : 5 HADIR : LENGKAP	1. AKP RAKIDI 2. BRIGADIR YULIANTORO 3. BRIGADIR WAHYU 4. BRIPTU SETIAWAN 5. BRIPDA RAGIL	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
6.	DIT. LANTAS JUMLAH : 19 HADIR : LENGKAP	1. AKP SUNARTO 2. APTU KRISNAN 3. APTU ARIF RUBI 4. APTU MUHAMMAD 5. AIPDA SUZAN.H.M 6. AIPDA MT RIDHA P 7. BRIPKA SUTIMAN 8. BRIPKA YUSWANTORO 9. BRIPKA CATUR 10. BRIPTU YOKA M 11. BRIPTU PURNIANTO 12. BRIPTU WITRADI 13. BRIPTU ROMI W 14. BRIPDA CHRISTOPEL 15. BRIPDA ARI WIMBO AMARNO	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS

		16. BRIPDA FAJAR SUBEKTI 17. BRIPDA TATAK 18. BRIPDA GILBERT 19. BRIPDA IMAM SUPANGAT	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
7.	BIRO LOGISTIK	N I H I L	TIDAK HADIR APEL
8.	BID. TELEMATIKA JUMLAH : 3 HADIR : LENGKAP	1. BRIPKA ROBANI 2. BRIPKA MURDIN 3. PENGATUR TRISNO	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
9.	DENMA JUMLAH : 4 HADIR : LENGKAP	1. BRIPTU SUSANTO 2. PENDA 1 KATIMAN 3. PENGATUR PAINDO 4. LISTRIK RANTAWI	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
10.	SPK UNIT II JUMLAH : 7 HADIR : LENGKAP	1. KOMPOL ARIEF DIMJATI 2. IPTU SANTJE 3. BRIPKA AMRIN P 4. BRIPTU DITA YURILLAH 5. BRIPTU SANDRA 6. BRIPTU DEWI 7. BRIPDA MENDRA P	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
11.	SAT. BRIMOBDA JUMLAH : 50 HADIR : LENGKAP	1. BRIPKA INDRA (50 PERSONIL)	HADIR/DINAS
12.	BID. DOKKES JUMLAH : 5 HADIR : LENGKAP	1. BRIGADIR DEWI 2. BRIPTU SUNARSO 3. PENATA 1 DI ARMAIDA 4. PENGATUR YUSRIJIANA 5. PENGDA IMAMUL	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
13.	WATTAH UM JUMLAH : 10 HADIR : LENGKAP	1. AIPTU MS. TAMBA 2. AIPDA SUARDI 3. BRIPTU SIGIT NOVIADI 4. BRIPTU I GEDE AGUNG 5. BRIPTU AGUNG 6. BRIPDA EKA PASUS 7. BRIPDA IHD APRIYANTO 8. BRIPDA RETNO DWI 9. BRIPDA DANI 10. BRIPDA RAHMAD DINUS	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS
14.	WATTAH NARKOBA JUMLAH : 10 HADIR : LENGKAP	1. AIPTU AGUS RIYADI 2. AIPTU BUDI WALUYO 3. BRIGADIR ASEP MUSLIM 4. BRIGADIR WAHYU 5. BRIPTU HIMAWAN 6. BRIPTU SAEPUJIN 7. BRIPDA AGUNG 8. BRIPDA REVY 9. BRIPDA PIPIT 10. BRIPDA WAYAN IMMAS	HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS HADIR/DINAS

22.	SIAGA OPS "C"	1. AKBP SUCIPTO	HADIR/DINAS
	JUMLAH : 22	2. AKP PRIYO UTOMO TS, SH, SIK	HADIR/DINAS
	HADIR : 21	3. AIPTU NUR ROHYAD	HADIR/DINAS
	KURANG : 1	4. BRIGADIR SENO	HADIR/DINAS
		5. BRIPTU GUFTO	HADIR/DINAS
		6. BRIPTU JEMMI	HADIR/DINAS
		7. BRIPTU ENDRA	HADIR/DINAS
		8. BRIPTU PURWANTO	HADIR/DINAS
		9. BRIPTU BAYU	HADIR/DINAS
		10. BRIPTU HABIBI	SAKIT
		11. BRIPTU ARIF	HADIR/DINAS
		12. BRIPDA HERI PAMUNGKAS	HADIR/DINAS
		13. BRIPDA JAKA JEVALDI	HADIR/DINAS
		14. BRIPDA ANDIK H	HADIR/DINAS
		15. BRIPDA DITTO RAMADIANTO	HADIR/DINAS
		16. BRIPDA LUTFI REZI	HADIR/DINAS
		17. BRIPDA TEGUH WIDODO	HADIR/DINAS
		18. BRIPDA FAUZAN AZIMAH	HADIR/DINAS
		19. BRIPDA TYAS OKTARIA	HADIR/DINAS
		20. BRIPDA INTAN	HADIR/DINAS
		21. BRIPDA ERNA RINA	HADIR/DINAS
		22. BRIPDA SEPTI IKA	HADIR/DINAS

KETERANGAN :

GADA

DEN A (75 ORANG) : KWITANG

PENGENDALI : AKBP AMOSTIAN

DEN B (75 ORANG) : CIPINANG

PENGENDALI : AKBP ISKANDAR

DEN C (75 ORANG) : PAMULANG

PENGENDALI : AKBP AGUNG

DEN D (75 ORANG) : CIKARANG

PENGENDALI : AKBP IWAN SAJALA

GEGANA (90 ORANG)

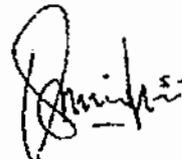
PENGENDALI : KOMPOL HERI

TOMBAK

PIKET : KOMPI II (AKP WARSITO), 120 PERSONIL

Jakarta, 09 APRIL 2010

PA SIAGA OPS "C"



PRIYO UTOMO TEGUH SANTOSO, SH, SIK
AKP NRP 79051482

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
BIRO OPERASI
SIAGA OPS "C"

KEKUATAN PIKET SIAGA POLDA METRO JAYA DAN IAJARAN

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 09 APRIL 2010
PUKUL : 08.00 S/D 20.00 WIB

NO	SATUAN	CALL SIGN	PIMPINAN	KUAT PERSONIL	LOKASI	KET
A	POLDA METRO JAYA					
	1. BRIMOB					
	- DEN A	GADA 32	AKP BAMBANG	75 PERS	002	KWITANG
		GADA 33	AKP SUGENG	75 PERS	OPSNAL	
		GADA 34	AKP SUWARNA	75 PERS	OBVT	
		GADA 35	IPTU YONGKI	75 PERS	ON CALL	
	- DEN B	GADA 42	AKP AGUS M	75 PERS	OBVT	CIPIWANG
		GADA 43	AKP SATRAWI	75 PERS	ON CALL	
		GADA 44	AKP DIAN	75 PERS	ON CALL	
		GADA 45	AKP CAHYO B	75 PERS	OPSNAL	
	- DEN C	GADA 52	AKP ALI SADIKIN	75 PERS	LEPAS DINAS	PAMULANG
		GADA 53	AKP HENDRIK	75 PERS	ON CALL	
		GADA 54	AKP KUSNADI	75 PERS	OBVT	
		GADA 55	IPTU WASOND	75 PERS	ON CALL	
	- DEN D	GADA 62	AKP SARWOEDI	75 PERS	ON CALL	CIKARANG
		GADA 63	AKP SUWARNA	75 PERS	LEPAS DINAS	
		GADA 64	AKP KARMAN	75 PERS	ON CALL	
		GADA 65	AKP SALMAN	75 PERS	LEPAS DINAS	
	- DEN GEGANA	GADA 72	AKP SUYANTO	10 PERS	ON CALL	UNIT RBOM
		GADA 73	IPTU ALFIANTO	10 PERS	ON CALL	U. RESINTEL
		GADA 74	AKP JOKO	10 PERS	ON CALL	UNIT CRT
		GADA 75	AKP S.WAHYUDI	40 PERS	ON CALL	UNIT KARTIS
		GADA 76	AKP HERMOYD	20 KR 2	ON CALL	UNIT PATMOR
	2. DIT SAMAPTA					
	- SAT PATMOR	TOMBAK 51	AKP SARWONO	90 PERS	MAKO PMJ	PATKO
		TOMBAK 52	AKP M. AHDI	60 PERS	MAKO PMJ	PATMOR
		TOMBAK 53	AKP BINTANG	189 PERS	MAKO PMJ	KEJATI
		TOMBAK 54	AKP MUJIHONO	81 PERS	MAKO PMJ	KPK
		TOMBAK 55	AKP ELOM COSLAN	168 PERS	MAKO PMJ	MK

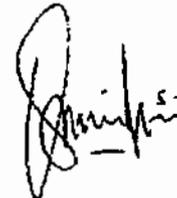
- SAT DALMAS	TOMBAK 61 TOMBAK 62 TOMBAK 63 TOMBAK 64 TOMBAK 65 TOMBAK 66 TOMBAK 67 TOMBAK 68 TOMBAK 69	AKP WIDODO AKP WARSITO AKP ARASID AKP SAHRONI AKP MISNO AKP SUWARNA AKP WARSITO AKP DARMAJI AKP SUHARTO	120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS 120 PERS	MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ MAKO PMJ	LEPAS DINAS PINKET OR CIKEAS ON CALL LEPAS DINAS ON CALL LEPAS DINAS ON CALL ON CALL
- UNIT SATWA		AKP YUJI	18 PERS	PETAMBURAN	
- SAR		AKP SILABAN	30 PERS	MAKO PMJ	
3. DIT LANTAS					
- SAT PATWAL		KOMPOL H. JAZARI	166 PERS	MAKO PMJ	
- SAT GATUR		AKP KETUT DANE	175 PERS	PANCORAN	
- SAT PIR		IPTU ESTU	85 PERS	PANCORAN	
- TMC		AKP SUMARTO	19 PERS	MAKO PMJ	
- LAKA		AKP SIMON	30 PERS	PANCORAN	
4. DIT RESKRIM UM		KOMPOL SUMARYONO	9 PERS	MAKO PMJ	
5. DIT KRIMSUS		AKP NGADIMIN	5 PERS	MAKO PMJ	
6. DIT MARKOBA		AKP HENGIL	12 PERS	MAKO PMJ	
7. DIT INTELKAM		TIDAK HADIR APEL	N / T / L	MAKO PMJ	
- SAT A		AKP IDA SUTRIYANTI	5 PERS	WILKOTA DEPOK	
- SAT B		KOMPOL SARWONO	5 PERS	KNTR BEACUKAI	
- SAT C		KOMPOL ELISRIUS PITORO	6 PERS	ISTORA SENAYAN	
- SAT D		KOMPOL CATUR BAMBANG	5 PERS	ON CALL	
- SAT E		KOMPOL MARGONO	6 PERS	ISTIQAL	
- SAT F		KOMPOL SRYONO	6 PERS	J 65	
B. DENHWA		BRIPTU SUSANTO	4 PERS	MAKO PMJ	

	9. LOGISTIK		TIDAK HADIR APEL	N I H I L	MAKO PMJ
	10. PAM OBVIT		AKP RAKIDI	5 PERS	MAKO PMJ
	11. DEN 88		AKP WAGIRIN	22 PERS	MAKO PMJ
	12. WATTAH UM		AIPTU MS TAMBA	10 PERS	MAKO PMJ
	13. BINAMITRA		AIPTU MARYANTO	2 PERS	MAKO PMJ
	14. BID TELEMATIKA		BRUPKA ROBANI	3 PERS	MAKO PMJ
	15. SPK POLDA METRO JAYA		KOMPOL ARIEF DIMLIATI	8 PERS	MAKO PMJ
	16. WATTAH NARKOBA		AIPTU MAYER. M	10 PERS	MAKO PMJ
	17. SIAGA OPS "C"		AKBP SUCIPTO	22 PERS	MAKO PMJ
	18. BID HUMAS		TIDAK HADIR APEL	N I H I L	MAKO PMJ
	19. BID DOKKES		BRIGADIR DEWI	5 PERS	MAKO PMJ
	20. BID PROPAM		AKP YUDIANTA	20 PERS	MAKO PMJ
	21. RO PERS		TIDAK HADIR APEL	N I H I L	MAKO PMJ
	JUMLAH PERSONEL :			3.524 PERS	
5	POLRES JAJARAN PMJ				
	1. RESTRO JAKPUS	PUSAT OO	KOMPOL PENTUS. N	496 PERS	JAKPUS
	2. RESTRO JAKUT	UTARA OO	KOMPOL IRAFAN. P	643 PERS	JAKUT
	3. RESTRO JAKBAR	BARAT OO	KOMPOL HERI DIAN	849 PERS	JAKBAR
	4. RESTRO JAKSEL	SELATAN OO	AKP SUMARYONO	582 PERS	JAKSEL
	5. RESTRO JAKTIM	TIMUR OO	AKBP SUPARNO	728 PERS	JAKTIM
	6. RESTRO DEPOK	DEPOK OO	KOMPOL ADE. R	322 PERS	DEPOK
	7. RESTRO BEKASI KOTA	BEKASI OO	KOMPOL WIBISONO	365 PERS	BEKASI

8.RESTRO BEKASI KAB	CIKARANG OD	KOMPOL NUROHMAD	325 PERS	KAB BEKASI
9.RESTRO TNG KOTA	TNGRNGOD	AKP M.NEJI YUSUF	262 PERS	TANGERANG
10.RESTRO TNG KAB	RAKSA OD	AKP DOLI SUNDORO	349 PERS	KAB.TNGRNG
11.KPPP	KPPP	AKP RADITIA	114 PERS	KPPP
12.KEP.SERIBU	KEP.SERIBU	AKP KALIMUDA. S	30 PERS	KEP. SERIBU
13.BANDARA SOETTA	BANDARADO	AKP TASKIR EFENDI	94 PERS	BANDARA
JUMLAH PERSONEL			5.159 PERS	

Kel:
 Jumlah Kekuatan Seluruhnya : 8.683 Personel

JAKARTA, 09 APRIL 2010
 PA. SIAGA OPS "C"



PRIYO UTOMO TEGUH SANTOSO, SH, SK
 AKP NRP 79051482

Universitas Indonesia

POLRI DAERAH METRO JAYA
BIRO OPERASI

DAFTAR NAMA APEL PIKET FUNGSI
Hari / Tanggal: Minggu, 11 April 2010
Pkl 08.00 Wib

NO	KESATUAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	DIT LANTAS Jumlah: 19 Orang Hadir : 1 Orang Kurang: 18 Orang	1. AKP SUNARTO 2. AIPTU KRISHAN M 3. AIPTU ARIF 4. AIPTU MUHAMMAD AR 5. AIPDA RICHHO 6. AIPDA SUTIMAN 7. AIPDA SUSAN 8. BRIPKA YUSMANTO 9. BRIPKA JHON SISWANTO 10. BRIPTU YOKA 11. BRIPTU KURNIANTO 12. BRIPTU WITRADI 13. BRIPTU TATAG 14. BRIPTU RONI 15. BRIPDA DAVID 16. BRIPDA IMAM 17. BRIPDA KRISTOPEL 18. BRIPDA WIMBO 19. BRIPDA FAJAR	Dinas Dinas Dinas Hadir Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
02.	SAT BRIMOBDA Jumlah: 50 Orang Hadir : 1 Orang Kurang: 49 Orang	1. IPTU END 2. 49 PERSONEL	Hadir Dinas
03.	DIT SAMAPTA Jumlah: 254 Orang Hadir : 1 Orang Kurang: 253 Orang	1. KOMPOL ENDANG 2. 254 PERSONEL	Hadir Dinas
04.	DIT PAM OBVIT Jumlah: 5 Orang Hadir : 5 Orang Kurang: - Orang	1. AKP SUGENG 2. BRIGADIR ANITO WIBOWO 3. BRIPDA RANDI 4. BRIPDA MARTIN 5. BRIPTU AFRONO	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
05.	BIRO BINAMITRA Jumlah: 2 Orang Hadir : 2 Orang Kurang: - Orang	1. AIPTU WAGIMAN 2. BRIPDA SIGIT	Hadir Dinas
06.	BID KEUANGAN	TIDAK HADIR APEL	

07.	DIT RESKRIM SUS Jumlah : 6 Orang Hadir : 6 Orang Kurang : - Orang	1. KOMPOL SUTONO 2. AKP SUNARTO 3. BRIGADIR CECEP 4. IPDA RICARDO 5. APTU NYOMAN 6. BRIPTU DIAN DWI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
08.	DEN 88 AT Jumlah : 13 Orang Hadir : 13 Orang Kurang : - Orang	1. AKP EDI W. 2. AKP BUDI E. 3. AKP SUBARDI 4. APTU RB SIAGIAN 5. BRIPKA BASUKI 6. BRIPKA HASAN 7. BRIGADIR HARIANSYAH 8. BRIPTU AGUNG PURNOMO 9. BRIPDA DESMON 10. AKP GALINGGANG 11. BRIPKA M. TAMBA 12. BRIPKA HENDRIK 13. BRIPDA RAHMAT	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
09.	WATTAN UM Jumlah : 10 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 1 Orang	1. APTU MS TAMBA 2. APTDA SUHARDI 3. BRIPTU SIGIT NONRIADI 4. BRIPTU I GEDE AGUNG 5. BRIPTU AGUNG 6. BRIPDA EKA PASUS 7. BRIPDA ED APRYANTO 8. BRIPDA RETNO BINTARI 9. BRIPDA DWI APPRIJA 10. BRIPDA RAHMAT BUNUS	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Dinas (Kr. Jati) Hadir Hadir Hadir Hadir
10.	SPK POLDA METRO JAYA Jumlah : 7 Orang Hadir : 6 Orang Kurang : 1 Orang	1. KOMPOL DIDIK 2. IPTU YULI KARTIKA 3. BRIPKA SUGITO 4. BRIPTU DYAH TRI UTAMI 5. BRIPTU DERMA MULYAWAN 6. BRIPTU AYU TISNAWATI 7. BRIPTU LINA NOVALIANTO	Hadir Hadir Hadir Cuti Hadir Hadir Hadir
11.	BID TELEMATIKA	TIDAK HADIR APEL	
12.	BID DOKKES Jumlah : 5 Orang Hadir : 5 Orang Kurang : - Orang	1. PENATA 1 DR. TATI 2. BRIGADIR YANI 3. BRIPTU M. MUH 4. PENGDA AYU 5. PENGDA 1 TUTI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
13.	DENMA Jumlah : 4 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 2 Orang	1. PENDA SUHARI 2. BRIPTU SUTRISNO 3. PENGDA MOMON 4. PHL ARNO	Hadir Hadir Dinas Dinas
14.	BIRO PERSONIL	TIDAK HADIR APEL	

15.	BID HUMAS	TIDAK HADIR APEL	
16.	WATTAH NARKOBA Jumlah : 10 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 1 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU AGUS 2. AIPTU BUDI W 3. BRIGADIR ASEP M 4. BRIGADIR WAHYU 5. BRIPTU SYARIFUDIN 6. BRIPTU HIMAWAN 7. BRIPTU AGUNG 8. BRIPDA REVI 9. BRIPDA WAYAN 10. BRIPDA PIPT 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas (Kr. Jat)</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
17.	BID PROPAM Jumlah : 14 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 12 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP DEDED 2. AIPTU ANDI 3. AIPTU SURADIONO 4. AIPDA MARYON 5. BRIPKA SUBAGYO 6. BRIPKA ANDI H. 7. BRIPKA HENDRAWAN 8. BRIPKA CECEP 9. BRIGADIR RAHMAT 10. BRIPDA YOGA 11. BRIPDA ALWI 12. AIPTU ANDI R. 13. BRIPTU HABIBI 14. BRIPDA ALBAERT 	<p>Hadir</p>
18.	DIT NARKOBA Jumlah : 12 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPOL SUPRIYADI 2. KOMPOL SYAMSIRIL ILYAS 3. KOMPOL ENDANG SUTISNA 4. BRIPKA TUGIYO 5. BRIPKA TOTO 6. BRIPKA SUMARNO 7. BRIPKA DHO WAHYUDI 8. BRIGADIR ROSDIANA M. 9. BRIGADIR ARIF SUHONO 10. BRIGADIR AGUS SALIM 11. BRIGADIR DENI TRI PUTRA 12. BRIPTU SANDI PURNAMA 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Sakit</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
19.	BIRO LOGISTIK Jumlah : 7 Orang Hadir : 7 Orang Kurang : - Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU PRAPTO 2. BRIPDA ASEP 3. BRIPTU SYAHRIR 4. BRIPTU HERI 5. BRIPTU ROBI 6. BRIPTU ARIFIN 7. JURU SUSILO 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
20.	DIT INTELKAM Jumlah : 7 Orang Hadir : 3 Orang Kurang : 4 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPOL SUWARSO 2. BRIPDA RENER BALTAZAR 3. BRIPKA JUVENTUS 4. BRIGADIR RENDI 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>

07.	DIT RESKRIM SUS Jumlah : 6 Orang Hadir : 6 Orang Kurang : - Orang	1. KOMPOL SUTIONO 2. AKP SUNARTO 3. BRIGADIR CECEP 4. IPDA RICARDO 5. APTU NYOMAN 6. BRIPTU DIAN DWI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
08.	DEN 88 AT Jumlah : 13 Orang Hadir : 13 Orang Kurang : - Orang	1. AKP EDI W. 2. AKP BUDI E. 3. AKP SUBARDI 4. APTU RB SIAGIAN 5. BRIPKA BASUKI 6. BRIPKA HASAN 7. BRIGADIR HARIANSYAH 8. BRIPTU AGUNG PURNOMO 9. BRIPDA DESMON 10. AKP GALINGGING 11. BRIPKA M. TAMBA 12. BRIPKA HENDRIK 13. BRIPDA RAHMAT	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
09.	WATAH UM Jumlah : 10 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 1 Orang	1. APTU NSTAMBA 2. APTA SUHARDI 3. BRIPTU SIGIT NOVRIADI 4. BRIPTU I GEDE AGUNG 5. BRIPTU AGUNG 6. BRIPDA EKA PASUS 7. BRIPDA BD APRYANTO 8. BRIPDA RETNO BINTARI 9. BRIPDA DWI APRILIA 10. BRIPDA RAHMAT BINUS	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Dinas (Kr. Jati) Hadir Hadir Hadir Hadir
10.	SPK POLDA METRO JAYA Jumlah : 7 Orang Hadir : 6 Orang Kurang : 1 Orang	1. KOMPOL DIDIK 2. IPTU YULI KARTIKA 3. BRIPKA SUGITO 4. BRIPTU DYAH TRI UTAMI 5. BRIPTU DEPKA MULYAWAN 6. BRIPTU AYU TISNAWATI 7. BRIPTU LINA NOVALIANTO	Hadir Hadir Hadir Cuti Hadir Hadir Hadir
11.	BID TELEMATIKA	TIDAK HADIR APEL	
12.	BID DOKKES Jumlah : 5 Orang Hadir : 5 Orang Kurang : - Orang	1. PENATA 1 DR. TATI 2. BRIGADIR YANI 3. BRIPTU M. NUH 4. PENGDA AYU 5. PENGDA 1 TUTI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
13.	DENMA Jumlah : 4 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 2 Orang	1. PENDA SUHARI 2. BRIPTU SUTRISNO 3. PENGDA MOMON 4. PHL ARNO	Hadir Hadir Dinas Dinas
14.	BIRO PERSONIL	TIDAK HADIR APEL	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA



SURAT - KEPUTUSAN
No. Pol.: Skep / 562 / XII / 2009

tentang

SATPAM BERPRESTASI DALAM MENANGKAP KASUS TINDAK PIDANA
TINGKAT POLDA METRO JAYA DALAM RANGKA HUT POLDA METRO JAYA KE - 60
DAN HUT SATPAM KE - 29 TAHUN 2009

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan kerja Satpam di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, perlu menetapkan Satpam Berprestasi dalam menangkap kasus tindak pidana pada saat pelaksanaan tugas lapangan Tahun 2009.
- Meringkat** :
1. Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
 2. Surat Telegram Kapolri No. Pol : ST / 1151 / XI / 2009 tanggal 15 Nopember 2009 tentang rangkaian kegiatan HUT Satpam Ke - 29 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009.
 3. Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol : ST / 571 / XI / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang rangkaian kegiatan HUT Satpam Ke - 29 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009.
 4. Surat Kapolda Metro Jaya No. Pol : B / 11119 / XII / 2009 perihal permohonan anggota Satpam berprestasi tahun 2009.
- Memperhatikan** : Hasil pengimanan dan penilaian masing-masing Polres jajaran Polda Metro Jaya terhadap pemberian penghargaan kepada anggota Satpam berprestasi wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2009

/ MEMUTUSKAN ...

Universitas Indonesia

07.	DIT RESKRIM SUS Jumlah: 6 Orang Hadir : 6 Orang Kurang: - Orang	1. KOMPOL SUTIONO 2. AKP SUNARTO 3. BRIGADIR CECEP 4. IPDA RICARDO 5. APTU NYOMAN 6. BRIPTU DIAN DWI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
08.	DEN 88 AT Jumlah: 13 Orang Hadir : 13 Orang Kurang: - Orang	1. AKP EDI W. 2. AKP BUDI E. 3. AKP SUBARN 4. APTU RB SIAGIAN 5. BRIPKA BASUKI 6. BRIPKA HASAN 7. BRIGADIR HARIANSYAH 8. BRIPTU AGUNG PURNOMO 9. BRIPDA DESMON 10. AKP GALINGGANG 11. BRIPKA M. TAMBA 12. BRIPKA HENDRIK 13. BRIPDA RAHMAT	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
09.	WATTAH UM Jumlah: 10 Orang Hadir : 9 Orang Kurang: 1 Orang	1. APTU MS TAMBA 2. AIPDA SUHARDI 3. BRIPTU SIGIT NOVRIADI 4. BRIPTU I GEDE AGUNG 5. BRIPTU AGUNG 6. BRIPDA EKA PASUS 7. BRIPDA ED APRIYANTO 8. BRIPDA RETNO BINTARI 9. BRIPDA DWI APPRILIA 10. BRIPDA RAHMAT BINUS	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Dinas (Kr. Jati) Hadir Hadir Hadir Hadir
10.	SPK POLDA METRO JAYA Jumlah: 7 Orang Hadir : 6 Orang Kurang: 1 Orang	1. KOMPOL DIDIK 2. IPTU YULI KARTIKA 3. BRIPKA SUGITO 4. BRIPTU DYAH TRI UTAMI 5. BRIPTU DERMA MULYAWAN 6. BRIPTU AYU TISNAWATI 7. BRIPTU LINA NONALJANTO	Hadir Hadir Hadir Cutl Hadir Hadir Hadir
11.	BID TELEMATIKA	TIDAK HADIR APEL	
12.	BID DOKKES Jumlah: 5 Orang Hadir : 5 Orang Kurang: - Orang	1. PENATA 1 DR. TATI 2. BRIGADIR YANI 3. BRIPTU M. NUH 4. PENGDA AYU 5. PENGDA 1 TUTI	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
13.	DENMA Jumlah: 4 Orang Hadir : 2 Orang Kurang: 2 Orang	1. PENDA SUHARI 2. BRIPTU SUTRISNO 3. PENGDA MOMON 4. PHL ARNO	Hadir Hadir Dinas Dinas
14.	BIRO PERSONIL	TIDAK HADIR APEL	

15	BID HUMAS	TIDAK HADIR APEL	
16.	WATTAH NARKOBA Jumlah : 10 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 1 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU AGUS 2. AIPTU BUDI W 3. BRIGADIR ASEP M 4. BRIGADIR WAHYU 5. BRIPTU SYARIFUDIN 6. BRIPTU HIMAWAN 7. BRIPTU AGUNG 8. BRIPDA REVI 9. BRIPDA WAYAN 10. BRIPDA PIPTI 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas (Kr. Jatf)</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
17.	BID PROPAM Jumlah : 14 Orang Hadir : 2 Orang Kurang : 12 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP DEZEN 2. AIPTU ANDI 3. AIPTU SURADONO 4. AIPDA MARYON 5. BRIPKA SUBAGYO 6. BRIPKA ANDI H. 7. BRIPKA HENDRAWAN 8. BRIPKA CECEP 9. BRIGADIR RAHMAT 10. BRIPDA YOGA 11. BRIPDA ALWI 12. AIPTU ANDI R. 13. BRIPTU HABIBI 14. BRIPDA ALBAERT 	<p>Hadir</p>
18.	DIT NARKOBA Jumlah : 12 Orang Hadir : 9 Orang Kurang : 3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPOL SUPRIYADI 2. KOMPOL SYAMSIRIL ILYAS 3. KOMPOL ENDANG SUTISNA 4. BRIPKA TUGIYO 5. BRIPKA TOTO 6. BRIPKA SUMARNO 7. BRIPKA DITO WAHYUDI 8. BRIGADIR ROSDIANA M. 9. BRIGADIR ARIF SUHONO 10. BRIGADIR AGUS SALIM 11. BRIGADIR DENI TRI PUTRA 12. BRIPTU SANDI PURNAMA 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Sakit</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas</p> <p>Hadir</p> <p>Dinas</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
19.	BIRO LOGISTIK Jumlah : 7 Orang Hadir : 7 Orang Kurang : - Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU PRAPTO 2. BRIPDA ASEP 3. BRIPTU SYAHRIR 4. BRIPTU HERI 5. BRIPTU ROBI 6. BRIPTU ARIFIN 7. JURU SUSILO 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>
20.	DIT INTELKAM Jumlah : 7 Orang Hadir : 3 Orang Kurang : 4 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPOL SUWARSO 2. BRIPDA RENER BALTAZAR 3. BRIPKA JUVENTUS 4. BRIGADIR RENDI 	<p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p> <p>Hadir</p>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA



SURAT – KEPUTUSAN
No. Pol. : Skep 1562 / XII / 2009

tentang

SATPAM BERPRESTASI DALAM MENANGKAP KASUS TINDAK PIDANA
TINGKAT POLDA METRO JAYA DALAM RANGKA HUT POLDA METRO JAYA KE – 60
DAN HUT SATPAM KE – 29 TAHUN 2009

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan kerja Satpam di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, perlu menetapkan Satpam Berprestasi dalam menangkap kasus tindak pidana pada saat pelaksanaan tugas di lapangan Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
 2. Surat Telegram Kapolri No. Pol : ST / 1151 / XI / 2009 tanggal 15 Nopember 2009 tentang rangkaian kegiatan HUT Satpam Ke – 29 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009.
 3. Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol : ST / 571 / XI / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang rangkaian kegiatan HUT Satpam Ke – 29 tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009.
 4. Surat Kapolda Metro Jaya No. Pol : B / 11119 / XII / 2009 perihal permohonan anggota Satpam berprestasi tahun 2009.
- Memperhatikan** : Hasil pengiriman dan penilaian masing-masing Polres jajaran Polda Metro Jaya terhadap pemberian penghargaan kepada anggota Satpam berprestasi wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2009

/MEMUTUSKAN...

Universitas Indonesia

2 SURAT KEPUTUSAN KAPOLDA METRO JAYA
NO. POL : SKEP/ 862 /XII/2009
TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

MENUTUSKAN

Menetapkan : Anggota Satpam yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas dipangang telah menangkap pelaku tindak pidana sesuai dengan kasus yang ditanganinya wilayah hukum Polda Metro Jaya kepada anggota Satpam terbaik sebagai berikut :

1. Nama : Tawir Riyadi
 Instansi : Satpam Fakultas Ekonomi UI Salemba Jakarta Pusat
 Prestasi : Menangkap pelaku curanmor dengan membawa Senpi dan sajam secara tidak syah.
 Satwil : Polres Metro Jakarta Pusat
2. Nama : Ipenul Hakim
 Instansi : Satpam PT.Summarecon Agung, Tbk Kelapa Gading Jakarta Utara
 Prestasi : Menangkap pelaku pencurian pasal 365 KUHP pencurian Spion mobil Alperdh dengan jumlah tersangka 2 orang.
 Satwil : Polres Metro Jakarta Utara
3. Nama : Anwar
 Instansi : Satpam LTC Glodok Jakarta Barat
 Prestasi : Menangkap tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP/ pencurian HP
 Satwil : Polres Metro Jakarta Barat
4. Nama : Dikalara
 Instansi : Satpam PT Karya Tangkas Mandiri
 Prestasi : Menangkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP
 Satwil : Polres Metro Jakarta Timur
5. Nama : Sugino
 Instansi : Satpam UI Depok
 Prestasi : Menangkap penyalahgunaan narkotika pasal 78 ayat 1 (1)a UU RI No. 22/1997
 Satwil : Polres Metro Depok

/6. Nama

Universitas Indonesia

3 SURAT KEPUTUSAN KAPOLDA METRO JAYA
NO. POL. : SKEP/562/XII/2009
TANGGAL : 30 DESEMBER 2009

6. Nama : Retnadi
 Instansi : Satpam Mega Hyper Mall Bekasi
 Prestasi : Menangkap pencurian HP
 Satwil : Polras Metro Bekasi
7. Nama : Maksun bin Rosadi
 Instansi : Satpam Perumahan Pondok Ungu Bekasi
 Prestasi : Menangkap penyalahgunaan narkoba
 (Pil ekstasi 45 butir dan shabu-shabu 99,4 gram)
 Satwil : Polres Metro Bekasi Kabupaten

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kapolri .
2. Deops Kapolri.
3. Para Kapotres Jajaran Polda Metro Jaya.
4. Bank / Perusahaan.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada Anggota Satpam yang berprestasi untuk diketahui dan diundahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 30 Desember 2009
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA


 Dr. WAHYONO
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Universitas Indonesia